



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKIP

WAKIL MENTERI BUMN II

2022

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) khususnya unit kerja Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara II, Kementerian BUMN tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Wakil Menteri BUMN II merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang diberikan, laporan kinerja pencapaian sasaran strategis dan program Wakil Menteri BUMN II yang telah ditetapkan pada tahun 2022 sesuai dokumen Perencanaan tahun 2022. LKIP Wakil Menteri BUMN II 2022 ini menggambarkan berbagai capaian kinerja yang telah dicapai sesuai dengan tujuan untuk mendukung BUMN menjadi *Agent of Development* yang besar, kuat dan lincah. Selain itu, diharapkan kinerja Wakil Menteri BUMN II selama periode Tahun 2022 dapat terdokumentasikan dengan baik dan diharapkan dapat memberikan gambaran kebijakan yang telah diambil dalam rangka pembinaan BUMN.

Pada tahun 2022 Wakil Menteri BUMN II mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik yang ditunjukkan dengan capaian nilai kinerja organisasi (NKO) yang mencapai skor 103,60 atau memiliki kriteria Sangat Memuaskan. Hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan Pemerintah yang cukup agresif terhadap BUMN binaan Wakil Menteri BUMN II, misalnya melalui pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN), IP PEN, dan juga penjaminan atas pinjaman perusahaan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu pelaksanaan program kerja di lingkungan Wakil Menteri BUMN II. Semoga hasil capaian atas target selama periode Tahun 2022 ini dapat menjadi faktor pemacu untuk melaksanakan perbaikan kinerja di unit kerja Wakil Menteri BUMN II di masa yang akan datang.

Jakarta, 24 Februari 2023
Wakil Menteri BUMN II,



Kartika Wirjoatmodjo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
C. Profil Pejabat dan Pegawai	3
D. Mandat dan Peran Strategis.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis 2020-2024	6
B. Tantangan yang Dihadapi	9
C. Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan 2022.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
A. Evaluasi Kinerja.....	15
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Output.....	17
C. Pemanfaatan Anggaran.....	27
BAB IV PROGRAM STRATEGIS	28
A. Terbentuknya Holding Danareksa Tahap I dan Rencana Holding Danareksa Tahap II.....	28
B. Implementasi 5G.....	31
C. Transformasi PFN.....	32
D. Pelaksanaan pengembangan KEK Kesehatan Sanur	34
E. Pengembangan Tanamori Labuan Bajo.....	36
F. Implementasi pengembangan Taman Mini oleh PT TWC BPRB	38
G. Penyelesaian event internasional untuk percepatan pemulihan ekonomi pariwisata.....	39
H. Penyelesaian restrukturisasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	47
I. Realisasi Program kemitraan strategis (<i>asset recycling</i>)	48
J. Penyelesaian restrukturisasi/ reprofiling utang grup Holding Pariwisata	51
K. Renovasi Gedung Sarinah Thamrin	53
L. Pengembangan Kawasan Borobudur	54
M. Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Kontribusi Himbara	55
N. Post Integration Program Holding Ultra Mikro	59
O. Post Merger Bank Syariah BUMN.....	61
P. Program Penyaluran KUR.....	62
Q. Program Mekaar	64
R. KOPRA Super Platform & Mandiri Livin' Digital Super App	66
S. BNI Go Global (Serving Diaspora Indonesia)	68
T. Program KPR Bersubsidi Bank BTN	71

U.	Pelaksanaan Right Issue dan PMN kepada BTN	73
V.	Pelaksanaan Right Issue BSI.....	74
W.	Transformasi PT Pos Indonesia (Persero).....	75
X.	Proyek LRT Jabodebek	77
Y.	Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB)	78
Z.	Bali Maritime Tourism Hub (BMTH).....	80
AA.	Rights Issue PT Adhi Karya (Persero) Tbk	82
BB.	Integrasi BUMN Semen	84
Ö.	Penyehatan Keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.....	86
DD.	Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.....	87
BB.	Dukungan untuk UMKM melalui Program Penjaminan KUR	88
CC.	Dukungan Penyelamatan Pemegang Polis PT Jiwasraya (Persero)	90
DD.	Dukungan Perbaikan Kinerja PT ASABRI (Persero).....	96
EE.	Dukungan Perbaikan Program Tabungan Hari Tua (THT) yang diselenggarakan PT ASABRI (Persero) dan PT Taspen (Persero)	101
FF.	Dukungan Penyehatan Keuangan PT Jasindo	103
BAB V PENUTUP		106
LAMPIRAN.....		108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

BUMN merupakan lembaga yang memiliki posisi sangat strategis dalam perekonomian nasional. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah untuk: (i) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; (ii) mengejar keuntungan; (iii) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; (iv) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; (v) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Sebagai lembaga negara yang memiliki tugas merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pembinaan BUMN, Kementerian BUMN memiliki peran yang sangat menentukan bagi perkembangan BUMN secara umum. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Kementerian BUMN harus dapat mendukung pengelolaan BUMN sehingga mampu menciptakan BUMN yang sehat dan berdaya saing tinggi. Perumusan kebijakan yang tepat sangat dibutuhkan agar BUMN siap dan mampu bersaing dengan swasta, tidak hanya di tingkat nasional akan tetapi di tingkat regional dan internasional.

Pada tahun 2022, kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik setelah adanya pandemi covid-19. Sejalan dengan hal tersebut, kondisi BUMN semakin membaik juga baik dari sisi bisnis maupun dari sisi keuangan. Hal tersebut didukung dengan adanya dukungan Pemerintah kepada BUMN di lingkungan Wakil Menteri BUMN II dengan pemberian PMN baik tunai maupun non tunai.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Unit Wakil Menteri BUMN II) sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah

diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan.

B. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN nomor PER-4/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN, Wakil Menteri BUMN II memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Wakil Menteri BUMN II adalah perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha, penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, dan restrukturisasi badan usaha milik negara sektor Jasa dan pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor Jasa.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Wakil Menteri BUMN II menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan usaha, penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, dan restrukturisasi badan usaha milik negara sektor Jasa serta pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor Jasa;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha, penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, dan restrukturisasi badan usaha milik negara sektor Jasa serta pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor Jasa;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan usaha, penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, dan restrukturisasi badan usaha milik negara sektor Jasa serta pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor jasa; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

3. Struktur Organisasi



C. Profil Pejabat dan Pegawai



Kartika Wirjoatmodjo

Lahir di Surabaya, 18 Juli 1973. Merupakan lulusan S1 Universitas Indonesia jurusan Ekonomi pada tahun 1996, meraih gelar *Master of Business Administration* dari Erasmus University pada tahun 2001.

Sumber Daya Manusia selama Tahun 2022 di Wakil Menteri II dilaksanakan oleh :

No	Nama	Jabatan
1	Kartika Wirjoatmodjo	Wakil Menteri II
2	Muhammad Khoerur Roziqin	Asisten Deputi Bidang Jasa Keuangan
3	Hendrika Nora Oslo Sinaga	Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur
4	Anindita Eka Wibisono	Plt. Asisten Deputi Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun
5	Desty Arlaini	Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik
6	Endra Gunawan	Plt. Asisten Deputi Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung
7	Yohanes Babtista Priyatmo Hadi	Asisten Deputi Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media

D. Mandat dan Peran Strategis

1. Kontribusi kepada APBN

Sebagai wujud dari investasi Pemerintah, BUMN di bawah binaan Wakil Menteri BUMN II berupaya memberikan kontribusi terhadap APBN melalui pajak dan dividen yang menyokong penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Ke depannya Kementerian BUMN dan BUMN mempunyai komitmen untuk meningkatkan kontribusi kepada APBN sekaligus di sisi lain meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses produksi dalam rangka mengurangi atau bahkan menghilangkan ketergantungan pada APBN.

2. Pelaksana Penugasan Pemerintah

Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMN yaitu mengejar keuntungan. Oleh karena itu, BUMN di bawah binaan Wakil Menteri II sebagai salah satu pelaksana penugasan Pemerintah berupaya menjalankan perannya dengan baik dalam rangka mendukung percepatan pembangunan sekaligus tetap menjaga sustainability BUMN yang mendapatkan penugasan Pemerintah.

3. Lima Prioritas Kementerian BUMN dalam pembinaan BUMN

- a. Nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia
Meningkatkan nilai ekonomi dan dampak sosial terutama di bidang ketahanan pangan, energi, dan kesehatan.
- b. Inovasi Model Bisnis
Restrukturisasi atau inovasi model bisnis melalui pembangunan ekosistem, kerjasama, pertimbangan kebutuhan *stakeholders* dan fokus pada core business masing-masing BUMN.
- c. Kepemimpinan teknologi
Memimpin secara global dalam teknologi strategis dan melembagakan kapabilitas digital seperti *data management*, *advanced analytics*, *big data*, *artificial intelligence*, dan lain-lain.
- d. Peningkatan Investasi
Mengoptimalkan nilai aset BUMN dan menciptakan ekosistem investasi yang sehat.
- e. Pengembangan talenta
Pengembangan dan pelatihan tenaga kerja, mengembangkan SDM yang berkualitas, profesionalisasi tata kelola dan sistem seleksi SDM.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024

1. Tujuan Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN bahwa Kementerian BUMN dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara yaitu memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN. Pembinaan badan usaha milik negara tersebut termasuk pembinaan entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan ketentuan. Adapun fungsi dari Kementerian BUMN, yaitu:

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMN;
- 2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMN;
- 3) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan kami;
- 4) Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab kami; dan
- 5) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kami.

Kementerian BUMN dalam mendukung pencapaian visi menuju organisasi yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia “Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, Wakil Menteri BUMN II melakukan pembinaan BUMN dengan mengedepankan pendekatan *profitable business*, *sustainable business*, dan *agent of development*. Tujuan yang hendak dicapai dalam pembinaan BUMN adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Kementerian BUMN sebagai Pembina dan Pengawas BUMN yang profesional;
- 2) Mewujudkan Kemandirian dan Korporatisasi BUMN;

- 3) Meningkatkan Keunggulan dan Daya Saing BUMN; dan
- 4) Memaksimalkan Kontribusi BUMN Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan.

Sehubungan dengan penetapan tujuan Kementerian BUMN tersebut di atas, dalam pelaksanaannya Wakil Menteri BUMN II secara langsung mendukung seluruh tujuan Kementerian BUMN tersebut.

2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan nasional, maka Kementerian BUMN merumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan sasaran strategis organisasi, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

Menteri BUMN dalam mendukung pencapaian tujuan strategis yang disebutkan di atas menetapkan Peraturan Menteri BUMN nomor PER-8/MBU/08/2020. Peraturan tersebut menetapkan 9 (sembilan) strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian BUMN pada tahun 2024. Adapun rincian sasaran strategis Kementerian BUMN, sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran Strategis
1	Mewujudkan Kementerian BUMN sebagai pembina dan pengawas BUMN yang professional	1. Menciptakan SDM yang unggul dan profesional
		2. Menciptakan organisasi yang kuat, sehat, dan akuntabel
2	Mewujudkan kemandirian dan korporatisasi BUMN	1. Meningkatnya tata kelola BUMN sebagai korporasi
		2. Penguatan kapasitas BUMN
3	Meningkatkan keunggulan dan daya saing BUMN	1. Meningkatnya daya saing BUMN
		2. BUMN unggul di kancah global
4	Memaksimalkan kontribusi BUMN terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan	1. Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara (APBN)
		2. Kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan nasional

No	Tujuan	Sasaran Strategis
		3. Kontribusi BUMN dalam peningkatan <i>value</i> BUMN untuk pemegang saham (Aset Negara)

Sasaran Strategis Kementerian BUMN tersebut kemudian diturunkan menjadi Sasaran Strategis Wakil Menteri BUMN II. Hal ini akan menjadi sebuah pedoman dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan seluruh unit kerja di bawah koordinasi Wakil Menteri BUMN II. Sasaran Strategis yang terdapat pada Wakil Menteri BUMN II yaitu:

1. Menciptakan SDM yang unggul dan profesional;
2. Penguatan kapasitas BUMN;
3. Meningkatnya daya saing BUMN;
4. BUMN unggul di kancah global;
5. Kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan nasional; dan
6. Kontribusi BUMN dalam peningkatan *value* BUMN untuk pemegang saham (Aset Negara).

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Wakil Menteri BUMN II yang melakukan pelaksanaan tugas dan fungsi menuju tercapainya visi misi Kementerian BUMN, pencapaian target sampai dengan tahun 2022 dapat diukur melalui 6 (enam) Sasaran Strategis (SS) dan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Kontribusi BUMN dalam peningkatan <i>value</i> BUMN untuk pemegang saham (Aset Negara)	<i>Net Profit</i>
		<i>EBITDA Margin</i>
		<i>Return on Equity</i>
2	Kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan nasional	Jumlah Nasabah Aktif Mekaar
		% Total Realisasi Capex
		Pencapaian Target Proyek dan Program Strategis Nasional
3	BUMN unggul di kancah global	Jumlah Negara Tujuan Ekspor

4	Meningkatnya daya saing BUMN	Implementasi Program Digitalisasi oleh BUMN
		Implementasi Model Bisnis yang terintegrasi oleh BUMN
5	Penguatan kapasitas BUMN	Penyelesaian Program Restrukturisasi (Pembentukan Holding) Klaster BUMN
		Penyelesaian Target IPO/Tambahan Nilai Penawaran BUMN/Anak Usaha BUMN di Pasar Modal
6	Menciptakan SDM yang unggul dan profesional	% Milenial (<42 tahun) dalam <i>Nominated Talent</i>
		% Perempuan dalam <i>Nominated Talent</i>

B. Tantangan yang Dihadapi

Dalam menjalankan proses bisnisnya, cukup banyak pengambilan kebijakan BUMN pada lingkup Wakil Menteri BUMN II yang juga memerlukan dukungan dan koordinasi dengan unit kerja lain maupun instansi lainnya. Dalam kaitannya dengan unit lain, maka hal ini adalah bagian dari proses bisnis di lingkungan Kementerian BUMN di mana setiap aksi korporasi memerlukan masukan, pendapat, dan evaluasi dari unit-unit yang bertanggungjawab untuk menghindari maladministrasi. Di sisi lain, Kementerian BUMN juga memerlukan dukungan dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain yang memiliki kewenangan dalam hal pengambilan kebijakan pada suatu sektor. Hal ini tidak terlepas dari posisi BUMN yang bergerak di berbagai sektor dan harus mengikuti kebijakan sektoral tersebut.

Selanjutnya, dalam upaya mencapai target rencana kerja tahun 2022, terdapat beberapa tantangan yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Wakil Menteri BUMN II, yaitu:

1. Regulasi

Terdapat banyak Peraturan Perundang-Undangan yang harus dipatuhi oleh BUMN dalam menjalankan kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan badan usaha swasta. Selain patuh pada Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, BUMN juga harus patuh pada serangkaian Undang-Undang bidang Keuangan Negara, Undang-Undang Sektoral, dan Undang-Undang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara.

2. Pengawasan

Dalam proses pengawasan BUMN, terdapat banyak institusi yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam pengawasan tersebut, mulai dari BPK, BPKP, KAP, Kementerian/Lembaga Teknis, Auditor Internal, Dewan Komisaris/Pengawas, bahkan DPR/DPRD. Hal ini di satu sisi merupakan hal yang positif untuk menegakkan *good corporate governance* (GCG), namun di sisi lain akan memerlukan sumber daya dan waktu yang cukup yang harus disediakan oleh Manajemen BUMN.

3. Koordinasi Lintas Kementerian/ Lembaga

Berbagai rencana strategis dan aksi korporasi BUMN memerlukan *view* dan persetujuan dari berbagai K/L, sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan *concern* dari setiap K/L. Di lain sisi, setiap K/L memiliki kewenangan dan kebijakan yang berbeda sesuai arah dan tujuan organisasi. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya dan waktu yang cukup untuk melakukan koordinasi lintas K/L.

4. Persaingan Usaha

Pada tahun 2022, kasus COVID-19 semakin menurun, hingga pada akhir tahun 2022, Pemerintah telah memutuskan untuk mencabut kebijakan PPKM. Sepanjang tahun 2022 tersebut, berbagai sektor usaha mulai bangkit seiring dengan pertumbuhan perekonomian nasional. BUMN dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sehingga dapat terus bersaing dengan kompetitornya, bukan hanya di pasar domestik tetapi juga di pasar regional. Selain itu, BUMN juga diharuskan untuk terus berinovasi dan bertransformasi, utamanya digitalisasi produk dan proses bisnis.

5. Birokrasi

Kementerian BUMN sebagai lembaga Pemerintah terdiri dari berbagai unit kerja, sehingga dalam proses pembinaan BUMN tidak terlepas dari sistem birokrasi. Di sisi lain, pembinaan BUMN memerlukan percepatan dalam mendukung aksi korporasi BUMN. Sepanjang tahun 2022, administrasi dan proses bisnis di Kementerian BUMN menjadi tantangan tersendiri, di mana diperlukan percepatan proses bisnis dengan tetap menjaga kualitas layanan.

6. Kondisi Perekonomian Global

Pada tahun 2022, terjadi berbagai intrik perekonomian global, di antaranya pelemahan ekonomi negara maju, tekanan inflasi global, pengetatan kebijakan

moneter yang agresif, serta peningkatan tensi geopolitik yang berdampak pada lonjakan harga komoditas dunia.

C. Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan 2022

Perjanjian Kinerja Wakil Menteri BUMN II Tahun 2022 telah sejalan dengan Renstra Kementerian BUMN Tahun 2020-2024, yaitu:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
1.	Kontribusi BUMN dalam peningkatan value BUMN untuk pemegang saham (Aset Negara)	<i>Net Profit</i>	Rp T	115
		<i>Ebitda Margin</i>	%	32,52
		<i>Return on Equity</i>	%	9,13
2	Kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan nasional	Jumlah nasabah aktif Mekaar	Jumlah Nasabah	12.014.328
		% Total realisasi capex	%	76
		Pencapaian target proyek dan program strategis nasional	%	61
3	BUMN unggul di kancah global	Jumlah negara tujuan ekspor	Jumlah Negara	11
4	Penguatan kapasitas BUMN	Penyelesaian program restrukturisasi (Pembentukan Holding BUMN) Klaster BUMN	Jumlah Program	3
		Penyelesaian target IPO/ Tambahan Nilai Penawaran BUMN/ Anak Usaha BUMN di Pasar Modal	Jumlah Perusahaan	6
5	Meningkatnya daya saing BUMN	Implementasi program digitalisasi oleh BUMN	Jumlah BUMN	4
		Implementasi model bisnis yang terintegrasi oleh BUMN	Jumlah BUMN	6
6	Menciptakan SDM yang unggul dan profesional	% Milennial (≤ 42 tahun) dalam <i>nominated talent</i>	%	11
		% Perempuan dalam <i>nominated talent</i>	%	12

Adapun penjelasan penjelasan atas indikator kinerja utama Wakil Menteri BUMN II adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi BUMN dalam Peningkatan Value BUMN untuk Pemegang Saham

Meningkatkan value terhadap pemegang saham BUMN tentunya memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan negara selaku pemegang saham mayoritas BUMN.

a. *Net Profit*

Merupakan total keuntungan perusahaan setelah dikurangi beban dan biaya perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan BUMN dalam memberikan kontribusi finansial bagi Pemegang Saham, menjadi tolok ukur *stakeholder* dalam mengambil keputusan korporasi, serta menjadi indikator penilaian tingkat kesehatan BUMN. Net profit dihitung dengan menjumlahkan laba bersih seluruh BUMN di bawah binaan Wakil Menteri BUMN II.

b. *EBITDA Margin*

Rasio yang mencerminkan tingkat keuntungan perusahaan setelah pendapatan/penghasilan usaha dikurangi dengan biaya produksi dan biaya operasional, namun beban depresiasi dan amortisasi tidak dimasukkan dalam biaya produksi dan biaya operasional untuk perhitungan ini, sehingga keduanya tidak menjadi pengurang laba. Perhitungan EBITDA Margin adalah EBITDA dibagi dengan pendapatan. EBITDA Margin dinyatakan dalam satuan persentase (%).

c. *Return on Equity*

Merupakan suatu unsur penting demi mengetahui sejauh mana suatu bisnis mampu mengelola permodalan dari para investornya menjadi laba. Apabila perhitungan ROE makin besar, maka reputasi perusahaan pun meningkat di mata pelaku pasar modal, sebab, usaha tersebut terbukti mampu memanfaatkan modal dengan optimal. *Return on Equity* dihitung dengan membagi total laba dengan ekuitas BUMN, dan dinyatakan dengan persentase (%).

2. Kontribusi BUMN sebagai Agen Pembangunan Nasional.

Sebagaimana amanat undang-undang, BUMN terus menerus didorong untuk memberikan kontribusi membangun negeri baik dari segi peluang kerja, infrastruktur, serta sarana dan prasarana hingga pada energi terbarukan.

a. Jumlah Nasabah Aktif Mekaar

Program Mekaar merupakan bantuan pinjaman usaha secara bertahap tanpa agunan dengan bunga rendah yang menyasar para ibu rumah tangga (IRT) guna membantu perekonomian keluarga yang dikelola oleh salah satu anak BUMN yaitu PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

b. % Total Realisasi Capex

Capital Expenditure (CAPEX) merupakan pengeluaran yang digunakan oleh BUMN untuk mendapatkan atau meningkatkan masa manfaat atau nilai dari aset

perusahaan, yang bertujuan memberikan leverage terhadap perekonomian nasional melalui adanya *multiplier effect*, dan memberikan kesempatan kerja bagi para pencari kerja. Indikator ini dihitung dengan membandingkan realisasi capex dengan target/ anggarannya.

c. Pencapaian Target Proyek dan Program Strategis Nasional

BUMN tidak sekadar seperti perusahaan pada umumnya, namun peran BUMN dalam hal investasi telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara makro. BUMN telah menunjukkan peran yang strategis dalam pembangunan infrastruktur antara lain pembangunan jalan tol, bandara/pelabuhan, jembatan, jalur/stasiun kereta api, dan proyek nasional lainnya. Banyak proyek berskala nasional didukung oleh BUMN sebagai bagian dari agen pembangunan nasional. Indikator ini mengukur pencapaian BUMN atas proyek/ program strategis nasional yang diamanatkan kepada BUMN.

3. BUMN Unggul di Kancah Global.

BUMN diharapkan tidak hanya menjadi pemain utama di dalam negeri namun juga dapat berkiprah dan diperhitungkan secara global bahkan dapat menjadi *regional champion*.

- Jumlah Negara Tujuan Ekspor

Peningkatan pasar BUMN ke luar negeri dinilai melalui jumlah negara yang menjadi tujuan ekspor produk-produk BUMN dengan nilai di atas USD10.000. Indikator ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing BUMN tidak hanya di dalam negeri namun juga di luar negeri.

4. Penguatan Kapasitas BUMN

Dalam suatu kemandirian BUMN, tentunya BUMN perlu memiliki kapasitas pendanaan yang mumpuni baik melalui pinjaman lembaga keuangan, *right issue*, ataupun melalui *Initial Public Offering* (IPO) di pasar saham.

a. Penyelesaian program restrukturisasi (Pembentukan Holding BUMN) Klaster BUMN

Holding merupakan suatu bentuk aksi korporasi yang menggabungkan beberapa Perusahaan dengan salah satu Perusahaan yang menjadi induknya. Pembentukan holding bertujuan untuk memperkuat daya saing, memperkuat struktur finansial dan manajerial BUMN, membentuk suatu ekosistem bisnis yang sehat, dan meningkatkan inklusi keuangan yang signifikan di BUMN.

b. Penyelesaian target IPO/ Tambahan Nilai Penawaran BUMN/ Anak Usaha BUMN di Pasar Modal

IPO merupakan suatu salah satu bentuk privatisasi dengan cara menjual saham pertama kali berdasarkan ketentuan pasar modal. Sementara *right issue* adalah hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli efek baru, ketika perusahaan publik membutuhkan dana segera, maka perusahaan bisa menerbitkan saham baru untuk kemudian dibeli oleh investor.

5. Meningkatkan Daya Saing BUMN

Melalui fokus dalam peningkatan daya saing BUMN, ke depan BUMN akan terus didorong dalam meningkatkan korporatisasi berbasis teknologi dan terus menerus menciptakan inovasi bisnis.

a. Implementasi program digitalisasi oleh BUMN

Pemerintah mendorong tren digitalisasi ke sektor jasa dan industri, BUMN harus memanfaatkan momentum tren digitalisasi ini dengan bertransformasi dan membangun ekosistem digital agar bisa terus berkembang.

b. Implementasi model bisnis yang terintegrasi oleh BUMN

BUMN terus berinovasi membangun suatu sistem dan model yang dapat memfasilitasi proses bisnis dengan menyajikan informasi *real time* dan akurat, sehingga dapat mempermudah manajemen dalam membuat keputusan secara cepat dan tepat.

6. Menciptakan SDM yang Unggul dan Profesional

Dalam mewujudkan BUMN sebagai perusahaan yang profesional, diperlukan adanya SDM yang unggul dan profesional.

a. % Milennial (≤ 42 tahun) dalam *nominated talent*

Mengukur jumlah *nominated talent* milenial dibandingkan total *nominated talent*. Realisasi dihitung dengan merata-rata persentase milenial dalam *nominated talent* BUMN tiap keasdepan.

b. % Perempuan dalam *nominated talent*

Mengukur jumlah *nominated talent* perempuan dibandingkan total *nominated talent*. Realisasi dihitung dengan merata-rata persentase perempuan dalam *nominated talent* BUMN tiap keasdepan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Evaluasi Kinerja

Pengukuran kinerja Wakil Menteri BUMN II dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasi. Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, Pemerintah maupun *stakeholder* lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta hasil pengukuran kinerja Wakil Menteri BUMN II tahun 2022 menunjukkan capaian yang baik dengan Nilai Kinerja Organisasi sebesar 103,60 dengan kriteria Sangat Memuaskan. Dari 6 (enam) sasaran strategis dan 13 (tiga belas) indikator kinerja utama/"IKU", terdapat 10 (sepuluh) IKU yang mencapai target dan 3 (tiga) IKU yang tidak mencapai target. Adapun IKU yang tidak mencapai target yaitu Penyelesaian Program Restrukturisasi (Pembentukan Holding) Klaster BUMN dengan pencapaian sebesar 66,7%, Penyelesaian Target IPO/Tambahan Nilai Penawaran sebesar 66,7%, dan Implementasi Model Bisnis yang terintegrasi oleh BUMN dengan pencapaian sebesar 83,3%. Tidak tercapainya indikator-indikator tersebut di antaranya disebabkan oleh kendala dalam aspek regulasi, perkembangan kondisi finansial BUMN, serta penundaan program/proyek BUMN.

Secara lengkap, evaluasi dan analisis capaian kinerja Wakil Menteri BUMN II tahun 2022 dapat dijelaskan dalam bagian evaluasi dan analisis capaian kinerja output. Adapun data kinerja tahun 2022 ini masih menggunakan data laporan keuangan *unaudited* 2022 mengingat belum terbitnya seluruh laporan keuangan *audited* BUMN binaan Wakil Menteri BUMN II tahun 2022 ketika laporan ini disusun. Rincian pencapaian kinerja Wakil Menteri BUMN II Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Nilai Kinerja Organisasi
Wakil Menteri BUMN II Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Bobot	Target	Realisasi	Capaian TW IV 2022*	Indeks Capaian IKU	Nilai Kinerja Organisasi
Kontribusi BUMN dalam peningkatan value BUMN untuk pemegang saham (Aset Negara)	Net Profit	8	115	209,07	120%	10	103,60
	EBITDA Margin	7	32,52%	41,15%	120%	8	
	Return on Equity	8	9,13%	16,93%	120%	10	
Kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan nasional	Jumlah Nasabah Aktif Mekaar	7	12.014.328	13.921.722	115,9%	8	
	% Total Realisasi Capex	7	76%	76%	100%	7	
	Pencapaian Target Proyek dan Program Strategis Nasional	8	61%	61%	100%	8	
BUMN unggul di kancah global	Jumlah Negara Tujuan Ekspor	7	11	20	120%	8	
	Penyelesaian Program Restrukturisasi (Pembentukan Holding) Klaster BUMN	8	3	2	66,7%	5	
	Penyelesaian Target IPO/ Tambahan Nilai Penawaran BUMN/ Anak Usaha BUMN di Pasar Modal	8	6	4	66,7%	5	
Meningkatnya daya saing BUMN	Implementasi Program Digitalisasi oleh BUMN	8	4	4	100,0%	8	
Menciptakan SDM yang unggul dan profesional	Implementasi Model Bisnis yang terintegrasi oleh BUMN	8	6	5	83,3%	7	
	% Milenial (≤ 42 tahun) dalam Nominated Talent	8	11%	19%	120%	10	
	% Perempuan dalam Nominated Talent	8	12%	18%	120%	10	
Total Nilai Akhir Kriteria Pencapaian NKO							103,60
Sangat Memuaskan							

*) maksimal 120 sesuai surat keputusan Menteri BUMN No. SK-217/MBU/10/2017

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Output

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Wakil Menteri BUMN II Tahun 2022 sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1.	:	Kontribusi BUMN dalam penguatan value BUMN untuk pemegang saham (Aset Negara)
-----------------------------	---	---

Indikator kinerja, target dan realisasi atas capaian sasaran adanya rumusan kebijakan BUMN tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Persentase Pencapaian
		Target	Realisasi	
<i>Net Profit</i>	Rp Triliun	115	209,07	120%
<i>EBITDA Margin</i>	%	32,52%	41,15%	120%
<i>Return on Equity</i>	%	9,13%	16,93%	120%

a. *Net Profit*

Realisasi 2021	Realisasi 2022	Growth
Rp59,10 triliun	Rp 209,07 triliun	253,76%

Capaian indikator kinerja *net profit* ini adalah realisasi jumlah laba bersih BUMN dalam pembinaan Wakil Menteri BUMN II. Di kondisi perekonomian yang baru pulih dari pandemi COVID-19 yang telah berlangsung sejak 2020 dan *third wave* wabah yang terjadi pada triwulan I 2022, BUMN terus berupaya memulihkan bisnis operasionalnya seiring dengan kondisi perekonomian nasional yang optimis mengalami pertumbuhan. Pada tahun buku 2022, BUMN dalam pembinaan Wakil Menteri BUMN II mampu mencapai *net profit* Rp209,07 triliun atau 182% dari target sebesar Rp115,00 triliun. Realisasi ini tumbuh signifikan 253,76% dibandingkan periode 2021 yang terealisasi Rp59,10 triliun, hal ini menunjukkan perbaikan kinerja dan mitigasi risiko yang semakin optimal. Kontribusi *net profit* terbesar berkontribusi oleh BUMN sektor jasa keuangan yang mampu mencapai laba Rp110,76 triliun seiring dengan renegosiasi suku bunga,

optimalisasi dana murah, serta optimalisasi *fee based income*. Di sisi lain, BUMN sektor pariwisata dan pendukung pada tahun 2022 mampu membukukan laba bersih Rp 56.309,38 triliun setelah pada tahun sebelumnya, BUMN Sektor Pariwisata dan Pendukung mengalami kerugian sebesar Rp47,76 triliun. Hal ini menandakan keberhasilan berbagai upaya restrukturisasi yang dilakukan selama Tahun 2022 untuk meningkatkan kondisi Perseroan BUMN pada Lingkup Wamen II.

b. EBITDA Margin

2021	Pendapatan	EBITDA	EBITDA Margin
	Rp 752,34 T	Rp 287,84 T	38,26%
2022	Pendapatan	EBITDA	EBITDA Margin
	Rp 817,59 T	Rp 336,40 T	41,15%
Growth			7,55%

Realisasi indikator kinerja EBITDA Margin tahun 2022 mencapai 41,15% melampaui target untuk tahun 2022 sebesar 32,52%. Atas pencapaian ini, pencapaian indikator EBITDA Margin mencapai $\geq 120\%$ dari target. Target EBITDA margin mampu dicapai dengan total EBITDA Rp336,40 triliun dan total pendapatan Rp817,59 triliun. Selain itu, dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, realisasi tahun 2022 tumbuh 7,55% seiring pertumbuhan EBITDA.

Dilihat dari EBITDA margin per sektor, BUMN sektor Jasa Keuangan, sektor Telekomunikasi dan Media, serta sektor Logistik mampu menghasilkan EBITDA margin yang tinggi dibandingkan sektor lain dengan realisasi masing-masing 54,60%; 50,94%; dan 25,35%. Dari sisi pendapatan dan EBITDA, BUMN sektor Jasa Keuangan membukukan pendapatan dan EBITDA tertinggi sebesar masing-masing Rp349,38 triliun dan Rp190,74 triliun seiring dengan penurunan beban bunga. Sebagai catatan, dalam BUMN Perbankan, perhitungan EBITDA margin menggunakan indikator tersendiri yaitu Pre-Provision Operating Profit (PPOP) margin yang lebih relevan dengan bisnis perbankan.

Dengan kata lain, akumulasi EBITDA margin BUMN Wakil Menteri BUMN II mampu *inline* dan bahkan melampaui target dari seluruh sektor BUMN di bawah Wakil Menteri BUMN II.

c. Return on Equity

Realisasi 2021	Realisasi 2022	Growth
----------------	----------------	--------

4,13%	16,93%	309,93%
-------	--------	---------

Return on Equity (ROE) tahun 2022 mencapai 16,93% dengan tingkat pencapaian dari target maksimal 120,00% dibandingkan targetnya sebesar 9,13%. Ketercapaian ROE merupakan dampak dari peningkatan profitabilitas BUMN sektor Wakil Menteri II hingga 253,76% dari Tahun 2021. Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya, realisasi tahun 2022 meningkat 309,93% dari realisasi tahun 2021 sebesar 4,13% karena kondisi perekonomian yang menunjukkan peningkatan positif setelah mengalami keterpurukan akibat pandemi covid-19 selama 2 tahun.

Sasaran Strategis 2.	:	Kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan nasional
-----------------------------	---	---

Indikator kinerja, target dan realisasi atas capaian sasaran adanya rumusan kebijakan BUMN tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		% Pencapaian
		Target	Realisasi	
Jumlah Nasabah Aktif Mekar	Jumlah Nasabah	12.014.328	13.921.722	115,9%
% Total Realisasi Capex	%	76,%	76%	100%
Pencapaian Target Proyek dan Program Strategis Nasional	%	61%	61%	100%

a. Jumlah Nasabah Aktif Mekaar

Realisasi 2021	Realisasi 2022	Growth
11.011.194	13.921.722	26,43%

PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar) merupakan layanan permodalan berbasis kelompok yang diperuntukan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro, baik yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usaha. Pada tahun 2022, jumlah nasabah Mekaar mencapai 13.921.722, realisasi ini jauh melampaui target sebesar 12.014.328 atau 115,9%

dari target. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, pencapaian ini tumbuh 26,43% dari realisasi tahun 2021 sejumlah 11.011.194 nasabah. Pencapaian ini merupakan upaya manajemen dalam mencapai target jumlah nasabah Mekaar yang ditargetkan Presiden Jokowi untuk mencapai 20 juta nasabah pada tahun 2024. Selain itu, PNM yang pada tahun 2021 telah resmi tergabung dalam Holding Ultra Mikro dengan induk BRI, mengoptimalkan sinergi ekosistem Ultra Mikro untuk mengakselerasi pencapaian jumlah nasabah aktif Mekaar.

b. Persentase Total Realisasi Capex

Realisasi 2021	Realisasi 2022	Growth
86,35%	76%	-11,99%

Indikator realisasi *capex* BUMN dalam lingkup pembinaan Wakil Menteri BUMN II pada tahun 2022 tercapai sebesar Rp121.518 miliar atau sebesar 76% dari target Rp 160.089 miliar. Namun realisasi *capex* jika dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi penurunan sebesar -11,99%. Kendati demikian, jika dilihat dari nominalnya, peningkatan realisasi capital expenditure tahun 2022 lebih besar 7% dari realisasi *capex* di tahun 2021 yang hanya mencapai Rp 113,480,11 miliar. Peningkatan nominal realisasi *capex* disebabkan pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik. Adapun rincian pencapaian *capex* adalah sebagai berikut:

1. Belanja modal sektor Jasa Logistik tercapai sebesar Rp15.341 miliar atau mencapai 44,23% dari targetnya sebesar Rp34.685 miliar.
2. Belanja modal sektor Jasa Infrastruktur tercapai sebesar Rp48.130 miliar atau mencapai 80,34% dari targetnya sebesar Rp59.908 miliar.
3. Belanja modal sektor Jasa Pariwisata dan Pendukung tercapai sebesar Rp 3.984 miliar atau mencapai 72,66% dari targetnya sebesar Rp5.484 miliar.
4. Belanja modal sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun tercapai sebesar Rp566 miliar atau mencapai 76,45% dari targetnya sebesar Rp740 miliar.
5. Belanja modal sektor Jasa Keuangan tercapai sebesar Rp9.999 miliar atau mencapai 79,77% dari targetnya sebesar Rp12.535 miliar.
6. Belanja modal sektor Jasa Telekomunikasi dan Media tercapai sebesar Rp43.497 miliar atau mencapai 93,07% dari targetnya sebesar Rp46.737 miliar.

c. Pencapaian Target Proyek dan Program Strategis Nasional

Realisasi 2021	Realisasi 2022	Growth
----------------	----------------	--------

78,25%	61,00%	-22,04%
--------	--------	---------

Pelaksanaan PSN merupakan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana terakhir diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Pelaksanaan PSN bertujuan untuk memaksimalkan percepatan pertumbuhan pada berbagai aspek antara lain pembangunan fisik (Jalan Tol, Pelabuhan, Bendungan, Jembatan, Bandara dll), penciptaan lapangan kerja dan pemulihan ekonomi nasional serta dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2022 sebanyak 100 PSN turut melibatkan BUMN baik yang berperan sebagai kontraktor maupun sebagai investor pada proyek tersebut. Capaian program strategis nasional yang berhasil diselesaikan terealisasi sebesar 61% dari target sebesar 61%. Realisasi ini turun 22,04% dibandingkan realisasi tahun 2021 yang mencapai 78,25%. Namun secara umum, realisasi ketercapaian proyek strategis nasional jika dibandingkan dengan target 2022 terealisasi secara penuh sesuai targetnya. Adapun beberapa proyek yang belum selesai dan akan dilanjutkan di tahun selanjutnya akan dimonitor perencanaan dan pelaksanaan proyek secara berkala sehingga perencanaan dan pelaksanaan dapat lebih matang.

Sasaran Strategis 3.	:	BUMN unggul di kancah global
-----------------------------	---	------------------------------

Indikator kinerja, target dan realisasi atas capaian sasaran adanya rumusan kebijakan BUMN tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		% Pencapaian
		Target	Realisasi	
Jumlah Negara Tujuan Ekspor	Negara	11	20	120,0%

Jumlah Negara Tujuan Ekspor

Realisasi 2021	Realisasi 2022	Growth
23	20	-13,04%

Jumlah negara tujuan ekspor pada tahun 2022 mencapai 20 negara, melampaui target sebanyak 11 negara sehingga pencapaian IKU mencapai angka maksimal yaitu 120%. Kendati demikian, jumlah negara tujuan ekspor ini menurun 13,04% dibandingkan jumlah negara pada tahun 2021 sebanyak 23 negara. Beberapa negara tujuan ekspor pada tahun 2022 ini yaitu Filipina, Nepal, Korea Selatan, India, Oceania, Timor Leste, Sri Lanka, Bangladesh, China, Fiji, Taiwan, Australia, Maldives, Singapore, Vietnam, Peru, United States, Mexico, Canada, Germany. Penurunan jumlah ekspor pada tahun 2022 disebabkan karena beberapa ekspansi BUMN dilakukan ke negara yang sama serta tidak terealisasinya ekspansi ekspor pada PT Industri Kereta Api (Persero). Untuk selanjutnya, pada tahun 2023 akan dimonitor terkait ekspansi bisnis ke luar negeri secara berkala sehingga ekspansi pasar BUMN ke luar negeri lebih massif dengan jumlah negara ekspor lebih banyak.

Sasaran Strategis 4.	:	Penguatan kapasitas BUMN
-----------------------------	---	--------------------------

Indikator kinerja, target dan realisasi atas capaian sasaran adanya rumusan kebijakan BUMN tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		% Pencapaian
		Target	Realisasi	
Penyelesaian Program Restrukturisasi (Pembentukan Holding) Klaster BUMN	BUMN	3	2	66,7%
Penyelesaian Target IPO/Tambahan Nilai Penawaran	BUMN	6	4	66,7%

a. Penyelesaian Program Restrukturisasi (Pembentukan Holding) Klaster BUMN

Realisasi 2021	Realisasi 2022
a. Holding Ultra Mikro b. Holding Pariwisata dan Pendukung c. Holding Hotel d. Merger Pelindo	a. Penyelesaian Inklusi ITDC dalam holding Pariwisata b. Restrukturisasi Polis PT Jiwasraya

Sebagai implementasi transformasi BUMN, pada tahun 2022, ditargetkan pembentukan dua holding, yaitu Holding Pariwisata dan Holding Danareksa Tahap II dan satu program Restrukturisasi Polis PT Jiwasraya. Dari target tersebut, hanya Holding Danareksa Tahap II yang tidak berhasil dilaksanakan. Ketidaktercapaian Holding Danareksa Tahap II karena masih dalam proses penyusunan kajian pemerseroan dan kordinasi dengan *stakeholder* terkait (Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, dan LKPP). Untuk selanjutnya penyelesaian program restrukturisasi (pembentukan holding) klaster BUMN Wakil Menteri II akan dimonitor perencanaan dan pelaksanaannya secara berkala sehingga perencanaan dan pelaksanaan bisa sesuai dengan targetnya.

b. Penyelesaian target IPO/tambahan nilai penawaran BUMN

Sebagai implementasi inovasi model bisnis dan meningkatkan daya saing, penyelesaian target IPO/tambahan nilai penawaran BUMN/anak usaha BUMN di pasar modal terealisasi empat program atau 66,7% dari target yang ditetapkan. Program tersebut antara lain, *Right Issue* PT Adhi Karya (Persero) Tbk, *Right Issue* BTN, *Right Issue* BSI, dan *Right Issue* Garuda.

PT Adhi Karya (Persero) Tbk melakukan *right issue* dengan mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD). Hal ini juga didukung dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham ADHI. Total saham baru yang diterbitkan sebesar 4.846.759.603 lembar saham baru atau senilai Rp2.665.717.781.650,00. Negara telah mengambil saham baru yang menjadi hak negara melalui PMN pada PT ADHI sebanyak 3.592.727.168 lembar saham baru atau senilai Rp1.975.999.942.400,00 sehingga kepemilikan saham negara dalam PT ADHI menjadi 64,332%. Saham bagian publik telah ditawarkan kepada publik dan dibayar secara tunai oleh publik kepada PT ADHI sebanyak 1.254.032.435 lembar saham baru atau senilai Rp689.717.839.250,00 melalui mekanisme yang berlaku di pasar modal, sehingga kepemilikan saham publik pada PT ADHI menjadi 35,668%. Pemegang sepuluh juta saham lama Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal terakhir pencatatan (*recording date*) 26 Oktober 2022 berhak atas 19.783.232 (sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh dua) HMETD dengan harga pelaksanaan Rp550/saham. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran tersebut digunakan untuk

penyertaan modal melalui Badan Usaha Pelaksana untuk membiayai pembangunan proyek-proyek yang dikerjakan oleh Perusahaan.

Realisasi *Right Issue* yang dilakukan PT Bank Tabungan Negara Tbk/ "BTN" dilakukan dengan skema hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) dengan menerbitkan saham baru 3,4 miliar lembar dengan harga Rp1.200 per lembar. Pemerintah telah mengambil saham baru sesuai HMETD yang dimiliki melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Bank BTN sebanyak 2,6 miliar lembar saham atau senilai Rp2,479 Triliun sehingga porsi kepemilikan pemerintah tetap 60%. Saham porsi publik selama masa perdagangan menarik minat investor sehingga sukses oversubscribe sebanyak 1,45 kali dengan menerbitkan 1,3 miliar lembar saham atau senilai Rp1,653 Triliun.

Selanjutnya, *Right Issue* yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Indonesia (BSI) menawarkan 4.999 juta lembar saham, dengan total funds yang diterima mencapai Rp5,3 Triliun dan oversubscribe 1,06 kali dari target proceed. *Right issue* BSI bertujuan untuk penguatan permodalan dalam mendukung pertumbuhan ekspansi bisnis perusahaan untuk mewujudkan aspirasi Pemerintah menjadikan BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia yang memiliki daya saing secara global.

Right issue yang keempat, yaitu perihal *right issue* PT Garuda. *Right Issue* PT Garuda berlaku efektif pada 2 Desember 2022 dengan skema hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) dengan jumlah saham yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 63.210.504.593 dengan nilai nominal saham baru yakni Rp196 per lembar saham. Dana hasil *right issue* direncanakan akan digunakan untuk mendukung penggunaan PMN untuk maintenance dan restorasi pesawat, maintenance reserve, bahan bakar pesawat, dan rental pesawat.

Sasaran Strategis 5.	:	Meningkatnya daya saing BUMN
-----------------------------	---	------------------------------

Indikator kinerja, target dan realisasi atas capaian sasaran adanya rumusan kebijakan BUMN tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		% Pencapaian
		Target	Realisasi	

Implementasi Program Digitalisasi oleh BUMN	BUMN	4	4	100,0%
Implementasi Model Bisnis yang terintegrasi oleh BUMN	BUMN	6	5	83,3%

a. Implementasi program digitalisasi oleh BUMN

Capaian program digitalisasi oleh BUMN pada tahun 2022 terealisasi sebanyak 4 program atau tercapai 100% dari target. Program digitalisasi yang terselesaikan tersebut antara lain program percepatan proyek pembangunan LRT Jabodebek (Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi), Implementasi ERP (Enterprise Resource Planning) pada BUMN Sektor Infrastruktur, Otentifikasi Digital, dan Pengembangan Ekosistem Digital Mortgage BTN.

b. Implementasi model bisnis yang terintegrasi oleh BUMN

Capaian indikator implementasi model bisnis yang terintegrasi oleh BUMN tahun 2022 terealisasi sebanyak 5 model bisnis dari target 6 model bisnis yang terintegrasi atau tercapai 83,3% dari target. Model bisnis terintegrasi yang telah selesai diimplementasikan antara lain integrasi bisnis PT Pos Indonesia (Persero), Integrasi BUMN Semen, Integrasi Infrastruktur IT pada BUMN Kluster Pariwisata, Reinsurance Program for Farming Sector dan Sinkronisasi Infrastruktur dan Layanan Pendukung Jasa Perbankan. Sedangkan untuk, model bisnis terintegrasi Perum Damri dan PPD tidak berhasil terlaksana pada tahun 2022, namun integrasi bisnis kedua BUMN tersebut telah masuk ke dalam prioritas untuk segera diselesaikan pada Triwulan I Tahun 2023.

Sasaran Strategis 6.	:	Menciptakan SDM yang unggul dan profesional
-----------------------------	---	---

Indikator kinerja, target dan realisasi atas capaian sasaran adanya rumusan kebijakan BUMN tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022
-------------------	--------	------------

		Target	Realisasi	% Pencapaian
% Milenial (≤ 42 tahun) dalam Nominated Talent	%	11%	19%	120,0%
% Perempuan dalam Nominated Talent	%	12%	18%	120,0%

a. % Milenial (<42 tahun) dalam Top Talent

Realisasi 2021	Realisasi 2022	Growth
19%	19%	0%

Ketersediaan SDM usia milenial (<42 tahun) atau dalam usia produktif menjadi peluang bagi Kementerian BUMN dalam menjaring dan mengembangkan talenta untuk membangun Indonesia melalui kontribusinya di BUMN. Peluang ini tidak boleh disia-siakan demi tercapainya tujuan BUMN sebagai pencipta lapangan kerja dan penyedia talenta-talenta terbaik untuk Indonesia. Capaian indikator persentase milenial (<42 tahun) dalam top talent pada tahun 2022 tercapai sebesar 19% atau maksimal 120% dari target sebesar 11%. Adapun BUMN sektor pariwisata menjadi penyumbang kontribusi terbesar dalam realisasi IKU ini, dengan %milenial (<42 tahun) sebesar 30%.

b. % Perempuan dalam Nominated Talent

Realisasi 2021	Realisasi 2022	Growth
16%	18%	12,5%

Dengan memanfaatkan potensi besar yang dimiliki oleh perempuan dalam dunia bisnis, perusahaan dapat menjadi lebih kuat, lebih berkelanjutan, dan lebih menarik bagi investor. Nantinya, perempuan dengan potensi tersebut akan membantu tercapainya pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Capaian indikator persentase perempuan dalam *nominated talent* pada tahun 2022 tercapai sebesar 18% atau 120% dari target sebesar 12% dan mengalami peningkatan 12,5% dari tahun 2021.

C. Pemanfaatan Anggaran

Total pagu anggaran tahun 2022 yang berada dalam koordinasi Wakil Menteri BUMN II sebesar Rp4.830.280.000,00 yang terdiri dari enam Keasdepan. Dari pagu tersebut, realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2022 adalah sebesar Rp4.818.516.493,00 atau 99,76% dari total pagu anggaran. Berikut tabel pencapaian realisasi dari pagu anggaran pada setiap Keasdepan.

No	Asisten Deputi	Anggaran	Realisasi 2022	Pencapaian
1	Asdep Bidang Jasa Keuangan	Rp 769.219.000	Rp 764.063.422	99,33%
2	Asdep Bidang Jasa Infrastruktur	Rp 812.146.000	Rp 811.975.781	99,98%
3	Asdep Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun	Rp 773.417.000	Rp 772.053.914	99,82%
4	Asdep Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung	Rp 861.196.000	Rp 857.785.308	99,60%
5	Asdep Bidang Jasa Logistik	Rp 850.375.000	Rp 848.977.829	99,84%
6	Asdep Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media	Rp 763.927.000	Rp 763.660.239	99,97%
Total		Rp 4.830.280.000	Rp 4.818.516.493	99,76%

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Wakil Menteri BUMN II selalu berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pada tahun 2022, Wakil Menteri BUMN II dinilai cukup efektif dan efisien dalam menggunakan sumber daya. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian Nilai Kinerja Organisasi sebesar 103,60 (Kriteria: Sangat Memuaskan), sedangkan anggaran yang digunakan terealisasi sebesar 99,76%. Dalam upaya meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran Wakil Menteri BUMN II telah melaksanakan beberapa hal antara lain selektif dalam melaksanakan kegiatan konsinyering dan perjalanan dinas dan mencari alternatif harga terbaik, melakukan rapat-rapat secara virtual sehingga mampu meminimalkan pengeluaran biaya, mengurangi penggunaan kertas dan dokumen tercetak sehingga mampu mengurangi biaya operasional perkantoran. Selain itu, penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Wakil Menteri BUMN II juga diperuntukkan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, memastikan efektivitas koordinasi dan mengoptimalkan realisasi kinerja BUMN.

BAB IV

PROGRAM STRATEGIS

A. Terbentuknya Holding Danareksa Tahap I dan Rencana Holding Danareksa Tahap II

Selaras dengan Visi, Misi, dan Arah Presiden Republik Indonesia dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024, Kementerian BUMN sebagai pembina dan pengawas BUMN telah menyusun Rencana Strategis untuk periode 2020- 2024. Rencana ini disusun untuk memastikan bahwa BUMN dapat memaksimalkan peranannya dan kontribusinya kepada negara. Dalam rencana strategis tersebut, telah ditetapkan 5 Prioritas Strategis BUMN sebagai berikut:

1. Nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia, yaitu meningkatkan nilai ekonomi dan dampak sosial terutama di bidang ketahanan pangan, energi, dan kesehatan;
2. Inovasi model bisnis, yaitu restrukturisasi model bisnis melalui pembangunan ekosistem, kerjasama, pertimbangan kebutuhan stakeholders dan fokus pada core business;
3. Kepemimpinan teknologi, yaitu memimpin secara global dalam teknologi strategis dan melembagakan kapabilitas digital seperti data management, advanced analytics, big data, artificial intelligence, dan lain-lain;
4. Peningkatan investasi, yaitu mengoptimalkan nilai aset dan menciptakan ekosistem investasi yang sehat;
5. Pengembangan talenta, yaitu mengedukasi dan melatih tenaga kerja, mengembangkan SDM berkualitas untuk Indonesia, profesionalisasi tata kelola dan sistem seleksi SDM.

Lima Prioritas BUMN

Lima Prioritas BUMN



Berdasarkan Rencana Strategis dan Roadmap BUMN yang telah disusun, Kementerian BUMN telah menetapkan transformasi pengelolaan BUMN melalui konsolidasi dan simplifikasi jumlah BUMN menjadi 12 klaster industri, sehingga dapat melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMN dengan lebih optimal. Transformasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan nilai tambah bagi Negara.

Sehubungan dengan rencana transformasi BUMN tersebut, telah teridentifikasi bahwa masih terdapat BUMN-BUMN dalam jumlah substansial yang:

- memiliki skala bisnis yang relatif kecil untuk membentuk klaster tersendiri ("BUMN / Badan Usaha Scale Up");
- mengalami kesulitan operasional maupun keuangan (*distressed*); dan/atau
- memiliki *nature of business* yang tidak dapat digabungkan dengan klaster industri utama.

Dengan demikian, perlu pembinaan secara profesional dan fokus terhadap BUMN/Badan Usaha tersebut sehingga dapat melakukan *business turn-around* dan meningkatkan skala bisnisnya. Oleh karena itu, penciptaan nilai (*value creation*) yang dapat dibentuk bukan hanya melalui penciptaan sinergi, namun juga transformasi bisnis.

Sehubungan dengan transformasi bisnis tersebut, Danareksa ditunjuk sebagai induk dari holding untuk BUMN yang belum diklasterisasi (kawasan industri, konstruksi, dan jasa keuangan) serta pengelolaan BUMN yang mengalami financial distressed (melalui PT PPA, selaku anggota holding

Danareksa). Oleh karena itu, Holding Danareksa memiliki potensi besar untuk mewujudkan perusahaan yang sehat dan memiliki skala usaha signifikan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

(Mekanisme Estafet Handling)



Sumber: Bahan Ratas tentang Danareksa/PPA (Dokumen Danareksa/PPA)

(Peran Danareksa dan PPA dalam Holding)

Gambar I- 7 Peran Danareksa dan PPA dalam Holding



Sumber: Bahan Ratas tentang Danareksa/PPA (Dokumen Danareksa/PPA)

Holding Danareksa direncanakan akan dibentuk melalui dua tahap, dimana Tahap I telah terbentuk berdasarkan PP No.7 Tahun 2022. Berdasarkan PP tersebut, terdapat 10 perusahaan BUMN yang bergerak di industri yang berbeda yaitu Jasa Keuangan, Konstruksi, dan Kawasan Industri. Perusahaan yang tergabung dalam Holding Danareksa Tahap I antara lain adalah PT Perusahaan Pengelola Aset, PT Kawasan Industri Medan, PT Kawasan Industri Wijayakusuma, PT Kawasan Industri Makassar, PT Kawasan Berikat Nusantara, PT Surabaya Industrial Estate Rungkut, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung, PT Nindya Karya, PT Balai Pustaka, dan PT Kliring Berjangka Indonesia.

Holding Danareksa Tahap I, diresmikan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir pada tanggal 20 Juli 2022. Holding Danareksa akan menjadi pionir Holding BUMN Transformasi pertama di Indonesia yang berpijak pada tiga pilar tujuan yakni transformasi berkelanjutan melalui peningkatan skala entitas, penciptaan nilai melalui inovasi model bisnis, sinergi operational excellence dan cost leadership, serta memperkuat kapabilitas maupun kapasitas SDM untuk bersaing pada skala global.

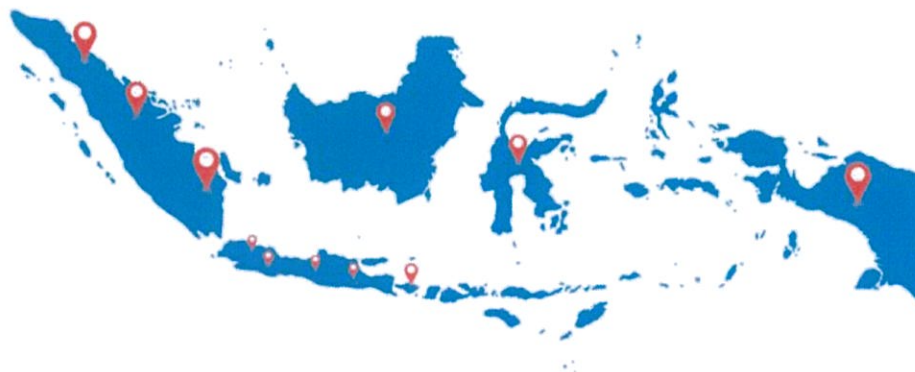
Sesuai dengan roadmap Kementerian BUMN, direncanakan untuk pembentukan Holding Danareksa Tahap II yang beranggotakan:

- BUMN konsultan karya: Indra Karya, Yodya Karya, dan Virama Karya.
- BUMN pengelola SDA: Perum Jasa Tirta I dan Perum Jasa Tirta II.
- BUMN industri perfilman: Perum PFN.

Namun, pembentukan Holding Danareksa Tahap II sampai dengan akhir tahun 2022 belum dapat terlaksana karena masih dalam proses penyusunan kajian pemerseroan dan kordinasi dengan stakeholder terkait (Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR dan LKPP).

B. Implementasi 5G

Pembangunan Tower BTS 5G yang dilakukan Telkom merupakan strategi untuk meningkatkan kenyamanan pengguna dalam hal ini *user* dan meningkatkan *value added* bagi produk Telkom. Pembangunan Tower BTS juga selaras dengan prioritas Kementerian BUMN ke-3 yaitu Kepemimpinan Teknologi. Pelaksanaan pembangunan Tower BTS selama tahun 2022 ditargetkan akan terpasang di 11 Kota, namun sampai dengan akhir tahun, Telkom telah berhasil menggelar jaringan 5G di 47 kota atau sekitar 308 sites di seluruh Indonesia, dengan sebaran sebagai berikut:



Keterangan :

No	Regional	Jumlah Kota	Jumlah Sites
1	Sumatera Utara	5	13
2	Sumatera Tengah	3	18
3	Sumatera Selatan	1	5
4	Jabodetabek	11	153
5	Jawa Barat	5	20
6	Jawa Tengah	6	13
7	Jawa Timur	1	18
8	Kalimantan	5	7
9	Sulawesi	2	15
10	Bali dan Nusa Tenggara	7	42
11	Papua	1	4
Total		47	308

Selain itu, untuk mendukung dan menjamin *experience* dan kepuasan pelanggan di beberapa international event, Telkom memprioritaskan dan menggelar pembangunan jaringan 5G di international event bergengsi, antar lain:

1. Super Priority Destination (17 sites) antara lain di Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika.
2. KTT G20 Tahun 2022 (70 sites) antara lain di Jabodetabek, Bali & Nusa Tenggara, dan lokasi lain.
3. MotoGP Mandalika Tahun 2022 (9 sites) di Mandalika.

Untuk selanjutnya, Telkom terus berupaya untuk membangun tower BTS 5G di seluruh Indonesia dengan target pembangunan tower di 500 sites yang tersebar di seluruh Indonesia pada Tahun 2023.

C. Transformasi PFN

Perum Produksi Film Negara / "PFN" merupakan BUMN pionir yang dibentuk Pemerintah sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 1988 untuk mendukung pengadaan film yang bermutu dan bernilai Pendidikan serta berpijak pada kebudayaan nasional. PFN berperan dalam memproduksi berbagai film cerita &

dokumenter peristiwa bersejarah, serta menjadi salah satu alat komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Namun seiring dengan perkembangan zaman, terdapat banyak hal yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga potensi pasar dari industri kreatif khususnya industri film belum dapat diserap dengan maksimal.

Oleh sebab itu, perlu dilakukan optimalisasi peran Perum PFN dalam sektor industri film nasional dengan penyesuaian baik dari aspek strategi maupun aspek hukum. Salah satu langkah strategis yang akan ditempuh oleh PFN adalah rencana perubahan bentuk badan hukum PFN dari Perum menjadi Persero, sehingga PFN bisa lebih *agile* dan *adaptive* dalam berkontribusi dalam sektor perfilman. Perubahan bentuk badan Hukum Perum PFN menjadi pemerseroan sesuai dengan arahan Menteri BUMN, Erick Thohir yang meminta PFN fokus pada aspek Production House Aggregator, Content Curator, dan Distribution Channel Syndication.

Pemerseroan PFN merupakan hal penting dalam rangka memperkuat ekosistem film Indonesia melalui film financing dan film aggregator. Diharapkan dengan adanya perubahan bentuk badan hukum, akan meningkatkan kapasitas perusahaan dengan penguatan bargaining power dalam mencari sumber pendanaan. Sampai dengan tahun 2022, Transformasi Perubahan bentuk badan hukum PFN telah sampai pada tahap Penyampaian Konsep Kajian Bersama yang telah disampaikan Asdep JTM melalui Surat Nomor S-159/Wk2.MBU.C/12/2022 tanggal 22 Desember 2022 kepada Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, DJKN Kementerian Keuangan. Berikut merupakan Progress Pemerseroan Perum Produksi Film Negara yang telah dilakukan Keasdepan Jasa Telekomunikasi dan Media dalam mentransformasikan PFN:



Setelah Pemerseroan PFN selesai akan dilanjutkan dengan proses inbreg PFN ke dalam holding Danareksa. Masuknya PFN menjadi bagian dari Holding Danareksa merupakan strategi yang dilakukan untuk akselerasi dan scale up PFN dalam menjalankan peran sentral dalam ekosistem perfilman Indonesia.

D. Pelaksanaan pengembangan KEK Kesehatan Sanur

KEK Sanur merupakan kawasan Kesehatan pertama di Indonesia sekaligus menjadi KEK Pariwisata yang berorientasi kepada nuansa alam dan memaparkan keindahan Pantai yang terdapat di Sanur, Pulau Bali. Pada tahun 2019, diperkirakan terdapat 2 juta wisatawan medis Indonesia (ditambah ~1 juta wisatawan yang tidak dilaporkan) melakukan perjalanan ke luar negeri untuk pemeriksaan kesehatan, estetika, dan pemeriksaan lanjutan dengan total potensi kehilangan nilai sekitar USD6 miliar secara agregat dalam 4-5 tahun terakhir. Singapura dan Malaysia merupakan destinasi paling populer bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan layanan kesehatan yang mencakup 74% permintaan Indonesia. Saat ini Indonesia memiliki rencana untuk menjadi tujuan *medical tourism*. Dengan rencana ini, sistem, infrastruktur dan tenaga kesehatan yang memadai juga harus disiapkan.

Wilayah Sanur telah memiliki kesiapan untuk dikembangkan sebagai kawasan ekonomi khusus dan terintegrasi dengan infrastruktur pendukung kawasan dalam pengembangan kesehatan dan pariwisata berstandar pelayanan internasional yang diharapkan dapat meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia, sehingga dapat menjadi rujukan masyarakat baik domestik maupun internasional dalam mendapatkan layanan kesehatan yang

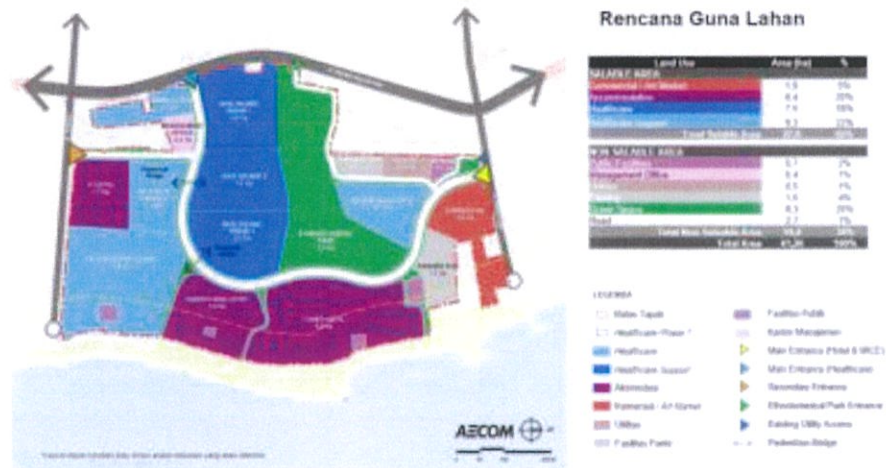
terintegrasi. Berdasarkan potensi dan keunggulan yang ada, PT Hotel Indonesia Natour mengusulkan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Sanur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus. Lokasi yang diusulkan untuk Kawasan Ekonomi Khusus Sanur telah memenuhi kriteria lokasi kawasan ekonomi khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

Pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Sanur oleh PT Hotel Indonesia Natour kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan telah memperoleh persetujuan tertulis dari Gubernur Bali dan Wali Kota Denpasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus setelah melakukan pengkajian menyetujui usulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Sanur dan mengajukan rekomendasi penetapannya kepada Presiden.

Profil Usulan KEK Sanur adalah sebagai berikut:

Lokasi	Kota Denpasar, Provinsi Bali
Luas Lahan	41,26 Ha
Kegiatan	Kesehatan dan Pariwisata • Fasilitas Kesehatan (rumah sakit, klinik) • Akomodasi hotel dan MICE • <i>Ethnomedicinal Botanic Garden</i> • <i>Commercial center</i>
Nilai Investasi	Total Investasi: Rp10,2 triliun • Investasi Pelaku Usaha: Rp 6,2 triliun • Investasi Kawasan: Rp 292,5 miliar • Investasi lahan Rp 3,7 triliun
Penyerapan Tenaga Kerja	Penyerapan Tenaga Kerja: 43.647 orang • 18.375 orang (langsung)

- 25.272 orang (tidak langsung)



KEK Sanur akan menghadirkan fasilitas kesehatan bertaraf internasional di lokasi Lot H1 dan H2 dengan 6 CoE. Kemudian tahap selanjutnya, tenant-tenant healthcare akan melengkapi KEK ini dengan pelayanan yang beragam, baik dari segi medical maupun wellness.

Pada tahun 2022, telah dilakukan beberapa tahapan untuk mewujudkan KEK Sanur diantaranya adalah :

1. Penerbitan Persetujuan Lingkungan Kawasan dari KLHK.
2. Sudah diterbitkan rekomendasi oleh Denas KEK.
3. KEK Sanur ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2022 untuk menjadi KEK Kesehatan dan KEK Pariwisata.
4. Sudah selesai dibangun infrastruktur dasar di KEK Sanur hingga 98%.

E. Pengembangan Tanamori Labuan Bajo

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/ Indonesia Tourism Development (ITDC) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pariwisata yang mana dalam pelaksanaan kegiatan usahanya mengelola kawasan pariwisata yang terdiri dari akomodasi dan fasilitas pendukungnya. ITDC juga ikut berpartisipasi dalam pengembangan Destinasi Pariwisata TanaMori. Saat ini, ITDC sedang dalam masa perencanaan dan pengembangan infrastruktur dasar dan fasilitas penunjang serta aset produktif di TanaMori, termasuk infrastruktur, MICE, hotel, lahan 20 hektar, lahan untuk kebutuhan infrastruktur, dan *Contingencies*.

Pembangunan infrastruktur dasar dan utilitas TanaMori bertujuan untuk membuka akses jalan dari luar kawasan TanaMori menuju area pengembangan TanaMori sebagai tempat penyelenggaraan event KTT G20 dan ASEAN Summit. Berikut gambar lokasi pembangunan infrastruktur dan MICE TanaMori.



Pengerjaan fisik TanaMori secara keseluruhan telah mencapai 90%, dengan rincian sebagai berikut :

ITEM NO.	URAIAN	BOBOT (%)	PROGRES S.D MINGGU LALU (%)	PROGRES MINGGU INI (%)	PROGRES S.D MINGGU INI (%)	SISA PEKERJAAN (%)
1	UMUM	7,6787	6,5052	-	6,5052	1,1735
2	PERENCANAAN	2,9020	2,8919	-	2,8919	0,0101
3	PEKERJAAN INFRASTRUKTUR JALAN	40,7136	39,5945	0,4410	40,0355	0,6780
4	JARINGAN LISTRIK DAN FASILITAS PENDUKUNG	1,2525	1,0617	0,0064	1,0680	0,1845
5	JARINGAN PLUMBING DAN FASILITAS PENDUKUNG	0,7086	0,5959	0,0852	0,6811	0,0275
6	GROUND WATER TANK	2,1865	2,0085	0,0814	2,0899	0,0965
7	TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH SEMENTARA	-	-	-	-	-
8	JARINGAN CCTV	0,2382	0,0654	0,0026	0,0680	0,1702
9	LANDSCAPE	0,5298	0,2484	0,0711	0,3195	0,2103
10	SITE DEVELOPMENT	3,2696	2,8251	0,0002	2,8253	0,4443
11	MICE & OBSERVATION DECK	36,6523	33,1443	0,4255	33,5698	3,0825
12	BEACH CLUB	3,8681	-	-	-	3,8681
	TOTAL	100,00	88,9409	1,1134	90,0543	9,9457

Progress pengerjaan convention hall



F. Implementasi pengembangan Taman Mini oleh PT TWC BPRB

PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko melakukan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah melalui anak usaha yang telah ditunjuk yaitu PT Bhumi Visatanda. Berdasarkan Peraturan Presiden No 19 Tahun 2021, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (Persero) ditunjuk sebagai pengelola TMII dengan sistem KSP untuk jangka waktu 25 tahun, dan mulai dikelola pada 1 Juli 2021. Selanjutnya dilakukan pula revitalisasi TMII secara komprehensif mulai dari lanskap, anjungan, dan museum yang terletak di kompleks TMII oleh Kementerian PUPR dan TMII pun berubah menjadi Indonesia Opera pada tahun 2022. TMII juga mengusung tema baru yaitu *Inclusive, Green, Smart, and Cultural*.



Konsep baru ini sejalan dengan perkembangan teknologi dan tren pasar. TMII turun berkembang dengan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memberikan pengalaman yang baik bagi pengunjung dengan melakukan digitalisasi pada sistem operasi mereka, mulai dari pemesanan tiket yang mudah, hingga akses informasi yang lebih mutakhir dengan menjangkau pengunjung lebih dekat melalui kanal media sosial. Tema "hijau" yang berkaitan dengan ramah lingkungan juga turut menjadi tema baru TMII, aksesibilitas dari dan menuju anjungan, wahana, maupun museum, dapat ditempuh dengan berjalan kaki, karena TMII kini telah melakukan perubahan lanskap yang lebih nyaman dengan jalur pejalan kaki yang lebih mumpuni, dibarengi dengan fasilitas pendukung yang lebih layak. Selain dengan berjalan kaki, pengunjung juga dapat menggunakan kendaraan listrik ramah lingkungan yang tersedia secara gratis. Serta tidak lupa, nilai *culture* dengan melakukan revitalisasi pada setiap anjungan daerah, agar terlihat lebih menarik.

TMII juga memaksimalkan media sosial untuk meningkatkan *brand awareness* dari masyarakat. Dengan memahami kebiasaan masyarakat dalam menggunakan media sosial, TMII menggunakan keterikatan atau *engagement*

sebagai kunci terhadap *value proposition* yang mereka tawarkan dengan memori masa lalu masyarakat terhadap TMII. Sehingga TMII memulai langkah peningkatan *awareness* dengan membuat unggahan yang bersifat *teaser*, yang dinilai berhasil menimbulkan *curiosity* masyarakat, sehingga mereka mulai mencari informasi dan membagikannya pada lingkaran terdekat mereka, yang membuat terciptanya *viral marketing*. Kesuksesan TMII di dunia maya dengan membuat ikatan dengan masyarakat ini tercermin dari jumlah pengikut mereka di sosial media Instagram (@tmiofficial) yang telah mencapai 124 juta dengan *engagement rate* 1,24%, dengan banyaknya komentar antusias dan membuat banyak masyarakat yang penasaran hingga ingin datang berkunjung.

Secara kinerja, jumlah pengunjung dari TMII hingga akhir 2022 mencapai 884.732 pengunjung. Dengan catatan, saat ini TMII beroperasi dalam status uji coba terbatas, yang berarti TMII belum beroperasi secara penuh, mengingat proses revitalisasi beberapa anjungan, wahana, fasilitas, dan museum masih terus dilakukan. Angka capaian jumlah pengunjung ini, mencerminkan jumlah kunjungan sejak TMII dioperasikan secara terbatas dalam masa uji coba, yaitu mulai dari 20 November hingga 31 Desember 2022.

G. Penyelesaian event internasional untuk percepatan pemulihan ekonomi pariwisata

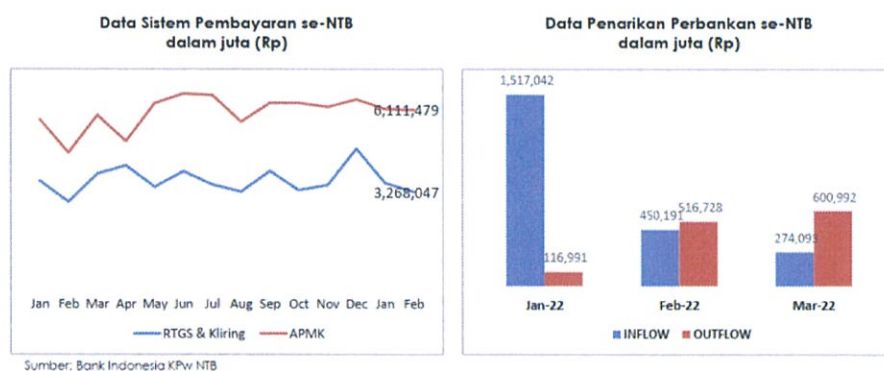
Penyelenggaraan event internasional merupakan salah satu *milestone* yang diselenggarakan oleh berbagai *stakeholder* di Indonesia termasuk Kementerian BUMN dalam hal ini Asdep Jasa Pariwisata dan Pendukung dan bekerja sama dengan perusahaan BUMN. Terdapat empat event internasional yang diselenggarakan pada tahun 2022 yang berkontribusi positif terhadap percepatan pemulihan ekonomi pariwisata pasca pandemi. Dua event diantaranya merupakan event balap motor yaitu MotoGP dan World Superbike 2022 yang diselenggarakan di Sirkuit Mandalika yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Event MotoGP 2022 sendiri merupakan yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia sedangkan untuk WSBK 2022 kedua kalinya setelah sukses digelar pada tahun 2021. Dua event lainnya adalah event Vespa World Days yang diadakan di Bali dan Prambanan Jazz yang diadakan di Komplek Candi Prambanan, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk MotoGP dan WSBK, evaluasi peningkatan atau penurunan kinerja penyelenggaraan didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Litbang Kompas yang telah menyampaikan Laporan Hasil Penelitian Analisis Dampak

Ekonomi MotoGP dan WSBK Mandalika. *Output* yang dihasilkan dari penelitian ini adalah kontribusi MotoGP dan WSBK terhadap beberapa sektor lain yang signifikan dan terhadap GDP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penjelasan dari masing-masing event adalah sebagai berikut:

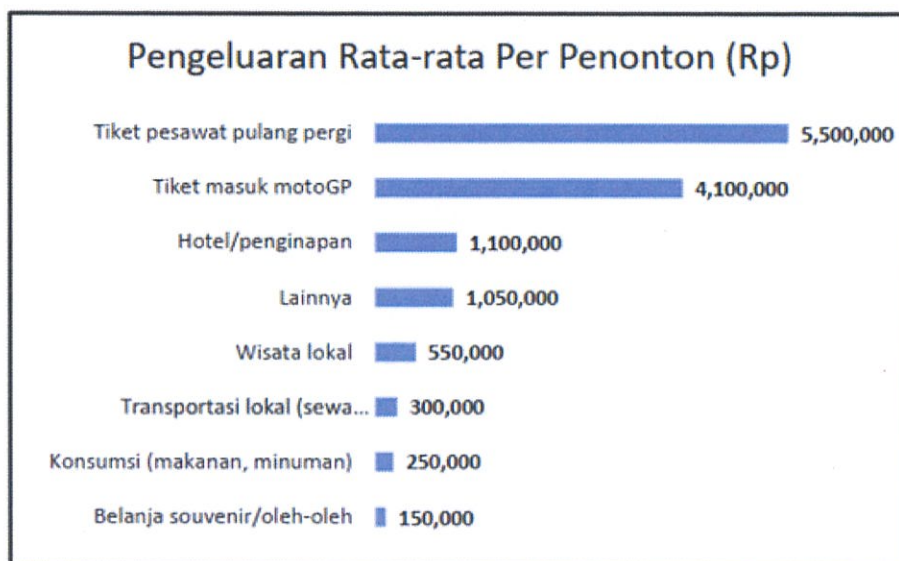
1. Event MotoGP 2022

Masyarakat Indonesia antusias menonton MotoGP Mandalika 2022, tecermin dari penjualan tiket yang melebihi target yakni 67.689 tiket. Hal ini memberikan sumbangan ke PAD Lombok Tengah dari Pajak sebesar Rp12,18 Miliar. Event MotoGP juga mampu menyerap tenaga kerja hingga sebanyak 4.600 orang. Secara amenitas, pemasukan dari 3 hari event mencapai Rp42,70 M dan berhasil memberdayakan UMKM sebanyak 800 unit dengan total omset senilai Rp36,01 Miliar. Secara aksesibilitas, pemasukan dari sewa bus dan kendaraan pribadi mencapai Rp29,17 Miliar. Secara perputaran uang, Selama 18-20 Maret 2022, dampak MotoGP terhadap perputaran uang sebesar Rp697,88 Miliar. Perputaran uang sudah terlihat dari H-1 bulan penyelenggaraan event MotoGP. Data Sistem Pembayaran yang dirilis Bank Indonesia menunjukkan, transaksi Real Time Gross Settlement (RTGS) dan Kliring tumbuh 12,09%, sementara transaksi alat pembayaran menggunakan kartu tumbuh 32,42% pada Februari 2022. Adapun net uang keluar (outflow) mencapai Rp 326,9 miliar selama 1-18 Maret 2022.



Gambar Data sistem pembayaran dan penarikan perbankan se-NTB

Secara umum, pengeluaran terbesar per penonton selama MotoGP (18-20 Maret 2022) terbesar untuk tiket pesawat, tiket masuk MotoGP, dan hotel. Pengeluaran rata-rata responden selama menonton MotoGP, 18-20 Maret 2022, sekitar Rp 13 juta per orang dengan rata-rata minimal Rp 2 juta per orang dan rata-rata maksimal Rp 14 juta per orang.



Gambar: Pengeluaran rata-rata penonton

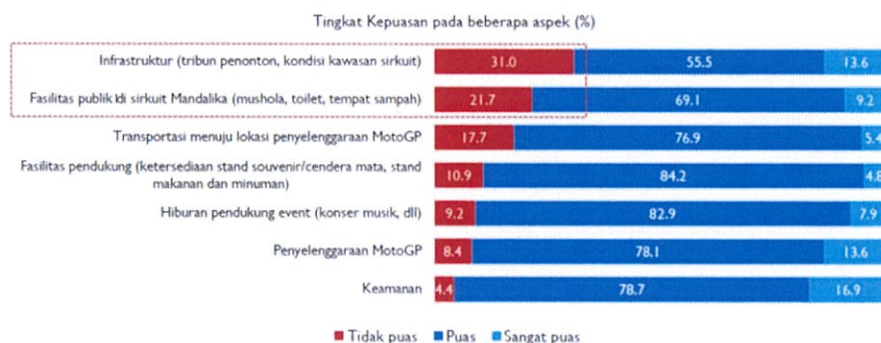
Secara dampak sekunder, Permintaan akhir terhadap barang dan jasa selama MotoGP Mandalika 2022 menghasilkan output (barang dan jasa) di seluruh sektor ekonomi NTB sebesar Rp3,57 T

Tabel Kontribusi terhadap sektor lain

Kode	Sektor	Jumlah (Rp Miliar)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	135,7
B	Pertambangan dan Penggalian	278,8
C	Industri Pengolahan	216,8
D	Pengadaan Listrik dan Gas	63,5
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,2
F	Konstruksi	1.924,60
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	279,4
H	Transportasi dan Pergudangan	147,1
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	92
J	Informasi dan Komunikasi	50,4

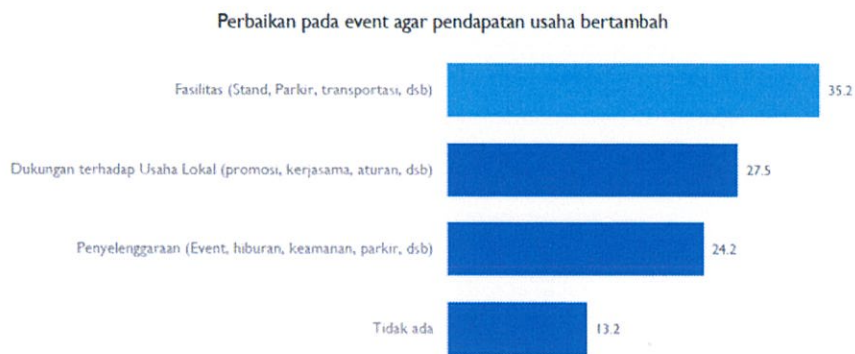
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	29,3
L	Real Estate	35,9
MN	Jasa Perusahaan	24,1
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,3
P	Jasa Pendidikan	0,8
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,5
RSTU	Jasa Lainnya	283,9
TOTAL		3.573,20

Selain itu, penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2022 berkontribusi pada pertumbuhan PDRB NTB sebesar 1,46 persen (yoy). Selain NTB, DKI Jakarta menjadi Provinsi yang memiliki dampak output tertinggi sebesar Rp300 M. Kinerja penyelenggaraan event MotoGP ini salah satunya disebabkan oleh antusiasme penonton dalam menyaksikan penyelenggaraan event secara langsung. Hal ini dapat dilihat dari tingginya kepuasan penonton yang datang sebagaimana dapat dilihat pada tingkat kepuasan pada beberapa aspek berikut.



Gambar Tingkat kepuasan penonton pada beberapa aspek

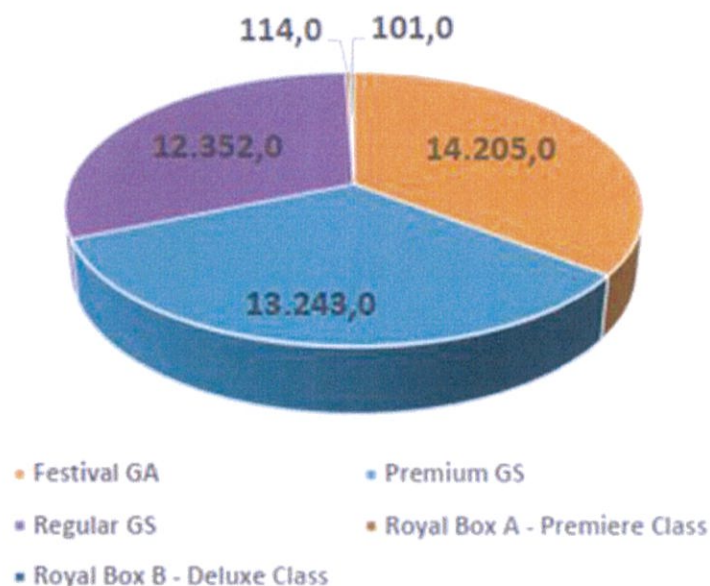
Di samping itu, diperlukan beberapa perbaikan yang masih harus dilakukan untuk penyelenggaraan event yang lebih baik pada 2023 yang dirangkum dalam gambar berikut.



Gambar Aspek yang perlu diperbaiki untuk peningkatan pendapatan usaha

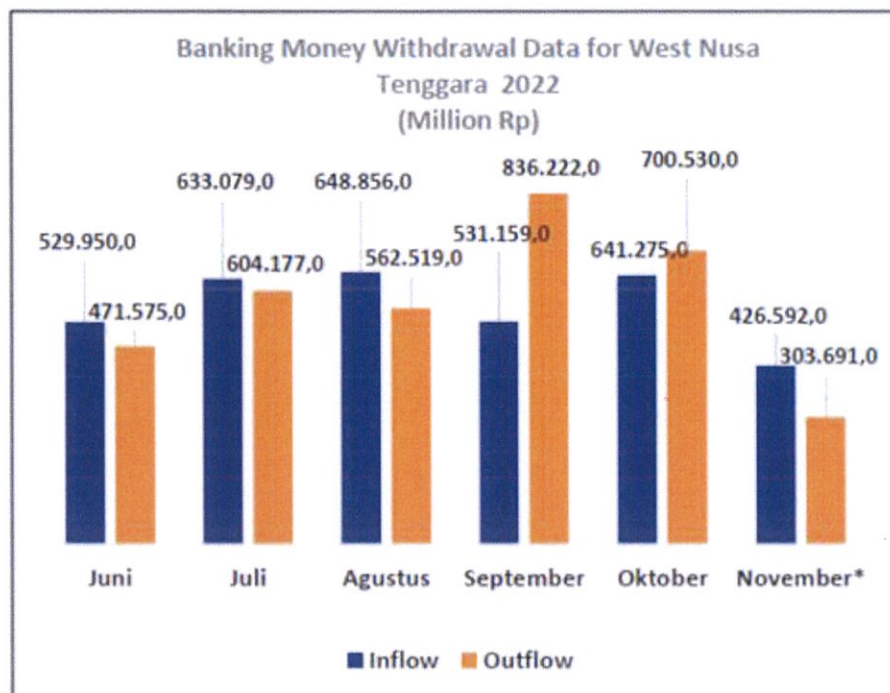
2. Event WSBK 2022

Untuk WSBK 2022, antusiasme penonton terlihat dengan jumlah tiket terjual sebanyak 40.015 tiket atau setara dengan Rp6,52 Miliar. Meskipun demikian, capaian ini lebih rendah dari event yang sama tahun 2021 sebesar Rp17,5 Miliar. Distribusi tiket dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar: Sebaran tiket WSBK 2022

Secara amenities, pemasukan dari 3 hari event mencapai Rp4,61 M dan berhasil memberdayakan UMKM sebanyak 45 unit dengan total omset senilai Rp8,8 Miliar. Secara aksesibilitas, pemasukan dari sewa bus dan kendaraan pribadi mencapai Rp11,8 Miliar. Secara perputaran uang, dampak WSBK terhadap perputaran uang sebesar Rp24,38 Miliar. Perputaran uang sudah terlihat dari H-1 bulan penyelenggaraan event WSBK.



Gambar: Perputaran uang WSBK 2022

Secara umum, pengeluaran terbesar per penonton selama WSBK (11-13 November 2022) terbesar untuk tiket pesawat, tiket masuk, dan hotel. Permintaan akhir barang dan jasa selama WSBK Mandalika 2022 menghasilkan tambahan output (barang dan jasa) di semua sektor perekonomian NTB sebesar Rp 177,59 miliar.

Tabel Kontribusi terhadap sektor lain

Kode	Sektor	Jumlah (Rp Miliar)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,86
B	Pertambangan dan Penggalian	9,19
C	Industri Pengolahan	8,02
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,18
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,09
F	Konstruksi	63,35
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	24,88
H	Transportasi dan Pergudangan	18,41

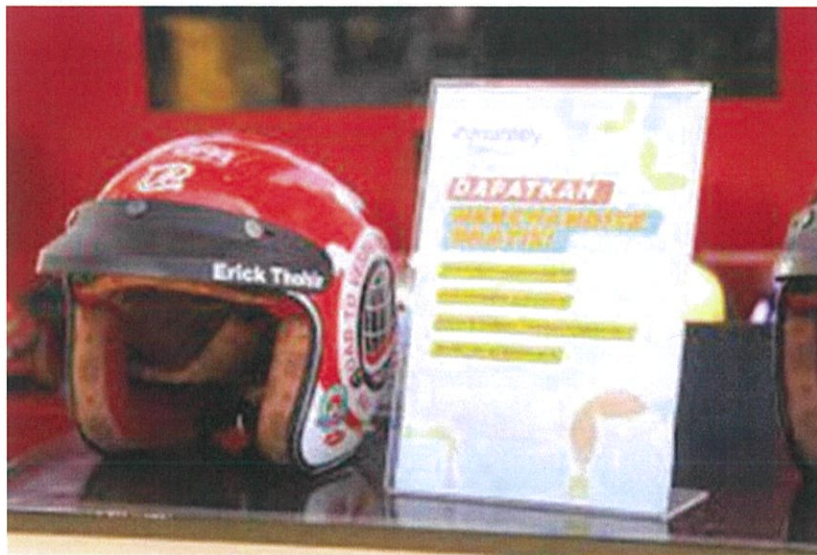
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,95
J	Informasi dan Komunikasi	4,89
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,38
L	Real Estate	2,18
MN	Jasa Perusahaan	1,69
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,59
P	Jasa Pendidikan	0,05
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,2
RSTU	Jasa Lainnya	4,61
TOTAL		177,59

3. Vespa World Days 2022

Vespa World Day merupakan event club vespa terbesar di dunia yang tahun ini berlangsung dari 9-12 Juni 2022 di Bali dan menjadi sejarah karena setelah hampir 60 tahun selalu diselenggarakan di Eropa. Adapun tahun ini untuk kali pertama Vespa World Days digelar di luar Eropa. Indonesia menjadi negara pertama di Asia yang berkesempatan menjadi tuan rumah ajang bergengsi tersebut. Event ini digelar di Pulau Peninsula, Kawasan The Nusa Dua yang merupakan salah satu wilayah yang dikelola oleh ITDC sebagai salah satu BUMN dalam klaster Jasa Pariwisata dan Pendukung.

Pulau Peninsula, sebuah pulau dengan luas 5 hektar yang terletak di ujung The Nusa Dua dan menghadap Samudera Hindia, menjadi lokasi utama pertemuan VWD. Di pulau ini akan digelar Vespa Village tempat berkumpulnya seluruh peserta VWD untuk mengikuti berbagai kegiatan seperti pameran, bazaar, dan panggung hiburan. Mendukung Pulau Peninsula sebagai lokasi utama pertemuan, beberapa area parkir di The Nusa Dua digunakan sebagai titik masuk/keluar dan pusat mobilisasi peserta VWD, selain menjadi tempat diselenggarakannya kontes dan atraksi motor Vespa. Sementara, Art Bali – ABBC Building Bali Collection Kawasan The Nusa Dua digunakan sebagai Vespa Museum yang menampilkan koleksi Vespa yang sangat langka serta memiliki sejarah yang lekat dengan Republik Indonesia.

Untuk akomodasi, dua belas hotel berbintang di The Nusa Dua digunakan dengan penyelenggara VWD sebagai official partner. Hotel-hotel tersebut adalah The Westin Resort Nusa Dua Bali, Nusa Dua Beach Hotel & Spa Bali, Courtyard by Marriott Bali Nusa Dua Resort, Melia Bali, Merusaka Nusa Dua, Grand Hyatt Bali, Bali Nusa Dua Hotel, Mercure Hotels, Grand Whiz Hotel Nusa Dua, Renaissance Bali Nusa Dua Resort, Amarterra Villas Bali Nusa Dua-M Gallery serta Bali National Golf Club Villas. Event VWD 2022 yang diselenggarakan oleh grup Piaggio dan Yayasan Piaggio ini diikuti sebanyak 8.500 pecinta Vespa dari 27 negara, dimana 500 peserta berasal dari luar negeri.



4. Prambanan Jazz 2022

Festival musik jazz internasional, Prambanan Jazz kembali dihelat tahun 2022 di Lapangan Rama Shinta, Candi Prambanan, Yogyakarta. Prambanan Jazz 2022 digelar pada 1 sampai 3 Juli 2022. PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko sebagai bagian dari BUMN Holding Pariwisata di bawah PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney merangkul berbagai stakeholder untuk ikut serta membangun ekosistem menuju pariwisata berkualitas. Melalui tagline Sewindu Merayakan Rindu, PJF 2022 mengkolaborasikan tiga generasi musik Indonesia ke dalam satu pertunjukan, diantaranya Kahitna, Kunto Aji, Diskoria, Andien dan lain sebagainya.

PJF 2022 juga sejalan dengan semangat perhelatan G20 yang salah satu fokusnya adalah pengembangan ekonomi digital. Penyelenggara mengeluarkan non-fungible token (NFT) yang bisa digunakan sebagai tiket masuk pertunjukan. PJF 2022 juga sejalan dengan semangat perhelatan G20 yang salah satu

fokusnya adalah pengembangan ekonomi digital. Penyelenggara mengeluarkan non-fungible token (NFT) yang bisa digunakan sebagai tiket masuk pertunjukan.

Setelah dua tahun berturut-turut digelar secara daring, Prambanan Jazz Festival 2022 akhirnya bisa kembali memanjakan penggemar musik jazz secara langsung. Meskipun demikian, situasi pandemi Covid-19 mengharuskan Rajawali Indonesia sebagai promotor Prambanan Jazz Festival 2022 menyesuaikan pelaksanaan dengan sejumlah kebijakan. Salah satunya, sangat membatasi jumlah penonton. Pada penyelenggaraan Prambanan Jazz Festival sebelum pandemi Covid-19, perhelatan ini bisa dihadiri 25.000 orang per hari. Namun, kali ini hanya dibatasi sekitar 2.500 orang per hari.

H. Penyelesaian restrukturisasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Sebagaimana diketahui bersama, dalam rangka restrukturisasi Garuda Indonesia menempuh jalur PKPU. Berdasarkan pemungutan suara/ voting PKPU oleh kreditur tanggal 17 Juni 2022, yang dihadiri oleh 365 kreditur dengan hak suara/ voting dan nilai klaim sebesar Rp138 triliun. Dari hasil pemungutan suara tersebut, diperoleh hasil sebanyak 347 kreditur (95,07%) dengan nilai klaim sebesar Rp122 triliun atau mewakili 12,2 juta total suara (97,46%) menyetujui usulan Perjanjian Perdamaian Garuda Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan putusan homologasi hasil voting PKPU oleh Majelis Hakim yang disahkan tanggal 27 Juni 2022, telah memutuskan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian tertanggal 17 Juni 2022 antara Garuda Indonesia dengan para krediturnya.
- b. Mewajibkan Garuda Indonesia, para krediturnya, beserta pihak yang disebutkan dalam Perjanjian Perdamaian tertanggal 17 Juni 2022 untuk tunduk serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian.
- c. Biaya-biaya imbalan jasa Tim Pengurus PKPU dan juga Konsultan/ *advisor* selama proses PKPU ditetapkan dalam Putusan PKPU dengan nomor 425/Pdr.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- d. Menyatakan PKPU nomor 425/Pdr.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. demi hukum berakhir.

Atas hasil PKPU tersebut, Garuda Indonesia melaksanakan rights issue dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu adalah sebanyak 39.788.136.675 lembar saham dengan nilai nominal per lembar

saham sebesar Rp196,00 sehingga nilai penambahan modal adalah sebesar Rp7.798.474.788.300,00.

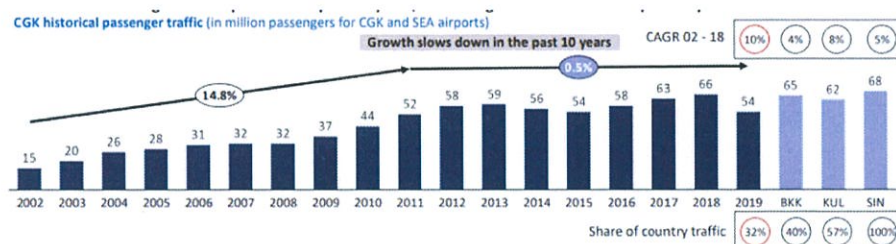
- b. Penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu adalah sebagai berikut:
 1. Penambahan modal yang bersumber dari konversi Obligasi Wajib Konversi (OWK) – IP PEN sebesar Rp1.000.000.000.000,00 dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp196,00 sehingga jumlah penambahan saham baru sebanyak 5.102.040.816 lembar saham.

Penambahan modal yang bersumber dari konversi utang kreditur sebesar Rp4.057.989.898.032,00 dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp196,00 sehingga jumlah penambahan saham baru sebanyak 20.704.030.092 lembar saham

I. Realisasi Program kemitraan strategis (*asset recycling*)

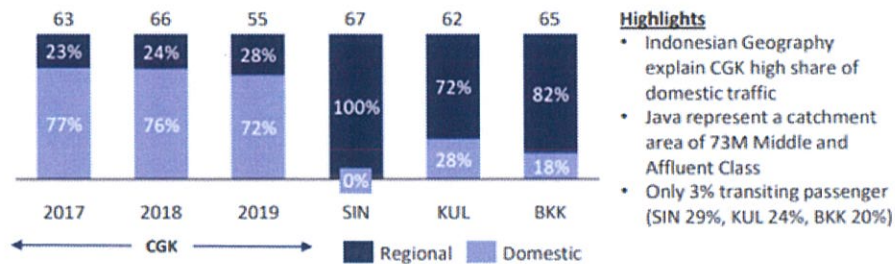
1. **Kerja Sama Kemitraan Strategis operatorship Bandara Soekarno Hatta (CGK)** PT Angkasa Pura II dan INA berencana menjalin kemitraan strategis dengan operator bandara internasional untuk bekerja sama mengoperasikan CGK. Saat ini PT Angkasa Pura II memiliki 19 Bandara dengan CGK sebagai bandara yang memiliki *revenue* tertinggi. Bandara Soekarno Hatta dibangun pada tahun 1985 dengan jumlah penumpang mencapai 65 juta penumpang per tahun. Luas terminal 1: 185,000m², terminal 2: 107,000m², dan terminal 3: 423,000m².

Tren Penumpang CGK dalam 10 tahun terakhir (pre covid) :



CGK, although among top 4 airport in South East Asia, has a large share of domestic traffic

Proportion of passengers by origin/destination (in million passengers)



Kemitraan CGK akan diimplementasikan dengan membangun JVCo dimana PT Angkasa Pura II akan mengelola terhadap JVCo. JVCo akan membayar dividends dan revenue share ke PT Angkasa Pura II. Hingga akhir tahun 2022, sudah diselesaikan kajian kerja sama kemitraan strategis operatorship Bandara Soekarno Hatta (CGK), namun mitra kerjasama pengelolaan bandara Soekarno Hatta masih dalam tahap penjangkaran.

2. Kerja Sama Kemitraan Strategis Cargo Village di Soekarno Hatta International Airport (CGK)

Kemitraan Strategis Cargo Village di Soekarno Hatta International Airport (CGK) disusun sebagai kontrak BOT (Build-Operate-Transfer) 30 tahun untuk membangun dan mengoperasikan kargo domestik dan terminal internasional.

Visi keseluruhan dari Kemitraan: Cargo Village merupakan fasilitas kargo yang akan dikembangkan oleh AP II untuk menampung peningkatan volume kargo udara di Indonesia. Tujuan dari ini Kemitraan adalah untuk mencari partisipasi ekuitas, memperluas lalu lintas kargo, dan membawa keahlian ke Cargo Village.

Scope of Work: merancang, membangun, membiayai, mengoperasikan, dan mentransfer proyek dengan skema BOT (Build-Operate-Transfer). Menunjuk Mitra untuk mengoperasikan fasilitas kargo untuk lalu lintas domestik dan internasional.

Periode konsesi: 30 tahun termasuk periode konstruksi dan transisi dari terminal kargo *existing* ke Cargo Village.

Proyek Kerja Sama Kemitraan Strategis Cargo Village di Soekarno Hatta International Airport (CGK) Cargo Village bertujuan untuk:

- Mengembangkan fasilitas terminal kargo baru untuk mengganti terminal kargo saat ini yang memiliki kendala kapasitas.

- Meningkatkan efisiensi dengan menggunakan *semi-automated* atau *fully automated*.
- *Mensupport* Bandara Soekarno-Hatta menjadi kargo hub untuk Indonesia dan region.
- Mengimplementasikan rencana pembangunan infrastruktur Indonesia dan rencana pembangunan
- Membangun state-of-the-art E-commerce Warehouse Hub servicing Indonesia dan wilayah.

Transformative Change		
	Existing Cargo Terminal	Cargo Village
Cargo Capacity (ton)	600,000	2,500,000
Cargo Movement	~ 729,000	± 2,400,000
Runway	2 Runways	3 Runways
Land Area	30 Ha	± 93 Ha
Process	Manual	Semi / Full Automatic

Hingga akhir tahun 2022, sudah diselesaikan kajian kerja sama kemitraan 7strategis Cargo Village di Soekarno Hatta International Airport (CGK), namun mitra kerjasama masih dalam tahap penjangkaran.

3. Kerja Sama Kemitraan Strategis pada Bandar Udara Internasional Kualanamu

Kerjasama Kemitraan Strategis Bandar Udara Internasional Kualanamu dilakukan dengan membentuk PT Angkasa Pura Aviati sebagai anak perusahaan yang dimiliki sahamnya secara mayoritas oleh AP II sebesar 51% (lima puluh satu persen) dan GMR Airports Consortium sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dengan besaran sudah sesuai dengan ketentuan ekuitas sebagaimana diatur dalam PM 81/2021 dan dokumen seleksi kerjasama strategis Bandar Udara Internasional Kualanamu, dengan penjelasan sebagai berikut:

Nama Badan Udara : PT Angkasa Pura Aviati (PT APA)

Jangka Waktu : 25 Tahun

Ruang Lingkup Proyek : Melakukan pelayanan jasa kebandarudaraan dan pengembangan pada Bandar Udara Internasional Kualanamu selama periode kerjasama berlangsung

Pengelolaan Bandara Kualanamu, Medan secara resmi telah diserahkan dari PT Angkasa Pura II atau AP II kepada PT Angkasa Pura Aviati (APA) pada

Kamis 7 Juli 2022. Diharapkan kemitraan strategis tersebut dapat meningkatkan kualitas pengelolaan Bandara Kualanamu menjadi lebih profesional dan meningkatkan pelayanan agar pengguna merasakan kenyamanan, keamanan, dan meningkatkan kualitas pengalaman penumpang.

J. Penyelesaian restrukturisasi/ reprofiling utang grup Holding Pariwisata

Restrukturisasi yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I memiliki beberapa hal penyebab yang menjadi urgensi pelaksanaan restrukturisasi dimana dimulai dari tahun 2018, beberapa bandara dari PT Angkasa Pura I mengalami *lack of capacity* dengan menunjukkan kapasitas bandara lebih rendah dibandingkan dengan trafik penumpang. Sehingga disusun proyek dalam pengembangan dan pembangunan bandara untuk mengatasi trafik penumpang dengan pengembangan 12 (dua belas) bandara dimana terdapat 5 bandara yang masuk ke dalam proyek strategis nasional. Ditargetkan pada tahun 2018-2020 6 bandara telah selesai pembangunan dan pengembangannya, di tahun 2021 4 bandara diselesaikan dan 2 bandara ditunda penyelesaiannya karena pandemi.

Proyek tersebut menyebabkan pengeluaran capex yang cukup tinggi untuk PT Angkasa Pura I dimana kebutuhan capexnya mencapai Rp29,29 Triliun. Adapun untuk memenuhi kebutuhan capex tersebut PT Angkasa Pura I melakukan *loan drawdown* yang cukup intensif yang menyebabkan peningkatan dari *solvability ratio* hingga melebihi batas wajar. Diluar itu kondisi pandemi Covid-19 juga mempengaruhi dimana penurunan trafik penumpang berdampak pada perolehan kinerja operasional dan pendapatan. Atas total utang yang telah dibukukan, PT Angkasa Pura I harus menanggung biaya bunga yang besar mencapai Rp1.284 Miliar.

Dalam penyusunan program restrukturisasi, PT Angkasa Pura I menandatangani perjanjian dengan para *lenders*. Dan setelah itu melanjutkan transformasi dengan penyusunan program restrukturisasi di bidang bisnis, organisasi dan keuangannya. Transformasi bisnis tersebut dilakukan dengan visi "*Connecting the world beyond Airport Operator with Indonesia Experience*" dengan 3 (tiga) pilar utama fokus transformasi yakni:

- *Business Turnaround* yang berfokus pada transformasi internal operasional dan strategi bisnis AP I untuk memaksimalkan value proposition.

- *Organization and Culture* yang berfokus untuk mengembangkan sumber daya dan budaya AP I dengan tujuan untuk memberikan layanan yang terbaik.
- *Financial Restructuring* yang berfokus untuk menjadi solusi menghadapi tekanan likuiditas akibat pandemi saat ini.



Gambar 1 : Program Restrukturisasi PT Angkasa Pura I

Pada tanggal 31 Maret 2022 telah dilakukan penandatanganan perjanjian untuk kesepakatan masa tenggang dengan rincian, sebagai berikut penandatanganan perjanjian restrukturisasi kredit PT Angkasa Pura I dengan PT Bank DKI berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal 18 Desember 2020; penandatanganan perjanjian restrukturisasi kredit PT Angkasa Pura I dengan kreditur sindikasi Bank Pembangunan Daerah (Bank DKI, BPD Bali, BPD Jatim, BPD DIY dan BPD Papua) berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 23 Desember 2019; dan, penandatanganan perjanjian masa tenggang PT Angkasa Pura I dengan PT Bank Mandiri Tbk berdasarkan Akta Nomor 21 Tanggal 26 September 2019 serta penandatanganan dengan kreditur sindikasi PT Bank Mandiri Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk berdasarkan Akta Nomor 35 tanggal 23 Desember 2019.

Selanjutnya pada tanggal 21 April 2022 telah dilakukan penandatanganan perjanjian untuk kesepakatan masa tenggang dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang dituangkan dalam perjanjian perubahan ketiga terhadap Akta Nomor 15 tanggal 18 Desember 2018.

Menutup restrukturisasi keuangannya pada tanggal 22 April 2022, PT Angkasa Pura I telah melakukan kesepakatan perubahan atas perjanjian kredit sindikasi berdasarkan Akta Nomor 12 Tanggal 18 Agustus 2016, di mana para

kreditur sindikasi setuju untuk melakukan penangguhan pembayaran sebagian bunga dan pokok hingga perjanjian definitif ditandatangani.

K. Renovasi Gedung Sarinah Thamrin

Pemerintah membentuk Holding Pariwisata dan Pendukung dengan tujuan mendorong inisiatif penguatan pariwisata sebagai salah satu upaya pemulihan dampak pandemi Covid-19. Upaya lain dalam penanganan dampak Covid-19 diantaranya pemulihan usaha koperasi dan umkm serta bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang melibatkan PT Sarinah (Persero) didalamnya. Dalam Holding Pariwisata, PT Sarinah (Persero) berperan sebagai aggregator merchandise yang akan ditempatkan di seluruh value chain holding pariwisata, serta menjadi destinasi bagi turis domestik dan mancanegara.

Untuk menjalankan perannya dalam Holding Pariwisata dan Pendukung, PT Sarinah (Persero) melakukan transformasi bisnis yang telah diselaraskan dengan visi pemegang saham. Fokus pengembangan bisnis retail Sarinah dimaksudkan untuk meningkatkan presence UMKM Indonesia baik dalam domestic ataupun global market melalui transformasi Gedung Sarinah. Konsep transformasi Gedung Sarinah Thamrin diformulasikan berdasarkan "The Purpose of Sarinah" dalam mendukung UMKM.

Konsep pengembangan gedung dimaksudkan untuk menjadikan Sarinah sebuah destinasi yang ikonik setiap lantai dengan sentuhan khusus tematik baik dari segi produk, tenant, desain, dan penggunaan bahasa nusantara serta kegiatan yang mendukung misi Sarinah. Pengembangan juga mendukung peran Sarinah sebagai trade financer yang mampu menyediakan working capital bagi UMKM dengan orientasi ekspor melalui kerjasama pihak ketiga, serta membentuk trading house bagi UMKM yang siap go-global dengan konsep mix dan match antara supply and demand.

Renovasi pengembangan Gedung Sarinah Thamrin telah mencapai tahap akhir penyelesaian, tepatnya pada tahap pengecekan terhadap AsBuilt Drawing vs IMB. Rencananya hasil pengembangan Gedung Sarinah Thamrin akan diadakan Grand Launching pada Maret 2022.



L. Pengembangan Kawasan Borobudur

Pengelolaan Candi Borobudur oleh PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (PT TWC) didasari dengan adanya Masterplan JICA tahun 1979. Di dalam Masterplan tersebut telah dikaji mengenai Pengembangan kawasan archeological park Candi Borobudur hingga 20 tahun kemudian. Pengelolaan kawasan Candi Borobudur oleh PT TWC focus pada 3 hal, yaitu perlindungan situs Candi Boobudur, Pelestarian kawasan Candi Borobudur dan visitor management. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas di Taman Wisata Candi Borobudur, PT TWC menyusun program-program untuk mengatur pengunjung dengan memberikan pengalaman kunjungan yang edukatif yang selaras dengan focus perlindungan dan pelestarian Kawasan Candi Borobudur, serta dapat menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar Borobudur dan menghidupkan kawasan Borobudur.

Program-program yang dicanangkan antara lain adalah rencana penataan lokasi area kampung seni Kujon, pembangunan plaza penerima dan concourse, pengembangan atraksi, pengembangan museum dan area digital center serta perluasan area pengembangan ke bukit Dagi. Diharapkan dengan program-program tersebut, length of stay di Borobudur akan meningkat.

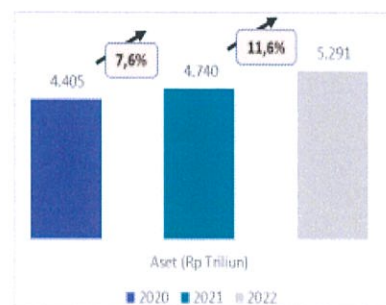


M. Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Kontribusi Himbara

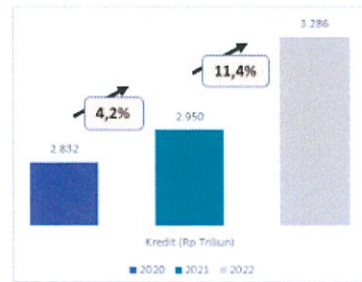
1. Kinerja Himbara Konsolidasi

a. Pertumbuhan Bisnis

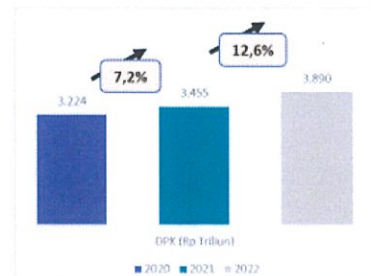
• Aset Realisasi total Aset Himbara tahun 2022 sebesar Rp5.291 triliun atau tumbuh 11,6% YoY dari posisi tahun 2021. Peningkatan Aset tersebut didorong utamanya oleh pertumbuhan kredit. Pertumbuhan Aset pada masing -masing perbankan yaitu BMRI tumbuh 15,5% YoY, BBRI tumbuh 11,2% YoY, BBNI tumbuh 6,7% YoY dan BBTN tumbuh 8,3% YoY.



- Kredit Total penyaluran Kredit Himbara sebesar Rp3.286 triliun atau tumbuh 11,4% YoY lebih tinggi dari pertumbuhan industri sebesar 11,35% YoY (2022 – OJK) dengan rasio Loan to Deposit (LDR) rata-rata sebesar 84,5%. Dengan demikian masih terdapat ruang pertumbuhan kredit yang dapat dioptimalkan dengan tetap memperhatikan mitigasi risiko dalam rangka menjaga pertumbuhan portofolio kredit yang sehat.

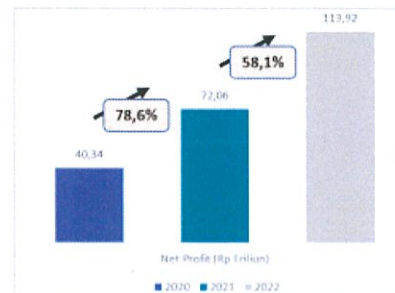


- DPK Dana pihak ketiga (DPK) Himbara sebesar Rp3.206 triliun atau tumbuh 12,6% YoY. Realisasi tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan industri sebesar 6,61% YoY (November 2022 – OJK).

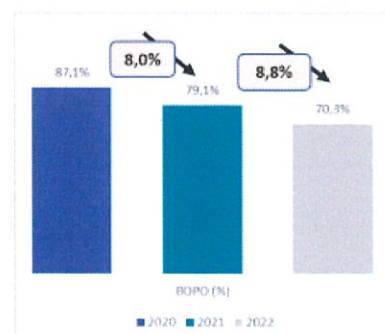


b. Profitabilitas

- Net Profit Realisasi Net Income Himbara tercatat sebesar Rp113,9 triliun atau meningkat 58,1% YoY, dengan realisasi masing-masing sebagai berikut: 1) BBRI Rp51,4 triliun atau meningkat 67,1% YoY. 2) BMRI Rp41,17 triliun atau meningkat 46,9% YoY. 3) BBNI Rp18,31 triliun atau meningkat 68,0% YoY. 4) BBTN Rp3,03 triliun atau meningkat 27,3% YoY.

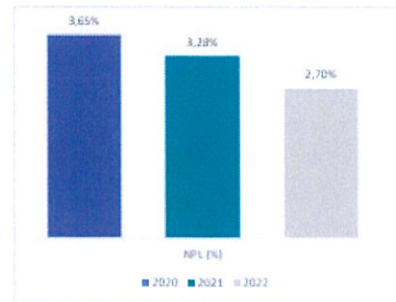


- BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional) Realisasi BOPO Himbara secara average mengalami penurunan sebesar 8,8% YoY menjadi 70,3%. Penurunan tersebut didrive oleh penurunan Operating expenses khususnya penurunan biaya CKPN sejalan dengan trend perbaikan NPL serta penurunan nasabah restrukturisasi yang tercermin dari penurunan rasio Loan at Risk (LAR).



c. Kualitas Portofolio

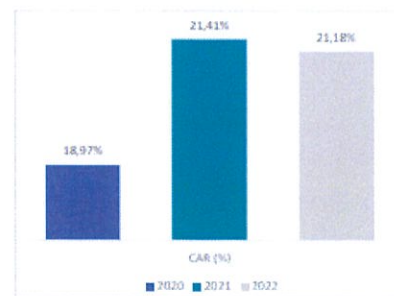
NPL rata-rata Himbara sebesar 2,70% atau turun 0,59% YoY, dengan realisasi masing-masing yaitu BBRI 2,67% (turun 0,33% YoY); BMRI 1,92% (turun 0,80% YoY); BBNI 2,81% (turun 0,89% YoY); BBTN 3,38% (turun 0,32% YoY). Dengan pembentukan CKPN yang cukup besar pada



tahun 2021 dan didukung penurunan NPL dan LaR sd. Triwulan IV 2022, maka coverage rata-rata Himbara mengalami peningkatan dimana NPL coverage meningkat 254,9% dan LaR coverage meningkat 8,64% YoY menjadi 41,59%

d. Permodalan

Realisasi CAR rata-rata menurun 0,23% YoY menjadi 21,18%. Secara umum kondisi permodalan Himbara dalam kondisi baik (di atas ketentuan Reguator $\geq 14\%$) yang mampu mendukung rencana pertumbuhan bisnis Perusahaan. Pada tahun 2022, BTN melaksanakan program rights issue dala



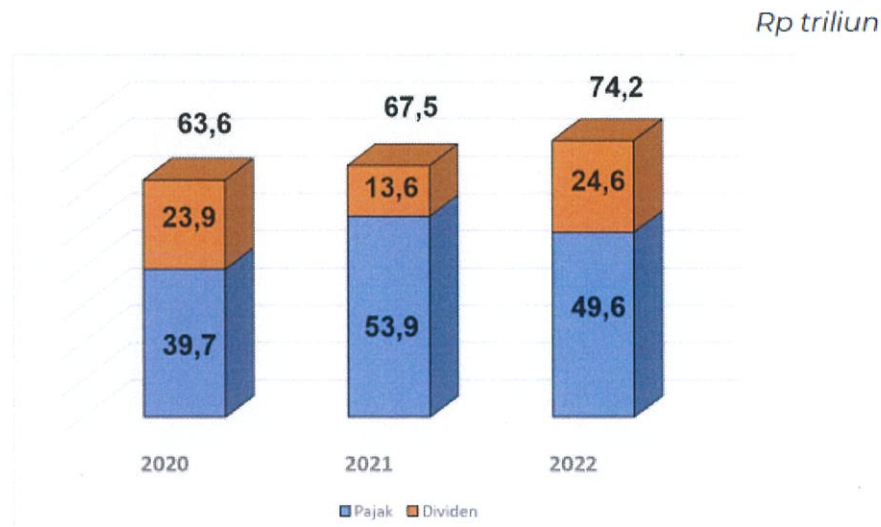
rangka penguatan permodalan yang bersumber dari PMN sebesar Rp2,48 triliun dan yang bersumber dari cash out Pemegang Saham Publik sebesar Rp1,65 triliun.

2. Kontribusi Himbara

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian BUMN tahun 2020-2024, salah satu sasaran strategis Menteri BUMN adalah Kontribusi BUMN terhadap Penerimaan Negara yang diukur dengan jumlah dividen, pajak, dan PNPB lain yang dihasilkan BUMN pada satu tahun berjalan. Sasaran ini bertujuan untuk memberikan kontribusi finansial keuangan kepada negara dan memberikan leverage perekonomian di Indonesia.

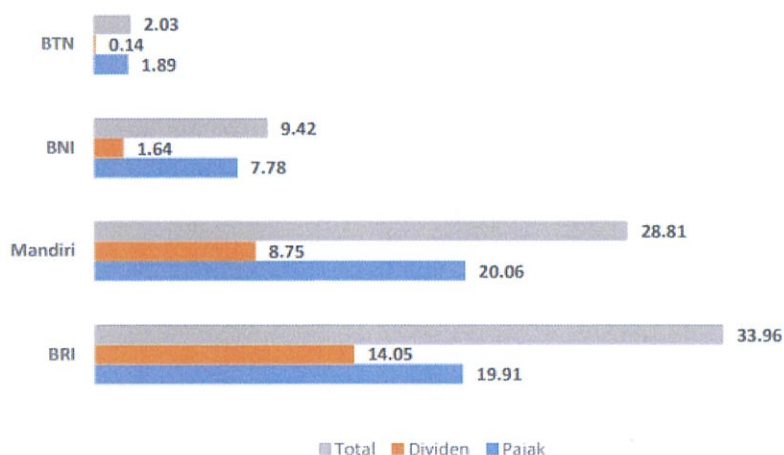
Himbara sebagai BUMN memiliki mandat untuk dapat memberikan peningkatan ekonomi yang berkelanjutan dengan berkontribusi terhadap penerimaan negara. Selama tahun 2022, Himbara berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui pembayaran pajak sebesar Rp49,6 triliun dan pembayaran dividen sebesar Rp24,6 triliun, sehingga total kontribusi Himbara

terhadap penerimaan negara adalah sebesar Rp74,2 triliun. Jumlah ini meningkat 9,9% dibandingkan kontribusi tahun 2021.



Total kontribusi oleh Himbara meningkat dari tahun ke tahun, hal ini selaras dengan peningkatan kinerja Himbara dan target penerimaan negara. Pada tahun 2021, pembayaran dividen oleh Himbara mengalami penurunan sehubungan dengan adanya pandemi COVID19, namun demikian Himbara mampu bangkit dan meningkatkan kinerja pada tahun 2022 sehingga pembayaran dividen mencapai Rp24,6 triliun, meningkat 80,88% yoy dan berkontribusi sebesar 61,8% dari total dividen yang dibayarkan BUMN pada tahun 2022 sebesar Rp39,7 triliun. Kontribusi Dividen terbesar dibayarkan oleh BRI sebesar Rp14,05 triliun, disusul Bank Mandiri Rp8,75 triliun, BNI Rp1,64 triliun, dan BTN Rp0,14 triliun. Himbara akan terus berkomitmen meningkatkan shareholder's return dan kontribusi kepada penerimaan negara.

Rp triliun



N. Post Integration Program Holding Ultra Mikro

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian BUMN tahun 2020- 2024 dan Klasterisasi BUMN dalam roadmap Kementerian BUMN tahun 2020-2024 serta perwujudan dari visi Pemerintah untuk Indonesia Maju dengan memajukan segmen Ultra Mikro maka direncanakan pembentukan holding BUMN Ultra Mikro dengan induk holding PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk serta anggota holding PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Tujuan pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro adalah sebagai berikut:

- Sinergi BUMN pada sektor ultra mikro dapat menangkap potensi unbanked population serta mempercepat proses inklusi dan literasi keuangan di segmen ultra mikro.
- Integrasi dan koordinasi layanan keuangan dapat memperluas layanan keuangan formal untuk segmen ultra mikro.
- Ekosistem ultra mikro yang terbentuk akan mendorong pertumbuhan akses dan bisnis yang berkesinambungan.
- Pengembangan ekosistem ultra mikro melalui sinergi BUMN dapat menciptakan nilai (value) secara keseluruhan dan bagi masing-masing entitas yang terlibat dengan tetap menjaga model bisnis yang menjadi karakteristik masing-masing perusahaan.
- Memperkuat struktur ekosistem BUMN yang kuat guna mengatasi tantangan sustainabilitas bisnis yang dihadapi. Manfaat terbentuknya Holding BUMN sektor Ultra Mikro, sebagai berikut:

- 1) Manfaat bagi Perusahaan

- a) Meningkatkan valuasi entitas melalui peningkatan profitabilitas BRI, Pegadaian, dan PNM;
- b) Meningkatkan efisiensi bisnis melalui sinergi antar entitas dan tata kelola yang lebih baik;
- c) Cost of fund yang lebih rendah bersumber dari dana murah segmen Ultra Mikro dan sumber pendanaan alternatif;
- d) Membangun organisasi yang berbasis ESG (environment, social, and governance).

2) Manfaat bagi Pemerintah

- a) Membantu Pemerintah mencapai rasio target kredit UMKM sesuai agenda pembangunan nasional Indonesia;
- b) Meningkatkan pemerataan ekonomi wilayah-wilayah di Indonesia melalui peningkatan akses kredit ultra mikro di daerah terpencil;
- c) Menciptakan lapangan kerja dan bisnis-bisnis baru di segmen ultra mikro di seluruh Indonesia;
- d) Memperkuat kerangka sistem finansial Indonesia melalui integrasi layanan keuangan yang strategis;
- e) Meningkatkan efisiensi tata kelola BUMN dengan mengurangi jumlah entitas BUMN;
- f) Membentuk wadah untuk pendistribusian program Pemerintah dari berbagai Kementerian yang menargetkan segmen ultra mikro.

3) Manfaat bagi Masyarakat

- a) Akses layanan keuangan formal yang lebih mudah dimana holding UMi yang saat ini memiliki +/-15 juta nasabah akan bertumbuh mencapai +/- 28 juta di tahun 2024;
- b) Mengurangi biaya pendanaan untuk usaha UMi dengan menjadi alternatif utama dari kredit dengan bunga tinggi;
- c) Meningkatkan taraf hidup melalui pembagian jaminan dan bantuan sosial yang didistribusikan melalui ekosistem;
- d) Berkontribusi terhadap peningkatan literasi keuangan nasional, yang diperkirakan Jumlah UMi yang tidak terlayani lembaga keuangan formal menurun dari +/-68% di tahun 2018 menjadi +/- 42% di tahun 2024.

Holding Ultra Mikro resmi terbentuk pada tanggal 13 September 2021 (BRI sebagai Induk dan PNM, Pegadaian sebagai anak), yang ditandai dengan penandatanganan akta inbreng oleh Menteri BUMN dan 3 Dirut BUMN (BRI, PNM dan Pegadaian). Pelaksanaan transaksi right issue BRI yang mencapai Rp95,9 triliun sebagai proses pembentukan Holding Ultra Mikro mampu

mencatatkan sejarah sebagai right issue terbesar atau nomor 1 di Asia Tenggara, nomor 3 di Asia, dan nomor 7 di Dunia. Di samping itu, dengan terbitnya Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada BRI atas saham Seri B, PNM dan Pegadaian dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan kegiatan operasional sehingga mampu mempercepat pemberian layanan kepada masyarakat.

O. Post Merger Bank Syariah BUMN

Ekonomi Islam Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Berdasarkan data dari The State of Global Islamic Economy Report (SGIER), peringkat ekonomi Islam Indonesia meningkat dari peringkat 10 pada tahun 2018/2019 menjadi peringkat 5 pada tahun 2019/2020 dan peringkat 4 pada tahun 2020/2021 (DinarStandard, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam Indonesia tidak hanya semakin besar, tapi juga menunjukkan peranan inovasi di bidang ekonomi Islam mulai dari sektor makanan, pariwisata, serta fashion. Dalam upaya mengembangkan keuangan syariah yang merupakan salah satu fokus pengembangan ekonomi syariah, dicanangkan project merger bank syariah. Meskipun potensi dari ekonomi syariah sangat besar, dari sisi total aset, market share perbankan syariah masih berkisar pada angka 6% pada tahun 2020. Hal ini semakin memperkuat kebutuhan terkait merger bank syariah anak perusahaan BUMN.

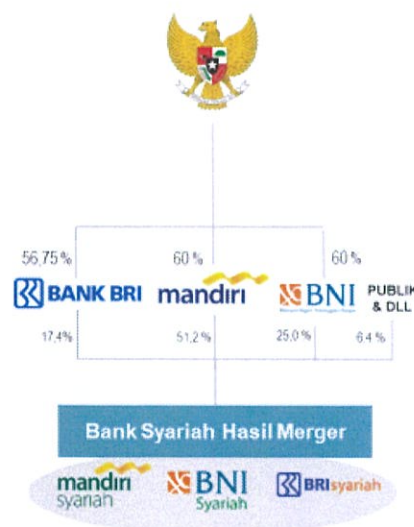


Tujuan utama dari merger bank syariah anak perusahaan BUMN adalah sebagai berikut:

- a) Membentuk Bank Syariah terbesar di Indonesia yang memiliki daya saing secara global;

- b) Memiliki kemampuan untuk menjangkau nasabah korporasi yang berskala besar, dengan didukung produk-produk syariah baru;
- c) Memiliki produk konsumen yang beragam, didukung oleh kapabilitas teknologi terbaik;
- d) Jaringan layanan yang lebih luas;
- e) Permodalan yang lebih kuat, dengan target akan mencapai BUKU 4 sebelum tahun 2025.

Skema kepemilikan bank syariah hasil merger:



Adapun milestone merger Bank Syariah Indonesia adalah sebagai berikut:



P. Program Penyaluran KUR

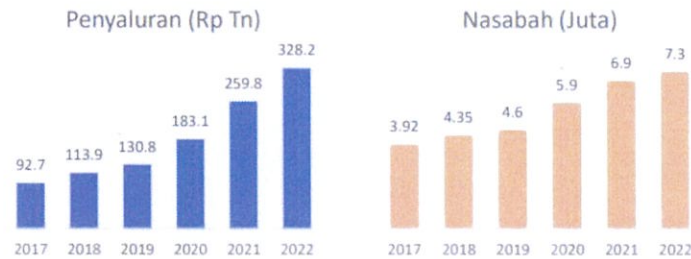
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran dan kontribusi yang penting dalam perekonomian Indonesia. Peran strategis UMKM dalam perekonomian nasional tersebut tercermin dari data Kementerian Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) bulan Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 Triliun. UMKM mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,42% dari total investasi Indonesia. Pelaku UMKM dan koperasi menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia, mulai dari petani, nelayan, peternak, petambang, pengrajin, pedagang, dan penyedia berbagai jasa.

Pentingnya kontribusi UMKM dalam perekonomian nasional dimaksud, mendorong Pemerintah untuk terus mengembangkan potensinya. Program Pemerintah dalam pengembangan UMKM adalah meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada layanan keuangan formal melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahap I pada Tahun 2007-2014 dan Tahap II pada Tahun 2015 sampai dengan saat ini.

Tujuan dari dilaksanakannya program KUR antara lain untuk meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Melalui peningkatan daya saing UMKM, diharapkan UMKM mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang besar lebih besar (scaling up) dalam rangka mendukung kemandirian pembangunan nasional.

Dalam pelaksanaan penyaluran program KUR, Bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, aktif terlibat dengan berperan dalam penyaluran KUR. Pada tahun 2022, realisasi penyaluran KUR nasional sebesar Rp365,50 triliun atau 97,95% dari target penyaluran KUR nasional sebesar Rp373,15 triliun. Dari realisasi penyaluran tersebut, HIMBARA berkontribusi sebesar Rp328,19 triliun atau 89,79% dari total penyaluran nasional.



Q. Program Mekaar

PT Permodalan Nasional Madani (Persero)/"PT PNM" didirikan pada 1 Juni 1999 sebagai BUMN yang mengemban tugas khusus memberdayakan usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). Pasca terbentuknya holding ultra mikro, PNM menjadi bagian dari holding bersama Pegadaian dengan BRI sebagai induk. Bidang usaha utama PT PNM antara lain: a. Jasa Pembiayaan; b. Jasa Manajemen / Capacity Building; c. Pembiayaan Modal Ventura dan Manajemen Investasi melalui Anak Perusahaan.

Salah satu program unggulan dari PT PNM adalah PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). Mekaar merupakan program pembinaan khusus yang dilaksanakan oleh PT PNM untuk ibu-ibu prasejahtera produktif non-bankable. Program Mekaar adalah layanan pemberdayaan berbasis kelompok bagi perempuan pelaku usaha mikro. PT PNM diamanahkan tugas untuk membantu Pemerintah mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan kaum perempuan pra sejahtera. Mekaar merupakan wujud nyata keberpihakan Pemerintah bagi masyarakat kecil dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi negara. Saat ini, program Mekaar telah menjangkau di hampir seluruh pelosok Nusantara dengan melibatkan ibu-ibu dari keluarga pra sejahtera.

Pada dasarnya, nasabah Mekaar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam berusaha, namun keterbatasan akses pembiayaan modal kerja menyebabkan keterampilan berusaha mereka kurang termanfaatkan secara optimal. Beberapa alasan keterbatasan akses tersebut meliputi kendala formalitas, skala usaha, dan ketiadaan agunan. Oleh karena itu, PT PNM menerapkan sistem pembiayaan berbasis kelompok tanggung renteng tanpa agunan yang diharapkan dapat menjembatani kesenjangan akses pembiayaan sehingga para nasabah mampu mengembangkan usaha dalam rangka menggapai cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Manfaat yang disalurkan oleh PT PNM melalui layanan Mekaar meliputi: peningkatan pengelolaan keuangan; pembiayaan modal tanpa agunan; penanaman budaya menabung; dan peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis.

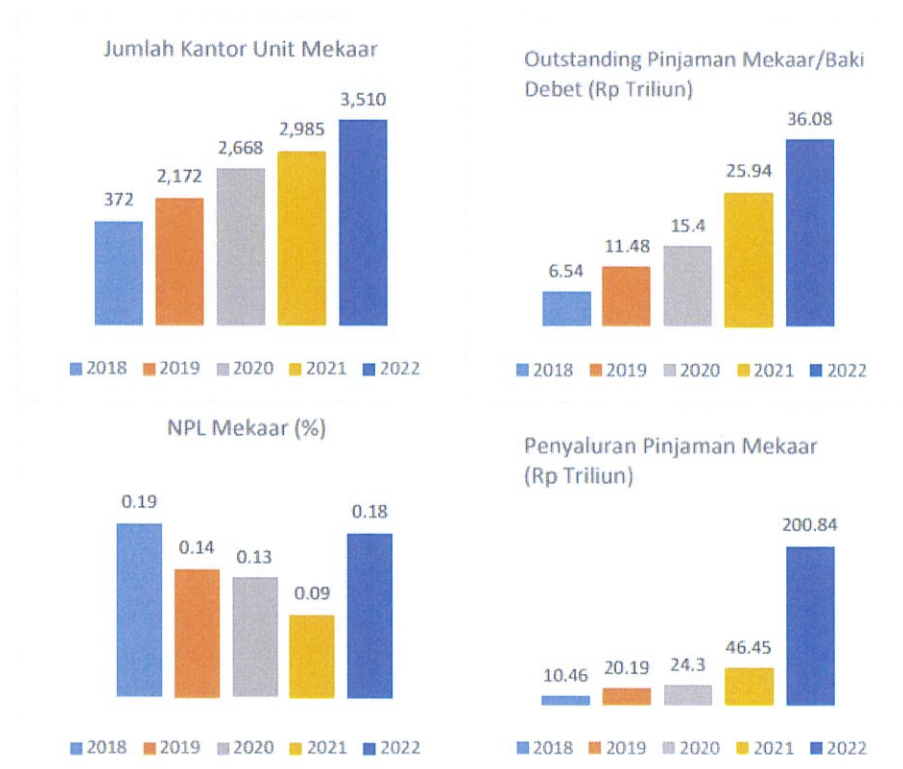
Pembiayaan PNM Mekaar tidak mensyaratkan agunan fisik, melainkan bersifat tanggung renteng kelompok (minimal terdiri dari 10 orang), dengan syarat kedisiplinan untuk mengikuti proses persiapan pembiayaan dan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM). PKM wajib dilaksanakan satu kali dalam seminggu, sebagai kegiatan untuk membayar angsuran mingguan dan pembinaan usaha. Mekaar memberikan peminjaman modal serta penanaman nilai penting bagi setiap nasabah untuk jujur dalam melakukan usahanya, disiplin dalam kehadiran di setiap pertemuan dengan kelompok dan juga mengangsur pinjaman serta kerja keras untuk terus mengembangkan usahanya.

Program Mekaar tidak hanya untuk nasabah yang sudah memiliki usaha, namun juga nasabah yang ingin memulai usaha atau membangun kembali usahanya setelah mengalami kegagalan. Program Mekaar menyediakan layanan untuk membantu penyediaan pinjaman modal bagi nasabah yang ingin membuka usaha. Tentu saja bantuan yang diberikan tidak hanya pinjaman modal tetapi juga pendampingan dalam menjalankan usaha, sehingga nasabah yang tergabung dalam program Mekaar merupakan nasabah yang berkomitmen untuk terus meningkatkan dan menumbuhkan keinginan untuk berwirausaha.

Program Mekaar dimulai sebagai pilot project pada tahun 2015. Saat ini perkembangannya sangat pesat, bahkan di tengah kondisi perekonomian yang

tertekan akibat adanya pandemi COVID-19. Berikut merupakan perkembangan Mekaar per Desember 2022:

- Jumlah Unit Mekaar: 3.510 cabang
- Jumlah Nasabah Aktif PNM Mekaar: 13.921.722 nasabah
- Nilai Outstanding (baki debet) Pinjaman Mekaar: Rp36,08 Triliun
- Jumlah Penyaluran Pinjaman Mekaar: Rp200,84 Triliun
- NPL Mekaar: 0,74%



R. KOPRA Super Platform & Mandiri Livin' Digital Super App

Dalam rangka memperkuat ekosistem digital dan mempertajam fokus serta mengembangkan bisnis untuk menyediakan one stop solution bagi masyarakat, sejak tahun 2021 Bank Mandiri mengakselerasi transformasi Mandiri Digital melalui launching Financial Super App Livin' by Mandiri dan Wholesale Digital Super Platform Kopra by Mandiri. Livin' by Mandiri yang merupakan layanan finansial yang lengkap dan terintegrasi dengan layanan anak perusahaan Mandiri Group serta ekosistem digital pilihan nasabah. Aplikasi Livin by Mandiri dapat didefinisikan dalam 3 aspek yaitu Comprehensive Banking Experiences (semua layanan perbankan dalam genggaman), Full-Suite Financial

Services (pelayanan Jasa Keuangan yang lengkap dari asuransi investasi dan consumer financing), dan Open Ecosystem (terintegrasi dengan best customer lifestyle ecosystem).

Selain Livin, Mandiri juga meluncurkan Kopra by Mandiri merupakan konsep layanan digital single access yang menjadi pusat aktivitas informasi dan transaksi finansial bagi ekosistem bisnis para pelaku usaha di segmen wholesale dan value chainnya secara end to end (hulu ke hilir). Kopra terdiri dari 3 varian digital akses bagi nasabah yang terdiri dari Kopra Portal, Kopra Host to Host dan Kopra Partnership. Beberapa fitur unggulan Kopra by Mandiri antara lain single sign on concept, financial dashboard, limit management, forex dealing online, pembukaan giro online, dan onboarding supplier.

Pada tahun 2022, Bank Mandiri berupaya untuk memaksimalkan peran digitalisasi untuk menunjang pertumbuhan bisnis. Hal ini tercermin pada pertumbuhan transaksi digital Bank Mandiri melalui Livin' dan Kopra by Mandiri yang meningkat signifikan. Livin' by Mandiri telah diunduh lebih dari 22 juta kali dalam kurun waktu 15 bulan terakhir. Begitu juga dengan Kopra by Mandiri yang meningkat hampir empat kali lipat dalam satu tahun terakhir menjadi 83 ribu pengguna. Melalui serangkaian inovasi yang dilakukan dalam setahun terakhir, Livin' by Mandiri telah mampu melayani lebih dari 1,64 miliar transaksi finansial. Adapun nilai transaksi Livin' by Mandiri selama 2022 telah menembus Rp2.435 triliun atau tumbuh 48,4% dari periode tahun sebelumnya atau year on year (yoy). Pada periode yang sama, Wholesale Digital Super Platform Kopra by Mandiri, berhasil mengelola Rp18.567 triliun transaksi hingga akhir tahun 2022 atau tumbuh 22% secara yoy. Platform digital super lengkap yang dimiliki Bank Mandiri dapat dinikmati oleh beragam nasabah mulai dari pengusaha dari segmen korporasi, menengah hingga kecil atau UKM yang mampu melayani berbagai kebutuhan transaksi di manapun dan kapanpun.

Berikut gambaran kinerja Super App Livin' by Mandiri dan Wholesale Digital Super Platform Kopra by Mandiri:



S. BNI Go Global (Serving Diaspora Indonesia)

Setiap Bank Himbara harus membangun distinct core-competence dan spesialisasi bisnis. Melalui dorongan Kementerian BUMN, BNI beraspirasi untuk membentuk DNA sebagai wholesale bank terkemuka dan berfokus pada bisnis trade & transaction, international banking, dan membangun platform SME inovatif.

Strategi BNI tidak lepas dari kontribusi dan arti penting UMKM dalam perekonomian Indonesia, untuk itu, BNI mempunyai fokus strategi dalam mendukung UMKM di Indonesia:

- a. UMKM Ekspor dan Diaspora BNI mendorong pelaku UMKM untuk Go Ekspor.
- b. Digital Value Chain BNI fokus untuk meningkatkan bisnis mitra BNI melalui value chain berbasis digital.
- c. Ekosistem Unggulan BNI fokus untuk pengembangan ekosistem unggulan berbasis digital

Dalam mewujudkan BNI Go Global dan spesialisasi bisnis BNI khususnya dalam menyediakan layanan untuk Diaspora Indonesia, BNI memiliki program-program sebagai berikut:

1. BNI Xpora Xpora yang merupakan akronim dari “Ekspor” dan “Diaspora” adalah sebuah tools dari one stop shopping solution BNI untuk UMKM yang ingin mengembangkan bisnisnya menjadi Go Productive, Go Digital, & Go Global, sampai dengan Desember 2022, terdapat 7 physical hub di Jakarta, Solo, Denpasar, Surabaya, Medan, & Makassar, dengan digital platform pada Xpora.bni.co.id.



Xpora merupakan orkestrator ekosistem UMKM yang mempertemukan penjual, pembeli (termasuk Diaspora) dan enabler ekspor.



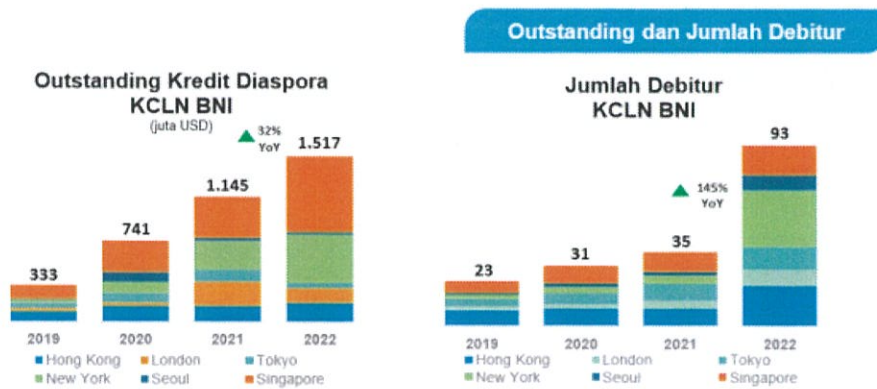
2. BNI Remittance Merupakan prouk BNI memberi kemudahan dalam transaksi remittance, dengan tujuan untuk memudahkan kiriman uang dari Diaspora. Segmen dari produk ini adalah Diaspora yang didominasi oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI).



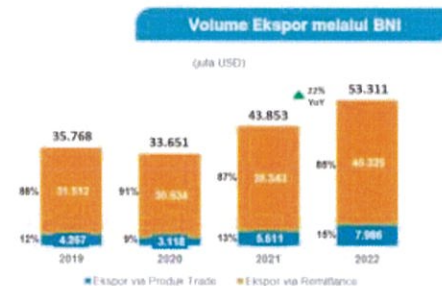
3. Pembukaan Tabungan Diaspora Layanan pembukaan rekening taplus diaspora bertujuan memfasilitasi diaspora yang ingin memiliki tabungan IDR untuk kebutuhan transaksi di Indonesia. Segmen dari layanan ini adalah diaspora di Singapura, Hongkong, Tokyo, dan Seoul. Pada tahun 2022, terdapat 240.000 rekening tabungan diaspora



4. Fasilitas Pinjaman Perusahaan Indonesian-related di Luar Negeri Fasilitas yang disebut kredit diaspora ini bertujuan men-support perusahaan Indonesia untuk masuk ke pasar global. Kredit yang menyasar segmen corporate dan commercial di Hongkong, Singapura, Tokyo, Seoul, London, dan New York ini mendorong bertambahnya perusahaan Indonesia yang masuk pasar global sehingga dapat menopang perekonomian Indonesia. Hingga 2022, BNI sudah mendukung 93 perusahaan Indonesia-related untuk melakukan ekspansi bisnis ke pasar global dengan jumlah outstanding fasilitas sebesar 1,57 juta USD.



5. BNI Smart Trade BNI Smart Trade atau BNI Ekspor mempermudah nasabah BNI dalam pengecekan dokumen dan akses terhadap pembiayaan ekspor untuk memperlancar arus kas. Dengan layanan ini, eksportir mendapat kemudahan melakukan transaksi ekspor secara digital termasuk kemudahan mendapat pembayaran atas transaksinya. Pada tahun 2022, volume ekspor BNI mengalami peningkatan sebesar 22% yoy.



T. Program KPR Bersubsidi Bank BTN

Sektor properti/real estate merupakan salah satu sektor yang tetap menunjukkan pertumbuhan positif selama pandemi dan menjadi prioritas Pemerintah sebagai sektor alternatif untuk menumbuhkan ekonomi. Ke depannya, sektor properti masih memiliki ruang untuk tumbuh yang sangat besar mengingat tingginya angka backlog perumahan nasional dan tingginya jumlah masyarakat yang belum memiliki rumah yang layak. Sebagai sektor yang masih dapat tumbuh maka penempatan dana pada sektor perumahan menjadi strategis karena akan memiliki dampak ekonomi secara kuantitatif terhadap PDB dan penghasilan pekerja di bidang perumahan. Ada sejumlah alasan yang melatarbelakangi hal tersebut, diantaranya:

- a. Sektor perumahan memiliki multiplier effect kepada 174 sector lainnya seperti kesehatan, transportasi, konsumsi, jasa pendidikan, perdagangan, dan lain sebagainya.
- b. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dibutuhkan 5 pekerja untuk setiap pembangunan rumah.
- c. Mendukung UMKM, 90% bahan bangunan yang digunakan dalam konstruksi bersumber dari produk lokal.
- d. Dari setiap unit rumah yang terjual, pemerintah mendapatkan penerimaan negara dalam bentuk pajak PPH, PPN, BBN, PBB dan BPHTB.
- e. Terdapat banyak pengembang swasta yang berperan dalam penyediaan supply perumahan.

Output Multiplier



Setiap Rp 1 yang dikeluarkan untuk sektor perumahan akan menciptakan output pada ekonomi sebesar Rp 2,15.

Oleh karena itu, misalkan dilakukan penempatan dana sebesar Rp 20 triliun yang disalurkan untuk sektor perumahan akan berdampak pada peningkatan output ekonomi nasional sebesar Rp 43 triliun.

Income Multiplier



Setiap Rp 1 yang dikeluarkan untuk sektor perumahan akan menciptakan tambahan penghasilan pada pekerja sektor perumahan sebesar Rp 0,76.

Oleh karena itu, jika dilakukan penempatan dana sebesar Rp 20 triliun yang disalurkan untuk sektor perumahan akan berdampak pada peningkatan penghasilan pekerja pada sektor perumahan sebesar Rp 15,2 triliun.

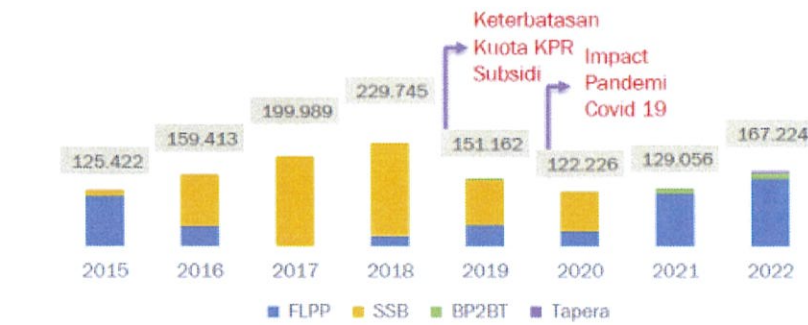
Development Impact



Development impact KPR yang disalurkan melalui Bank BTN lebih besar dibandingkan KPR melalui bank lainnya secara nasional.

KPR Bank BTN juga terbukti lebih efektif dalam menumbuhkan beberapa komponen pembentuk ekonomi nasional seperti konsumsi rumah tangga, investasi, konsumsi pemerintah dan net ekspor, serta penyerapan tenaga kerja.

Pada tahun 2022, program KPR bersubsidi terdiri dari beberapa produk/kelolaan: a. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Pemerintah memberikan dukungan dana likuiditas kepada perbankan sehingga dapat menurunkan suku bunga kredit yang akan disalurkan. b. Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) Pemerintah memberikan subsidi sebanyak 1 kali untuk pembayaran uang muka kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sementara KPR tetap menggunakan suku bunga komersil yang berlaku. c. Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Merupakan fasilitas pembiayaan yang bersumber dari simpanan iuran peserta Tapera sehingga dapat menurunkan suku bunga kredit yang akan disalurkan.



Jenis KPR	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
FLPP	112.193	45.282	210	23.842	48.227	34.367	117.699	150.825
SSB	13.229	114.131	199.779	205.903	98.360	87.241	-	-
BP2BT	-	-	-	-	4.575	618	10.968	11.430
Tapera	-	-	-	-	-	-	389	4.969
Total	125.422	159.413	199.989	229.745	151.162	122.226	129.056	167.224

U. Pelaksanaan Right Issue dan PMN kepada BTN

BTN memiliki peran penting dalam sektor perumahan nasional dengan pangsa pasar KPR tahun 2021 mencapai 39% dari total KPR Nasional dan 85% dari total KPR Subsidi. CAR BTN secara umum berada di bawah rata-rata bank lain sehingga dalam rangka memperkuat permodalan, BTN direncanakan melaksanakan rights issue dengan target Rp4.13 T (PMN sebesar Rp2.48 T dan dari porsi publik sebesar Rp1.65 T). Rights issue dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam meningkatkan penyaluran jumlah kredit dan/atau pinjaman terutama Kredit Kepemilikan Rumah bagi masyarakat yang belum memiliki hunian sebanyak 1.3 juta unit selama tahun 2021 hingga tahun 2025. Nominal PMN senilai Rp2.480.000.000.000.- sesuai KMK No. 439/KMK.02/2022 & Rights Issue porsi publik senilai Rp1.650.000.000.000.-

Capaian Realisasi 2022: • Realisasi PMN sebesar Rp2,48 triliun; • Realisasi porsi publik dari right issue sebesar Rp1,65 triliun; Komposisi pemegang saham sebelum dan setelah pemerintah tetap, yaitu Pemerintah 60% dan Publik 40%.

Sebelum Rights Issue

	Nilai Nominal Rp.500,- per saham	
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp.)
Modal Dasar	20.478.432.000	10.239.216.000.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor		
- Pemerintah RI	6.354.000.000	3.177.000.000.000
- Publik	4.236.000.000	2.118.000.000.000
	10.590.000.000	5.295.000.000.000

60,00%

40,00%

100,00%

Setelah Rights Issue

	Nilai Nominal Rp.500,- per saham	
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp.)
	20.478.432.000	10.239.216.000.000
	8.420.666.647	4.210.333.323.500
	5.613.777.765	2.806.888.882.500
	14.034.444.413	7.017.222.206.000

60,00%

40,00%

100,00%

Program Kerja 2023

Program	Target 2023
Meningkatkan penyaluran KPR Subsidi	171.250 Unit
Meningkatkan penyaluran KPR Non Subsidi	54.475 Unit
Meningkatkan KPR Program Rumah Milenial	25.000 Unit

V. Pelaksanaan Right Issue BSI

Pemegang Saham	Jumlah Saham Sebelum Rights Issue	Komposisi Sebelum Rights Issue	Jumlah Saham Setelah Rights Issue	Komposisi Setelah Rights Issue
Seri A Dwiwarna	1	0.00%	1	0.00%
a. Bank Mandiri	20.905.219.379	50.83%	23.740.608.436	51.47%
b. BNI	10.220.230.418	24.85%	10.720.230.418	23.24%
c. BRI	7.092.761.655	17.25%	7.092.761.655	15.38%
e. Afiliasi	735.461.942	1,79%	733.133.341	1,58%
d. Masyarakat	2.175.633.948	5.29%	3.842.546.287	8.33%
Jumlah Seri B	41.129.307.342	100.00%	46.129.260.137	100.00%
Total	41.129.307.343	100.00%	46.129.260.138	100.00%

Rights issue BSI bertujuan untuk penguatan permodalan dalam mendukung pertumbuhan ekspansi bisnis perusahaan untuk mewujudkan aspirasi Pemerintah menjadikan BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia yang memiliki daya saing secara global. Target pelaksanaan rights issue BSI, yaitu memperoleh dana segar sebesar Rp5 Triliun, adanya kenaikan floating saham publik di market dan meningkatnya rasio kecukupan modal (CAR). Rights issue BSI dilaksanakan pada tanggal 19 - 23 Desember 2022. Pelaksanaan rights issue BSI berjalan dengan baik dimana BSI mencatat pemesanan saham baru oversubscribed 1,4 kali. Hal tersebut mencerminkan tingginya antusiasme dan kepercayaan investor terhadap prospek bank syariah terbesar di Indonesia. Pada rights issue tersebut BSI mengeluarkan sebanyak 4.999.952.795 saham baru Seri B senilai Rp5 Triliun, sehingga total modal BSI menjadi sebesar Rp34 Triliun. Jumlah pendanaan yang dihasilkan melalui rights issue mencapai Rp5,3 Triliun atau 106% di atas target Rp5 Triliun. Selain itu, rasio kecukupan modal (CAR) naik dari 17,31% sebelum rights issue menjadi 20,33%. Jumlah saham publik (free float) juga bertambah dari 5,35% menjadi 8,33% atau berhasil memenuhi batas minimum regulator 7,5%. Pelaksanaan rights issue BSI menimbulkan adanya perubahan pada komposisi kepemilikan saham di BSI. Bank Mandiri selaku pemilik saham pengendali telah melaksanakan seluruh haknya dan menambah kepemilikan sahamnya dari yang semula mempunyai kepemilikan 20.905.219.379 lembar saham atau 50,83% menjadi 23.740.608.436 lembar saham atau 51,47% setelah rights issue. Sedangkan BNI hanya mengeksekusi sebagian saham baru yang diterbitkan BSI, yaitu 500 juta saham dari porsi yang menjadi haknya sebanyak 1,24 miliar saham baru. Komposisi kepemilikan saham BNI di BSI dari yang semula 24,85% menjadi 23,24%. Berbeda dengan Bank Mandiri dan BNI, BRI memilih untuk tidak

mengekskusi haknya sehingga terjadi dilusi pada komposisi kepemilikan saham BRI di BSI yang semula 17,25% menjadi 15,35% pasca rights issue BSI. Aksi korporasi ini selain berhasil meningkatkan free float melebihi ketentuan minimum yang berlaku, juga menunjukkan kepercayaan investor yang semakin kuat terhadap kinerja fundamental BSI. Kedepannya, BSI akan terus tumbuh dari sisi inovasi produk dan digitalisasi layanan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan.

W. Transformasi PT Pos Indonesia (Persero)

Transformasi PT Pos Indonesia (Persero) telah dilaksanakan sesuai dengan arahan Menteri BUMN sejak Tahun 2021 yang bertujuan agar transformasi tersebut dapat berdampak positif terhadap kinerja dan pendapatan perusahaan. Terdapat 7 (tujuh) bidang transformasi yang dilakukan yaitu pada bidang Bisnis, Produk dan Channel, Proses, Teknologi, Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Budaya. Selama Tahun 2022, terdapat 28 program transformasi PT Pos Indonesia (Persero) yang terdiri dari 14 program selesai atau 50% tercapai dari target, 12 program on process yang akan di carry over ke Tahun 2023 atau 42,9% tercapai dari target, serta 2 program closed atau tidak tercapai. Adapun rata-rata ketercapaian progress pada program transformasi pada Tahun 2022 yakni 89,25%, sedangkan khusus untuk program digitalisasi mencapai 87% dari target.

Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
100% Launching Platform Fulfillment Center "STORT" di Tembung Sekeloa 1.200m ²	60% Launching Creative Hub Pos Bloc di Medan dan Surabaya seluas 7.800m ²	100% Mengembangkan Poliklip dan STORLOG menjadi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI)	90% Launching Layanan/Plar Lending, Saving, Insurance & Investment di Pospay
100% Integrasi Pickup Service ke Marketplace	100% Launching Freightier (Air Cargo) Domestic	80% Pembangunan Assets Management System di Pos Logistik	100% Launching Layanan/Plar Cash Collection, O2O dan Syarah di Pospay
100% Launching Electric Vehicle (EV) sebagai Moda Transportasi Pengiriman Pos First/Last Mile	40% Pembangunan SPP Jakarta Timur	100% Implementasi War Room di Kantor Pusat Bandung untuk Monitoring End to End Operasional Kurir 24/7 (SWP 95%)	50% Modernisasi Material Handling Equipment di Hub Semarang, Karang dan Jakarta Timur untuk Efisiensi dan Percepatan Proses
100% Pengembangan Kompetensi Millennials and Women Talent untuk Akselerasi Penyapihan Leaders	70% Launching Digitalisasi Human Capital Service	90% Launching New Performance Management System yang Terintegrasi dengan KPI Individu	100% Productivity Enhancement dan Remodelling Manpower untuk Mendukung Model Kemitraan
100% Implementasi Database Kurir dan Logistik di Cloud untuk Real-time 24/7 Data Processing dan Analytics	40% Integrasi Platform Digital Logistik (Logex Trans Talker, Pospay, PosAja!, DLS, MyCargo)	90% Launching Superapps untuk Meningkatkan Customer Experience	90% Launching Aplikasi New Customer Relationship Management untuk Pelanggan Enterprise
100% Implementasi Cost Leadership dengan Kebijakan Sentralisasi Keuangan Terpusat	100% Launching Digitalisasi Financial Systems	70% Remodeling/Mengalihkan KCP LPU yang Potensial ke KCP di Daerah IT	100% Tersementasinya Konsolidasi Pos dan VTP (VTPaduk jadi bergabung)
100% Launching dan Adopsi Specific Behaviour AKHLAK Pos Indonesia 2nd year (PAGTI)	100% Implementasi Sistem Audit untuk Quality, Health, Safety, Security and Environment Proses Operasi	100% Launching Digitalisasi Manajemen Risiko	80% Ruling Corporate Strategic Scenario (CSS) 2023-2027
Completed	Carry Over 2023	Closed	

Terdapat beberapa program transformasi yang dikategorikan sebagai program prioritas yaitu berkaitan dengan adanya digitalisasi dalam pelayanan, perubahan business process, dan cost efficiency. Program digitalisasi pelayanan yang dilakukan adalah launching "Superapps" untuk meningkatkan Customer Experience. Dalam menunjang bisnisnya, PT Pos Indonesia (Persero) memiliki 2 (dua) aplikasi yaitu "PosAja!" sebagai aplikasi yang dapat menunjang layanan

bisnis jasa kurir dan logistik serta “Pospay” sebagai aplikasi yang dapat menunjang kemudahan pembayaran transaksi dan pendukung dari bisnis layanan keuangan. Demi meningkatkan efektivitas dalam memudahkan pelanggan dalam bertransaksi, maka diciptakanlah “Superapps” yang dapat mengakomodasi seluruh layanan Pos. Progres dalam pembangunan “Superapps” saat ini masih tercapai 90% dari target dan akan di-carry over ke Tahun 2023 untuk finalisasi aplikasi dan uji coba internal sebelum dipublikasi ke pelanggan yang akan diperkirakan selesai pada bulan Februari 2023.

Dari sisi proses, program transformasi dilakukan dengan implementasi War Room di Kantor Pusat Bandung untuk monitoring end to end operasional kurir selama 24 jam (24/7). Adanya GAP dari capaian kinerja Standar Waktu Penyerahan (SWP) serta belum optimalnya kepatuhan dalam disiplin operasi membutuhkan pengawasan yang difokuskan untuk perbaikan operasional serta peningkatan kualitas kiriman. War Room diimplementasikan untuk membantu monitoring end to end operasional selama 24 jam dengan menggunakan dashboard serta memanfaatkan aplikasi NIPOS yang real time cloud base sehingga SWP minimal 95% tercapai. Selain di kantor pusat, saat ini War Room juga diimplementasikan di seluruh kantor regional. Adapun realisasi SWP per Desember 2022, antara lain pada Pos SameDay tercapai 100% dari target, Pos Next Day tercapai 98,2% dari target, Pos Reguler tercapai 97,3% dari target, dan Shopee tercapai 97,7% dari target sehingga untuk seluruh rata-rata SWP pengiriman paket Pos yakni sebesar 98,3% dari target.

Selanjutnya, dari sisi bisnis, program transformasi dilakukan dengan launching Platform Fulfillment Center “STORI” di Tambun. STORI merupakan suatu platform yang menyediakan kebutuhan logistik untuk industri besar dan UMKM dengan menyediakan jasa fulfillment service, penyedia platform penjualan, delivery serta pembayaran untuk memudahkan pelanggan dalam bertransaksi. Saat ini STORI sudah memiliki 11 cabang di seluruh Indonesia serta 3 produk utama. Performansi bisnis dari STORI dari bulan Januari 2022 sampai Desember 2022 adalah GMV naik 75 kali dengan transaksi naik 28 kali. Program STORI diharapkan mampu memperluas bisnis untuk peningkatan pendapatan, brand awareness, dan value aset serta di Tahun 2023 akan ditargetkan untuk melakukan pengembangan pasar, jaringan, serta sistem secara berkala. Selain itu, terdapat pula program transformasi yakni program launching Creative Hub Posbloc di Medan dan Surabaya. Gedung Kantor Pos Medan merupakan aset heritage PT Pos Indonesia (Persero) yang ditetapkan

sebagai Bangunan Cagar Budaya yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai creative hub. Pos Bloc Medan diresmikan pada tanggal 29 Oktober 2022 untuk mendukung UMKM, mewadahi komunitas kreatif, meningkatkan value aset, serta sebagai leverage brand dan layanan PT Pos Indonesia (Persero). Adapun target selanjutnya yakni pada Tahun 2023 akan diselesaikan pembangunan Pos Bloc di Surabaya.

X. Proyek LRT Jabodebek

Lokasi	DKI Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor
Nilai Investasi	Rp32,5 Triliun
Skema Pendanaan	Kredit sindikasi dengan penjaminan pemerintah
Penanggung Jawab Proyek	PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Target Operasional	12 Juli 2023
Progres Fisik	88,07%

Proyek LRT Jabodebek dibangun dengan menugaskan PT Adhi Karya (Persero) sebagai kontraktor prasarana, PT Industri Kereta Api (Persero) sebagai produsen sarana/rollingstock, dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai penyelenggara sarana, operator, dan penyelenggara perawatan sarana dan prasarana. Struktur dan dasar penugasan BUMN tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

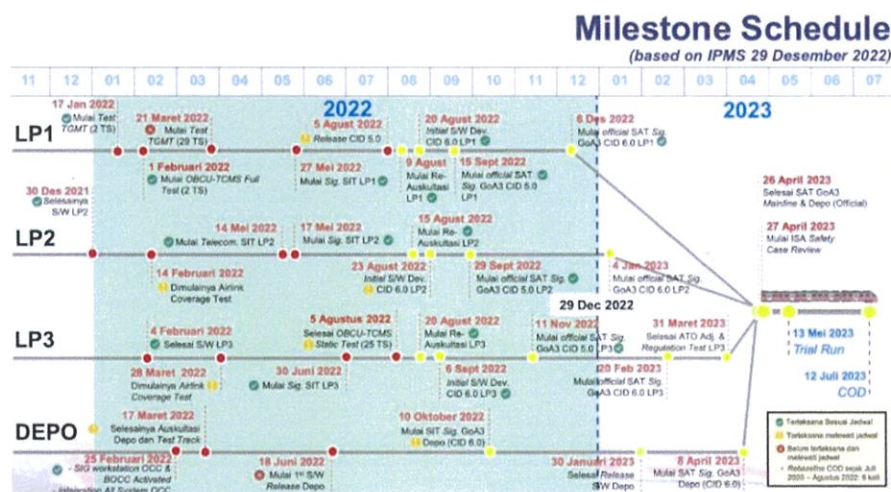


Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional ("PSN"), Proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek masih menjadi PSN tahun 2022. Penyelesaian proyek ini mengalami keterlambatan terutama karena implementasi Grade of Automation level 3 tertunda sehingga proses trial run terhambat. Terkait dengan progres pendanaan, sampai akhir tahun 2023 proyek

LRT Jabodebek telah mendapatkan pendanaan melalui PMN dengan nilai total Rp10,2 triliun yang terdiri dari:

1. PMN TA 2015 senilai Rp2 triliun;
2. PMN TA 2017 senilai Rp2 triliun;
3. PMN TA 2018 senilai Rp3,6 triliun;
4. PMN TA 2021 senilai Rp2,6 triliun.

Sementara itu, progres fisik proyek LRT Jabodebek sampai dengan Triwulan IV 2022 adalah sebesar 88,07%. Item pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun 2023 antara lain konstruksi depo, persinyalan, trial run, integrasi antarmoda, dan penyelesaian perizinan yang belum diterbitkan yang terdiri dari izin operasi prasarana, izin pengoperasian fasilitas perawatan sarana, izin usaha prasarana, dan izin usaha sarana. Milestone schedule proyek LRT Jabodebek dapat digambarkan sebagai berikut:

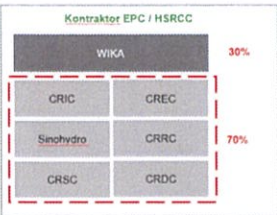


Proyek LRT Jabodebek ditargetkan untuk beroperasi secara komersial/commercial operation date pada 12 Juli 2023.

Y. Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB)

Lokasi	DKI Jakarta dan Jawa Barat (Karawang, Kab. Bandung, Kota Bandung)
Nilai Investasi	USD7.520 juta (USD6.071 juta + USD1.449 juta)
Skema Pendanaan	Ekuitas dan pinjaman
Penanggung Jawab Proyek	PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Target Operasional	1 Juli 2023
Progres Fisik	83,18%

PSN pada sektor kereta api lainnya yang tercantum pada Daftar PSN 2022 adalah Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). KCJB akan menjadi kereta berkecepatan tinggi pertama di Indonesia dan di Asia Tenggara yang



100

- ☐ 1. *Chlorophyll a*
☐ 2. *Chlorophyll b*
☐ 3. *Chlorophyll c*
☐ 4. *Chlorophyll d*
☐ 5. *Chlorophyll e*
☐ 6. *Chlorophyll f*
☐ 7. *Chlorophyll g*
☐ 8. *Chlorophyll h*
☐ 9. *Chlorophyll i*
☐ 10. *Chlorophyll j*

Z. Bali Maritime Tourism Hub (BMTH)

Lokasi	Kota Denpasar, Provinsi Bali
Nilai Investasi	Rp6,07 Triliun
Skema Pendanaan	Dana PMN dan BUMN
Penanggung Jawab Proyek	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
Target Operasional	2024
Progres Fisik	33,55%

Pengembangan BMTH ditujukan untuk mendukung kemajuan pariwisata dan sebagai pintu gerbang pariwisata kemaritiman yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan turis melalui kapal cruise dan bisnis maritim lainnya sehingga dapat memberikan multiplier effect sektor pariwisata di Provinsi Bali. Pengembangan BMTH akan memberikan dampak ekonomi untuk masyarakat sekitar antara lain penyerapan tenaga kerja, mendukung pertumbuhan UMKM pendukung pariwisata di Bali, dan peningkatan PDB Provinsi Bali. Pengembangan BMTH terdiri atas Pekerjaan Pengerukan Alur & Kolam Pelabuhan Benoa Dan Pekerjaan Pengembangan Pelabuhan Benoa. Pekerjaan pengerukan meliputi pengerukan alur dan kolam serta melebarkan alur pelayaran untuk meningkatkan kapasitas kapal, terutama kapal cruise yang dapat bersandar di Pelabuhan Benoa sebagai Pelabuhan transit. Pekerjaan pengembangan Pelabuhan Benoa meliputi Pengembangan Gate & Perluasan Terminal Penumpang Internasional, Infrastruktur Dasar & Fas. Umum Penunjang Pariwisata, Revetment & Retaining Wall Dumping I & II, Dermaga Cruise Timur 160 M, Taman Segara Kerthi, Dan Penyiapan Lahan Bali Tenten. Progres fisik dan keuangan Pengembangan BMTH per Desember Tahun 2022 disampaikan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Realisasi Keuangan (Rp Miliar)		Realisasi Fisik (%)
		Target	Realisasi	
1	Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa (Sumber Dana PMN)	875,51	375,58	38,57
A	Pekerjaan Pengerukan Alur dan Kolam Paket A			28,03
B	Pekerjaan Pengerukan Alur dan Kolam Paket B			46,68
2	Pengembangan Pelabuhan Benoa	918,77	405,30	
A	Revetment & Retaining Wall Dumping I			100
B	Revetment & Retaining Wall Dumping II			65,93
E	Perpanjangan Dermaga Timur 160 M			95,86
F	Pembangunan Taman Segara Kerthi			93,51
G	Penyiapan Lahan Bali Tenten			Persiapan
	TOTAL	1.794,28	780,88	33,55

Progres keuangan pengembangan BMTH secara total terealisasi sebesar Rp 780,88 Miliar atau mencapai 43,52% dari RKAP 2022. Adapun progres fisik pengembangan BMTH secara Total telah mencapai 33,55% pada Tahun 2022. Pada pelaksanaan Pekerjaan Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa terdapat beberapa kendala khususnya perihal perizinan yaitu Belum Terbitnya Revisi RIP Benoa mengingat terdapat beberapa pekerjaan yang belum diakomodir dalam RIP Benoa sebelumnya yaitu terkait pendalaman pengerukan kolam dari sebelumnya sampai dengan - 10 meter menjadi sampai dengan -12 meter. Penerbitan Revisi RIP Benoa terkendala dalam salah satu syaratnya yaitu mendapatkan rekomendasi kesesuaian tata ruang dari Walikota Denpasar yang baru dikeluarkan pada Tanggal 18 November 2022. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022, dokumen Revisi RIP telah disampaikan kepada Menteri Perhubungan untuk ditetapkan. Selain RIP Benoa, Revisi Dokumen AMDAL dibutuhkan terkait pendalaman pengerukan sampai dengan -12 meter sesuai dengan perubahan RIP Benoa yang diusulkan. Concern dari KLKH yaitu terdapat prioritas dalam penerbitan izin lingkungan yaitu Arahan dari Presiden, IKN, PSN, dan Swasta. Terhadap progress Revisi Dokumen AMDAL, Direktur Kepelabuhanan Kementerian Perhubungan telah bersurat kepada Direktur PDLUK KLHK perihal kesesuaian pengembangan Pelabuhan Benoa dengan RIP Benoa, merujuk kepada luas lahan yang disepakati Pemerintah Kota Denpasar.

Pengembangan BMTH merupakan program yang berkelanjutan, sehingga kepastian pada aspek perizinan berdampak signifikan terhadap progress fisik pekerjaan. Atas hal tersebut, Pelindo telah berkoordinasi dengan Ditjen Hubla untuk memberikan Langkahlangkah diskresi dalam hal ini yaitu percepatan perizinan sehingga penerbitan Surat Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk (SPK3) Tahap 2 dapat diproses secara bersamaan/paralel dengan perubahan RIP dan AMDAL agar pekerjaan pengerukan dapat dilanjutkan. Pada Tahun 2023, Pengembangan BMTH akan melanjutkan pekerjaan yang belum terselesaikan pada Tahun 2022 diantaranya yaitu Pekerjaan Pengerukan Alur dan Kolam Paket A, Pekerjaan Pengerukan Alur dan Kolam Paket B, Revetment & Retaining Wall Dumping II, Perpanjangan Dermaga Timur 160 M, Pembangunan Taman Segara Kerthi, Penyiapan Lahan Bali Tenten dengan Target % Penyelesaian Fisik sebesar 97% sampai dengan Triwulan IV 2023. Proyek ini ditargetkan akan selesai secara keseluruhan pada kuartal I 2024.



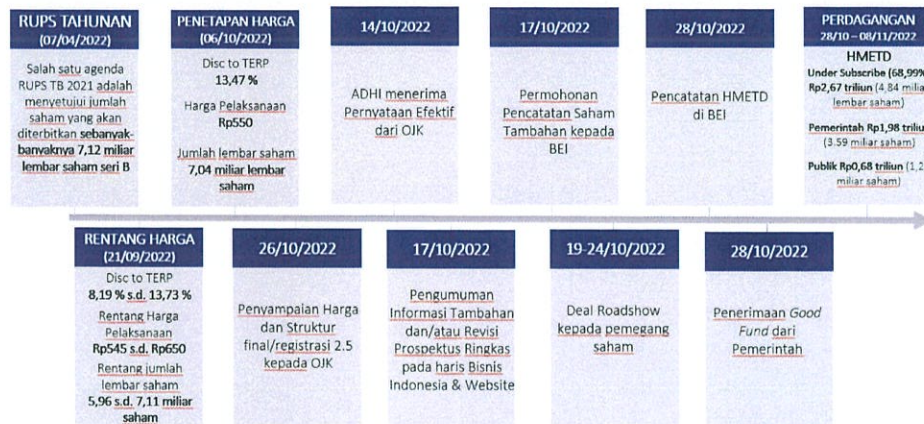
AA. Rights Issue PT Adhi Karya (Persero) Tbk

PT Adhi Karya (Persero) Tbk merupakan salah satu BUMN binaan Asisten Deputi Bidang Infrastruktur yang bergerak pada bidang konstruksi dan telah memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN) sebanyak Rp1,98 triliun pada tahun 2022 melalui penambahan modal perusahaan terbuka atau *rights issue* dengan menggunakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Proses usulan dan pencairan PMN melalui skema *rights issue* PT Adhi Karya (Persero) Tbk secara detail sebagai berikut:

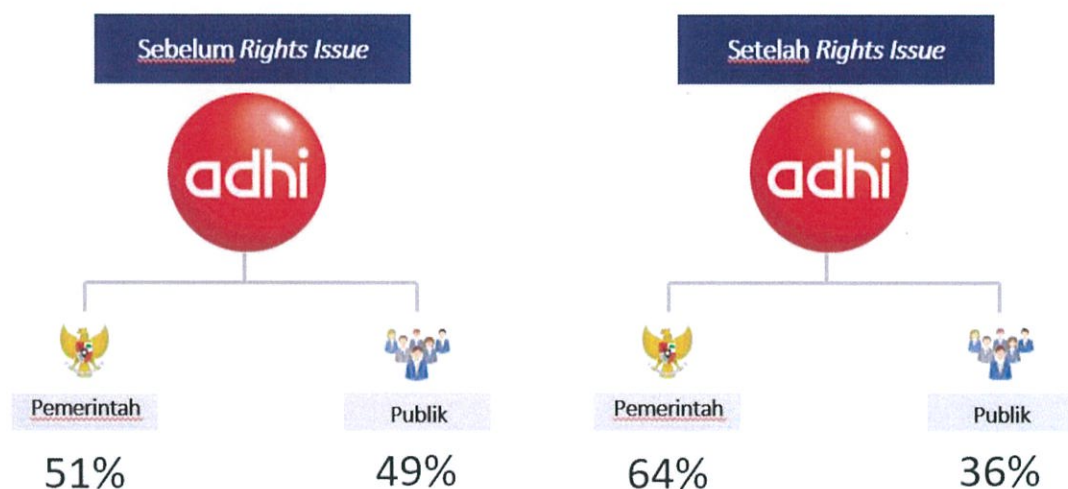
Proses Usulan PMN TA 2022 PT Adhi Karya (Persero) Tbk



Proses Pencairan PMN TA 2022 PT Adhi Karya (Persero) Tbk melalui Skema *Rights Issue*



Pelaksanaan *rights issue* PT Adhi Karya (Persero) Tbk menghasilkan dana sebesar Rp2,67 triliun dimana Pemerintah mengambil seluruh bagian saham yang menjadi haknya sebanyak 3,59 miliar lembar saham dengan melakukan penambahan PMN sebesar Rp1,98 triliun. Sedangkan saham bagian publik yang telah dibayar secara tunai oleh publik kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebanyak 1,25 miliar lembar saham atau senilai Rp0,69 triliun. Sehingga, hasil pelaksanaan *rights issue* tersebut meningkatkan jumlah lembar saham yang diterbitkan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk yang sebelumnya sebanyak 3,56 miliar lembar saham menjadi 8,41 miliar lembar saham. Hal ini menjadikan porsi kepemilikan saham Pemerintah pada PT Adhi Karya (Persero) mengalami peningkatan dan porsi publik mengalami penurunan. Struktur kepemilikan saham PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebelum dan setelah *rights issue* secara detail sebagai berikut:



Dana hasil *rights issue* PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar Rp1,98 triliun yang diterima dari penambahan PMN oleh Pemerintah akan digunakan untuk penyertaan modal melalui Badan Usaha Pelaksana dengan rencana alokasi dana sebagai berikut:

- PT Jogjasolo Marga Makmur (Jalan Tol Solo – Jogja – Kulon Progo) sebesar Rp1,4 triliun
- PT Jasamarga Jogja Bawen (Jalan Tol Jogja – Bawen) sebesar Rp0,39 triliun
- PT Karian Water Services (SPAM Karian – Serpong) sebesar Rp0,19 triliun

Sedangkan dana hasil *rights issue* yang berasal dari publik sebesar Rp0,689 triliun akan digunakan untuk penyertaan modal melalui Badan Usaha Pelaksana dengan rencana alokasi dana sebagai berikut:

- PT Jogjasolo Marga Makmur (Jalan Tol Solo – Jogja – Kulon Progo) sebesar Rp0,350 triliun
- PT Jasamarga Jogja Bawen (Jalan Tol Jogja – Bawen) sebesar Rp0,145 triliun
- PT Karian Water Services (SPAM Karian – Serpong) sebesar Rp0,069 triliun
- Sisanya akan digunakan untuk Proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Selatan, Tol JORR Elevated Ruas Cikunir – Ulujami serta investasi di bidang pengelolaan limbah melalui penyertaan modal pada perusahaan dimaksud.

Dengan adanya penerimaan dana PMN dan *rights issue*, maka ekuitas PT Adhi Karya (Persero) Tbk menjadi sebesar Rp8.766.405.249.600,- yang diharapkan akan memperbaiki struktur permodalan dan rasio DER Perusahaan.

BB. Integrasi BUMN Semen

Guna meningkatkan daya saing BUMN industri semen di pasar global, Wakil Menteri BUMN II pada tahun 2022 telah berhasil menyelesaikan salah satu program strategis yaitu mengintegrasikan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. Selain itu, Integrasi BUMN Semen diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk melalui optimalisasi pemasaran di wilayah Sumatera Bagian Selatan, meningkatkan efisiensi operasional kedua entitas, meningkatkan ketersediaan semen yang lebih kompetitif di seluruh wilayah Indonesia dan memberikan potensi untuk peningkatan ekspor.

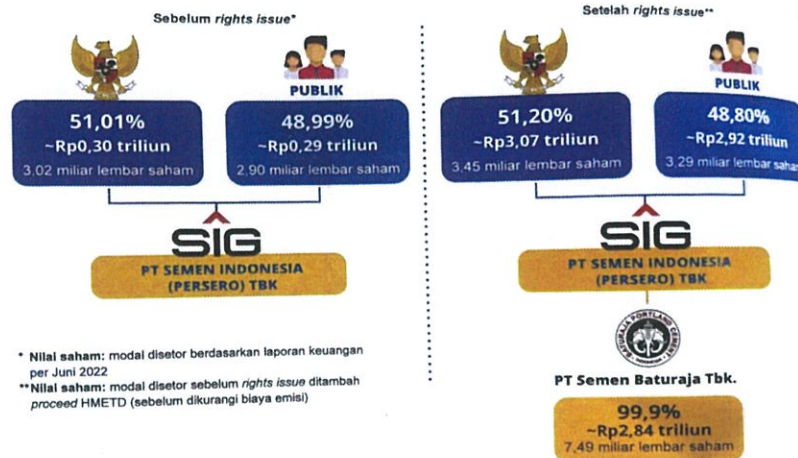
Pelaksanaan integrasi BUMN Semen telah dilakukan melalui rencana penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”)

(rights issue), pelaksanaan *rights issue* tersebut telah dilaksanakan dengan skema sebagai berikut:



Saham yang ditawarkan dalam rights issue PT Semen Indonesia (Persero) Tbk berhasil diserap 96,90 % dengan total Rp5,41 triliun dengan rincian eksekusi bagian Pemerintah sebesar Rp2,84 triliun melalui inbreng saham PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (Akta No. 15 tanggal 19 Desember 2022) serta partisipasi publik sebesar Rp2,56 triliun.

Rights issue yang dilaksanakan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk menyebabkan porsi kepemilikan saham Negara meningkat dari 51,01% menjadi 51,20% dan menurunkan porsi kepemilikan saham publik dari 48,99% menjadi 48,80%. Melalui rights issue ini juga, maka PT Semen Indonesia (Persero) Tbk memperoleh kepemilikan 99,99% saham seri B PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. Di samping itu, masih terdapat 1 lembar saham Seri A Dwiwarna pada PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. Struktur kepemilikan saham PT Semen Indonesia (Persero) Tbk sebelum dan setelah rights issue sebagai berikut:



Ö. Penyehatan Keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk

PT Waskita Karya (Persero) Tbk saat ini tengah fokus melakukan pemulihan kesehatan keuangan melalui program 8 stream yang terdiri dari:

1. PMN & Rights Issue
2. Penjaminan Pinjaman & Obligasi/Sukuk
3. Master Restructuring Agreement (MRA)
4. Restrukturisasi Utang Anak Usaha
5. Divestasi Jalan Tol
6. Transformasi Bisnis
7. Penyelesaian Jalan Tol Khusus
8. GCG & Manajemen Risiko

Progres 8 stream program penyehatan keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut:

PMN & Rights Issue Pemberian PMN oleh Pemerintah kepada Waskita Karya sebesar Rp7,9 triliun pada tahun 2021. Pemberian PMN tersebut dilakukan dengan skema <u>rights issue</u> dan Waskita Karya menerima dana dari publik sebesar Rp1,54 triliun. Penjaminan Pinjaman & Obligasi/Sukuk - o Penjaminan Pemerintah atas Pinjaman Waskita Karya sebesar Rp8,07 triliun oleh DJPPR, Kementerian Keuangan dan PT PII. - o Penerbitan Obligasi III sebesar Rp1,7 triliun. - o Penerbitan Obligasi IV dan Sukuk Mudharabah I sebesar Rp3,26 triliun. Master Restructuring Agreement (MRA) Penandatanganan MRA dengan 7 bank dengan <u>outstanding</u> Rp21,9 triliun pada tahun 2021. Restrukturisasi Utang Anak Usaha - o WKR telah melakukan restrukturisasi - o WKI telah melakukan restrukturisasi - o WTR telah melakukan restrukturisasi dan relaksasi - o WSBP telah menerima putusan PKPU dan melakukan restrukturisasi GCG & Manajemen Risiko Waskita Karya telah membentuk Komite Investasi dan Manajemen Risiko	Divestasi Jalan Tol - o Jalan Tol Cimanggis – Cibitung - o Jalan Tol Kanci – Pejagan - o Jalan Tol Pejagan – Pemalang Penyelesaian Jalan Tol Khusus Menyelesaikan konstruksi tol khususnya Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung yang mendapatkan alokasi PMN sebesar Rp3,031 miliar dan progress fisik sampai dengan Desember 2022 sebesar 49,30%. Transformasi Bisnis Anggota dari PMO Perbaikan Kesehatan Keuangan BUMN Sektor Konstruksi dan Jalan Tol, dengan Sublim PMO sebagai berikut - o Financial & Risk Policy - o Penetapan Threshold untuk pembagian keputusan antara Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau RUPS (BUMN tertutup) - o Financial Dashboard - o Integrasi penggunaan ERP agar dapat digunakan juga oleh anak/cucu BUMN - o Specialization - o Penyusunan rencana fokus BUMN Karya dalam perolehan kontrak kedepannya - o Core Competency - o Peningkatan kompetensi pegawai BUMN Karya - o Asset Recycling Property Bertujuan untuk meningkatkan capaian penjualan atas persediaan aset (tanah/landed house/apartemen)
---	---

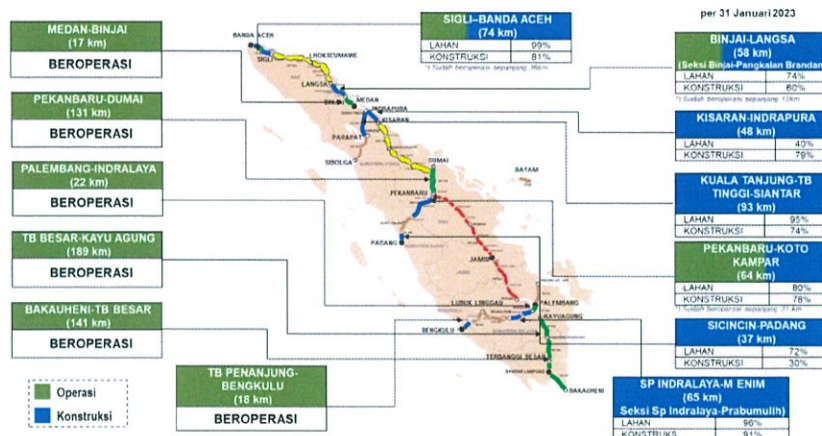
Pada tahun 2022, telah direncanakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk akan menerima PMN dari Pemerintah sebesar Rp3.000 miliar dengan skema rights issue. Namun, berdasarkan surat Keputusan Komite Tim Privatisasi nomor T/EK.5/322/M.EKON/12/2022 tanggal 28 Desember 2022, pelaksanaan rights issue ditinjau kembali sampai restrukturisasi keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk selesai.

DD. Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera

Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) merupakan penugasan Pemerintah kepada PT Hutama Karya (Persero) berdasarkan Peraturan Presiden No. 100 Tahun 2014 j.o. Peraturan Presiden No. 131 Tahun 2022. Pelaksanaan pembangunan JTTS sepanjang 2.749 km dibagi menjadi 4 tahap dengan detail sebagai berikut:

- Tahap I : Ruas telah beroperasi dan sisanya dalam tahap konstruksi serta ditargetkan akan selesai pada tahun 2023.
- Tahap II : Ruas backbone yang akan menghubungkan Palembang – Pekanbaru
- Tahap III : Ruas backbone lanjutan yang akan menghubungkan Pekanbaru – Aceh
- Tahap IV : Ruas feeder

Progres penyelesaian JTTS Tahap I sampai dengan 31 Januari 2023 secara detail sebagai berikut:



Dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera tersebut, PT Hutama Karya (Persero) tentunya menghadapi berbagai tantangan dimana tantangan terbesar yang dihadapi ialah pembiayaan proyek, dimana penyelesaian JTTS membutuhkan dukungan dana yang tidak sedikit. Namun, dalam hal ini

Pemerintah berupaya memberikan dukungan kepada PT Utama Karya (Persero) melalui pemberian PMN dari 2015 sampai dengan 2022 dengan total Rp83.658 miliar. Guna untuk mendukung penyelesaian pembangunan JTTS Tahap I rencananya PT Utama Karya (Persero) akan menerima PMN pada tahun 2023 sebesar Rp28.884 miliar dan mengusulkan tambahan PMN pada tahun 2024. Di samping itu, PT Utama Karya (Persero) juga direncanakan akan menerima PMN Non Tunai yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara berupa Aset Properti Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional pada Kementerian Keuangan yang prosesnya ditargetkan akan selesai di tahun 2023.

BB. Dukungan untuk UMKM melalui Program Penjaminan KUR

Peran UMKM di Indonesia sangat signifikan bagi perekonomian terutama dalam menciptakan lapangan kerja serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan. UMKM di negara berkembang termasuk di Indonesia umumnya memiliki karakteristik dengan jumlah yang sangat banyak, tersebar di seluruh daerah dan menyerap tenaga kerja atau padat karya. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah mencanangkan upaya peningkatan akses sumber pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui program Kredit Usaha Rakyat.

Kredit Usaha Rakyat, atau disingkat KUR, adalah kredit yang disalurkan oleh Lembaga Penyalur KUR berupa kredit pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada debitur individu perseorangan, badan usaha, dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Pelaksanaan KUR bertujuan untuk:

1. Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
2. Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Adapun salah satu program Pemerintah dalam mendorong program PEN dan program KUR tersebut, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020, dilakukan penambahan penyertaan modal negara kepada PT BPUI yang diteruskan kepada PT Askrindo dan PT Jamkrindo yaitu sebesar Rp6 Triliun. PT Askrindo dan PT Jamkrindo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjaminan, yang mana salah satu indikator utamanya adalah kinerja volume penjaminan.

Berikut merupakan realisasi Volume Penjaminan KUR PT Askrindo pada tahun 2022:

Keterangan	Kajian PMN	Realisasi s.d. TW IV 2022	%
KUR	Rp125 triliun	Rp164,91 triliun	131,93
<i>Gearing Ratio</i>	16,69 kali	10,64 kali	63,75

Berikut merupakan realisasi Volume Penjaminan KUR PT Jamkrindo pada tahun 2022:

Keterangan	Kajian PMN	Realisasi s.d. TW IV 2022	%
KUR	Rp125 triliun	Rp198,95 triliun	159,16
<i>Gearing Ratio</i>	16,74 kali	13,49 kali	80,59

Atas KUR yang disalurkan kepada penerima KUR, tentunya lembaga penyalur KUR mempunyai risiko finansial berupa risiko kredit macet. Untuk memitigasi risiko tersebut, maka dilakukanlah penjaminan KUR yang dilakukan oleh PT Askrindo dan PT Jamkrindo yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 105 Tahun 2016 tentang Penetapan Perusahaan Penjamin KUR. Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, skema penjaminan KUR dapat digambarkan sebagai berikut:



1. Pelaku Usaha mengajukan kredit kepada Bank Pelaksana (Lembaga Penyalur KUR).
2. Bank Pelaksana melakukan analisis kelayakan terhadap Pelaku Usaha dan apabila layak, maka dilakukan pemberian kredit.
3. Bank Pelaksana mengajukan penjaminan ke PT Askrindo/PT Jamkrindo.
4. PT Askrindo/PT Jamkrindo memberikan penjaminan kepada Bank Pelaksana.
5. Bank Pelaksana membayar Imbal Jasa Premi (IJP) kepada PT Askrindo/PT Jamkrindo atas Pelaku Usaha penerima KUR yang dijamin.

Selama tahun 2022, Keasdepan Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun memberikan dukungan melalui *monitoring* dan evaluasi atas penggunaan dana PMN Rp6 Triliun tersebut dengan surat yang disampaikan kepada Direksi PT BPUI (Persero), PT Askrindo, dan PT Jamkrindo setiap triwulan sebagai berikut:

1. Surat Nomor S-50/Wk2.MBU.B/05/2022 perihal Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Penggunaan Dana PMN sampai dengan Triwulan I 2022 PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) yang diteruskan kepada PT Asuransi Kredit Indonesia dan PT Jaminan Kredit Indonesia
2. Surat Nomor S-89/Wk2.MBU.B/08/2022 perihal Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Penggunaan Dana PMN sampai dengan Triwulan II 2022 PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) yang diteruskan kepada PT Asuransi Kredit Indonesia dan PT Jaminan Kredit Indonesia
3. Surat Nomor S-152/Wk2.MBU.B/11/2022 perihal Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Penggunaan Dana PMN sampai dengan Triwulan III 2022 PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) yang diteruskan kepada PT Asuransi Kredit Indonesia dan PT Jaminan Kredit Indonesia

CC. Dukungan Penyelamatan Pemegang Polis PT Jiwasraya (Persero)

Program penyelamatan pemegang polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero)/"PT Jiwasraya" didasarkan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perasuransian, yang merupakan bagian dari bentuk tanggung jawab Pemerintah selaku Pengendali/Pemegang Saham PT Jiwasraya yang mengalami permasalahan *insolvency*.

Sejalan dengan hal tersebut, Direksi PT Jiwasraya mengusulkan permohonan surat dukungan untuk Rencana Penyehatan Keuangan PT Jiwasraya melalui Surat Nomor 00263/Jiwasraya/U/0220 tanggal 18 Februari 2020 perihal Permohonan Surat Dukungan Terkait Rencana Penyehatan Jiwasraya. Menanggapi surat PT Jiwasraya tersebut, Wakil Menteri BUMN II melalui Surat Nomor S-10/Wk2.MBU/02/2020 perihal Surat Dukungan Rencana Penyehatan PT Asuransi Jiwasraya, menyampaikan dukungan atas rencana penyehatan perusahaan.

Selain itu, Menteri BUMN melalui Surat Nomor S-187/MBU/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 perihal Penugasan Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), telah memberikan penugasan kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/"PT BPUI" untuk membantu dan melakukan langkah-langkah yang dipandang perlu dalam Program Penyelamatan dan Penyehatan

(Restrukturisasi) PT Jiwasraya, yang salah satunya mendirikan anak perusahaan PT Asuransi Jiwa IFG/"IFG Life" yang akan menerima/mengelola eks kewajiban/Polis PT Jiwasraya hasil restrukturisasi.

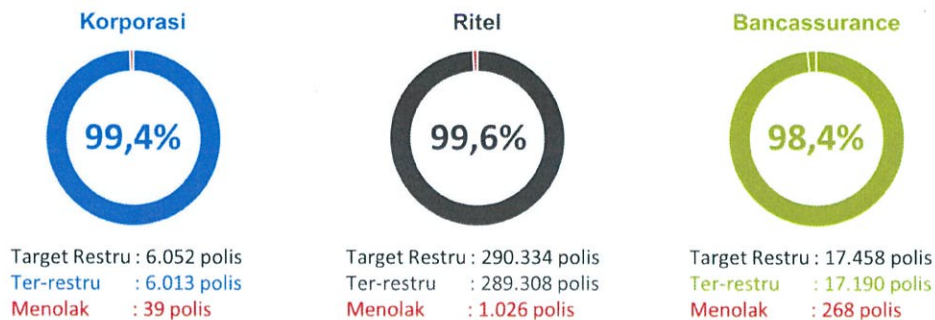
Selanjutnya, Direksi PT Jiwasraya mengirimkan Surat Nomor 00588/Jiwasraya/U/2020 perihal Penyampaian Perubahan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), yang menjadi dasar bagi Menteri BUMN dalam menyusun surat kepada Menteri Keuangan Nomor SR-178/MBU/03/2020 tentang Penyampaian Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang berisikan penyampaian RPK, informasi rencana pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN), serta usulan pembentukan tim gabungan lintas instansi pemerintah.

Direksi PT Jiwasraya kembali menyampaikan revisi buku RPK melalui Surat Nomor 01293/Jiwasraya/U/0720 tentang Permohonan Persetujuan Revisi Buku Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tanggal 24 Juli 2020, dimana perubahan dilakukan sesuai dengan usulan skema perubahan dari Tim Percepatan Restrukturisasi PT Jiwasraya. Selanjutnya, Menteri BUMN melalui Surat Nomor S-713/MBU/09/2020 tanggal 11 September 2020 perihal Perubahan Buku Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) selaku RUPS PT Jiwasraya telah memberikan persetujuan atas revisi Buku RPK PT Jiwasraya. Otoritas Jasa Keuangan/"OJK" melalui Surat Nomor S-449/NB.2/2020 tanggal 22 Oktober 2020 perihal Tanggapan atas Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), juga telah memberikan pernyataan tidak berkeberatan atas RPK PT Jiwasraya yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri BUMN sebagaimana di atas.

Program penyelamatan pemegang Polis PT Jiwasraya tersebut juga telah diputuskan melalui Rapat Koordinasi Perekonomian pada tanggal 14 September 2020 dengan agenda "Pembahasan Penyelamatan Polis dan Penyehatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero)"/"Rakortas" yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Jaksa Agung (diwakilkan), Wakil Menteri II BUMN, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kepala Badan Reserse Kriminal, dan pejabat pendamping lainnya, dimana Rakortas memutuskan bahwa skenario penyelamatan untuk Pemegang Polis PT Jiwasraya adalah restrukturisasi, *bail-in*, dan transfer.

Penjelasan atas skenario penyelamatan untuk Pemegang Polis PT Jiwasraya yang sudah dilakukan sampai dengan saat ini sebagai berikut:

1. Restrukturisasi, dilakukan oleh PT Jiwasraya yaitu dengan memberikan penawaran restrukturisasi polis (perubahan manfaat) kepada para pemegang polis sehingga polis yang nantinya akan dialihkan kepada IFG Life merupakan polis hasil restrukturisasi. Adapun hasil restrukturisasi polis sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:



2. *Bail-in*

PT BPUI telah melakukan pendirian IFG Life dengan dana awal sebesar Rp150 miliar dan selanjutnya PT BPUI sesuai dengan Kajian Bersama Penambahan Penyertaan Modal Negara Kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Tahun 2021 memerlukan penambahan dana untuk injeksi modal kepada IFG Life dalam rangka menerima pengalihan portofolio adalah sebesar Rp26,7 triliun. Adapun sumber pemenuhan dana tersebut berasal dari dana PMN sebesar Rp20 triliun dan *fundraising* yang dilakukan PT BPUI sebesar Rp6,7 triliun dengan realisasi sebagai berikut:

- a. Melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, surat Menteri Keuangan Nomor S-702/MK.06/2021 tanggal 8 Agustus 2021, serta Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, telah diberikan alokasi anggaran penambahan Penyertaan Modal Negara pada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PT BPUI) sebesar Rp20 Triliun. Selanjutnya pencairan dana PMN sebesar Rp20 triliun kepada PT

BPUI telah dilakukan pada 22 Oktober 2021 dan telah diteruskan kepada IFG Life pada 24 November 2021 sebagaimana persetujuan Menteri BUMN nomor S-850/MBU/11/2021 tanggal 16 November 2021 perihal Persetujuan Penyertaan Modal PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Kepada PT Asuransi Jiwa IFG.

- b. Pencairan dana *fundraising* sebesar Rp6,7 Triliun yang berasal dari *leveraging* dividen perusahaan anak berupa pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara ("Himbara") kepada PT BPUI telah dilakukan pada 25 Februari 2022 dan Kementerian BUMN telah memberikan persetujuan penambahan modal dari BPUI kepada IFG Life dari dana *fundraising* tersebut pada tanggal 25 April 2022 dan telah mendapat persetujuan dari OJK pada tanggal 22 Mei 2022 dan juga telah mendapatkan persetujuan dari Menteri BUMN nomor S-262/MBU/04/2022 tanggal 25 April 2022 perihal Persetujuan Penyertaan Modal PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Kepada PT Asuransi Jiwa IFG sebesar Rp6,7 Triliun.

3. Transfer dilakukan oleh PT Jiwasraya kepada IFG Life, yaitu dengan mengalihkan polis hasil restrukturisasi dan/atau polis lain yang telah memenuhi persyaratan untuk dialihkan kepada IFG Life termasuk dengan seluruh aset dan kewajiban kecuali portofolio yang menolak restrukturisasi.

Direksi PT Jiwasraya melalui surat nomor 01039/S/U/CSP/1021 tanggal 21 Oktober 2021 perihal Permohonan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tentang Persetujuan Pengalihan Portofolio Pertanggungan (Polis) yang diikuti dengan Pengalihan Aset dan Kewajiban Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya Kepada PT Asuransi Jiwa IFG dan Direksi PT BPUI melalui surat nomor 136/DIRUT/BPUI/XI/2021 tanggal 23 November 2021 perihal Permohonan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Untuk Menerima Pengalihan Portofolio Pertanggungan (Polls) Yang Diikuti Dengan Pengalihan Aset dan Kewajiban dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Kepada PT Asuransi Jiwa IFG Sebagai Anak Perusahaan dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), telah mengajukan persetujuan kepada Menteri BUMN selaku RUPS masing-masing untuk mengalihkan dan menerima liabilitas polis PT Jiwasraya ke IFG Life.

Selanjutnya Menteri BUMN melalui Surat Nomor S-851/MBU/11/2021 perihal Persetujuan Pengalihan Portofolio Pertanggungan (Polis) yang Diikuti dengan Pengalihan Aset dan Kewajiban PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada PT Asuransi Jiwa IFG, dan surat nomor S-945/MBU/12/2021 perihal Persetujuan atas Rencana PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Selaku

Pemegang Saham PT Asuransi Jiwa IFG untuk Memberikan Persetujuan kepada PT Asuransi Jiwa IFG dalam rangka Menerima Pengalihan Portofolio Pertanggungan (Polis) yang Diikuti dengan Pengalihan Aset dan Kewajiban dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada PT Asuransi Jiwa IFG/"IFG Life", telah menyetujui proses transfer sebagai berikut:

- a. PT Jiwasraya melakukan pengalihan dengan nilai buku atas Polis yang siap dialihkan kepada IFG Life secara bertahap sebanyak 230.322 (dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh dua) Polis dengan nilai buku per 30 Juni 2021 sebesar Rp33.018.125.953.769,- (tiga puluh tiga triliun delapan belas miliar seratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono sesuai laporannya nomor R-392/2.0752/AU.1/08/1014-1/1/IX/2021 tanggal 29 September 2021;
- b. PT Jiwasraya untuk melakukan pengalihan dengan nilai buku atas aset dan kewajiban PT Jiwasraya kepada IFG Life dengan nilai buku per 30 Juni 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono sesuai laporannya nomor: R-392/2.0752/AU.1/08/1014-1/1/IX/2021 tanggal 29 September 2021 secara bertahap, sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan yang mengikuti pengalihan Polis yang siap dialihkan.

Sejalan dengan rencana Pengalihan Portofolio Pertanggungan (Polis) yang Diikuti dengan Pengalihan Aset dan Kewajiban PT Jiwasraya kepada IFG Life tersebut, OJK telah memberikan persetujuan izin pengalihan polis (liabilitas) dari PT Jiwasraya kepada IFG Life melalui surat nomor:

- a. S-387/NB.2/2021 tanggal 10 Desember 2021 hal Pengalihan Portofolio Aset dan Liabilitas PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Kepada PT Asuransi Jiwa IFG, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa PT Jiwasraya akan mengalihkan portofolio pertanggungan kepada IFG Life pada Tahap I yaitu atas polis yang telah setuju restrukturisasi s.d. 30 Juni 2021 dan polis unit link dengan nilai buku per 30 Juni 2021 sebesar ±Rp33,02 triliun dengan total polis sebanyak 230.322 polis.
- b. S-243/NB.2/2022 tanggal 3 November 2022 Pengalihan Portofolio Pertanggungan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada PT Asuransi Jiwa IFG yang pada pokoknya menyampaikan bahwa OJK menyetujui pengalihan polis PT Jiwasraya kepada IFG Life pada Tahap II dengan nilai buku per 31 Agustus 2022 sebesar Rp1,17 triliun dengan total polis sebanyak 351 polis yang telah setuju restrukturisasi.

Sebagai tindak lanjut penyelesaian Pengalihan Portofolio Pertanggungan (Polis) yang Diikuti dengan Pengalihan Aset dan Kewajiban PT Jiwasraya kepada IFG Life, telah dilaksanakan Rapat Internal yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 September 2022 tentang Program Penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala BPKP dan pejabat lainnya. Pada pokoknya, Presiden RI telah memberikan arahan agar mempercepat proses transfer Polis PT Jiwasraya kepada IFG Life.

Adapun capaian atas proses Pengalihan Polis yang Diikuti dengan Pengalihan Aset dan Kewajiban PT Jiwasraya kepada IFG Life sampai dengan *unaudited* 31 Desember 2022, sebagai berikut:

- a. Polis yang telah dialihkan kepada IFG Life sebanyak 157.312 Polis yang dimiliki 391.381 peserta dengan nilai liabilitas sebesar $\pm$ Rp30,8 triliun.
- b. Polis yang belum dialihkan kepada IFG Life sebanyak 155.199 Polis yang dimiliki 1.379.017 peserta dengan nilai liabilitas sebesar $\pm$ Rp6,8 triliun yang terdiri dari:
 - 1) 54.219 Polis yang dimiliki 133.849 peserta dengan nilai liabilitas sebesar $\pm$ Rp4,0 triliun telah mendapatkan persetujuan pengalihan ke IFG Life dari OJK. Termasuk di dalamnya yaitu Polis yang baru saja mendapatkan ijin pengalihan dari OJK melalui surat nomor S-243/NB.2/2022 tanggal 3 November 2022 sebanyak 351 Polis dengan nilai liabilitas sebesar Rp1,17 triliun.
 - 2) 100.980 Polis yang dimiliki 1.245.158 peserta dengan nilai liabilitas sebesar $\pm$ Rp2,8 triliun yang sedang diajukan persetujuan ijin pengalihannya ke OJK.
- c. Aset PT Jiwasraya yang telah dialihkan kepada IFG Life sampai dengan *unaudited* 31 Desember 2022 sebesar $\pm$ Rp7,9 triliun yang terdiri dari Aset Finansial sebesar $\pm$ Rp3,3 triliun dan Aset Non Finansial sebesar $\pm$ Rp4,6 triliun.
- d. Adapun progres pengalihan sebagaimana uraian di atas disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Aset	Telah Dialihkan		Belum Dialihkan	Liabilitas	Telah Dialihkan			Belum Dialihkan		
	Nilai Aset	Nilai Aset			Polis	Peserta	Liabilitas	Polis	Peserta	Liabilitas*
 Aset Finansial	Rp3,3 T	Rp2,9 T		Korporasi	1.168	235.237	Rp14,1 T	4.845	1.228.653	Rp5,1 T
 Aset Non Finansial	Rp4,6 T	Rp0,9 T		Ritel	139.251	139.251	Rp6,6 T	150.057	150.057	Rp1,6 T
 PMN & Fundraising	Rp26,7 T	-		Bancassurance	16.893	16.893	Rp10,1 T	297	297	Rp0,1 T
Total Aset	Rp34,6 T	Rp3,8 T		Total	157.312	391.381	Rp30,8 T	155.197	1.379.007	Rp6,8 T

Kategori	Telah Mendapat Izin OJK			Belum Mendapat Izin OJK		
	Polis	Peserta	Liabilitas*	Polis	Peserta	Liabilitas*
 Korporasi	849	80.479	Rp3,0 T	3.996	1.148.174	Rp2,2 T
 Ritel	53.344	53.344	Rp1,04 T	96.713	96.713	Rp0,5 T
 Bancassurance	26	26	Rp0,02 T	271	271	Rp0,1 T
Liabilitas belum dialihkan	54.219	133.849	Rp4,0 T	100.980	1.245.158	Rp2,8 T

*Nilai liabilitas terdiri dari cadangan premi dan utang klaim, nilai liabilitas yang belum dialihkan menggunakan nilai buku Jiwasraya per 31 Des '22

DD. Dukungan Perbaikan Kinerja PT ASABRI (Persero)

Pada tahun 2021, PT ASABRI (Persero)/"PT ASABRI" menyusun Rencana Penyehatan Keuangan PT ASABRI (Persero)/"RPK" yang berisikan lima strategi yang telah dijalankan secara bertahap. RPK tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PT ASABRI pada Rapat Koordinasi Terbatas/"Rakortas" Tingkat Menteri pada tanggal 26 Maret 2021 dengan pokok bahasan "Menerima Paparan Direktur Utama PT ASABRI terkait Penyelesaian Permasalahan ASABRI", yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dan dihadiri oleh: Menteri Pertahanan (diwakili oleh Wakil Menteri Pertahanan dan Irjen Kementerian Pertahanan); Menteri Keuangan; Menteri Badan Usaha Milik Negara; Sesmenko Polhukam; Deputi Bidkooor Kumham Kementerian Polhukam; dan Direktur PT ASABRI.

Kemudian, Direktur Utama PT ASABRI mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan B/AP.01/1404-AS/II/2021 tanggal 2 Juli 2021 dan surat kepada Menteri BUMN Nomor B/AP.01/1663-AS/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 perihal Permohonan Dukungan atas Strategi Penyehatan Keuangan PT ASABRI (Persero). Atas surat tersebut, Menteri BUMN menyampaikan dukungan atas RPK melalui surat kepada Menteri Keuangan Nomor S-745/MBU/09/2021 tanggal 28 September 2021 perihal Dukungan atas Strategi Penyehatan Keuangan PT ASABRI (Persero). Berlandaskan pada RPK tersebut, penyehatan keuangan PT ASABRI telah dilaksanakan hingga pada tahun 2022 ini. Adapun rincian perkembangan dari penyehatan keuangan PT ASABRI selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:



*Inisiatif keenam akan dibahas lebih lanjut pada poin D di bab ini

1. Perbaikan Tata Kelola Perusahaan

Dalam rangka upaya penyehatan PT ASABRI, langkah pertama yang dilakukan adalah penguatan fondasi perusahaan dengan cara melakukan perbaikan tata kelola perusahaan. Perbaikan yang dilakukan yaitu pada aspek investasi yang merupakan salah satu proses inti dalam industri asuransi yang saat ini sedang mengalami permasalahan dan harus segera dilakukan perbaikan. Langkah yang dilakukan yaitu dengan melakukan penyelarasan secara internal terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), penambahan matriks analisis, serta integrasi *platform* investasi. Melalui perbaikan pada aspek tersebut, diharapkan investasi perusahaan akan dilakukan dengan tata kelola yang lebih baik. Berikut adalah beberapa proses yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut:

- a. Melakukan pembaharuan pedoman pelaksanaan investasi dan kebijakan investasi, salah satunya perubahan Anggaran Dasar sebagaimana telah disetujui oleh Menteri BUMN melalui surat nomor S-430/MBU/06/2021 tanggal 23 Juni 2021 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT ASABRI (Persero).
- b. Adapun Pedoman Pelaksanaan Investasi dan Kebijakan Investasi sedang dalam proses pembaharuan oleh Manajemen PT ASABRI. Sampai dengan Desember 2022, telah dilakukan *update* dan penyesuaian kembali dengan SOP agar selaras dengan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Investasi.

Untuk selanjutnya, apabila telah mendapat izin prinsip dan tanggapan, akan dilakukan pembahasan bersama tim kelompok kerja yang telah dibentuk. Perihal metodologi valuasi saham yang tidak aktif di PT ASABRI akan dituangkan ke dalam pedoman pelaksanaan investasi.

2. Sinergi Kluster Asuransi dan Dana Pensiun

Program kluster bertujuan untuk memaksimalkan sumber daya yang ada di masing-masing BUMN. Menteri BUMN dalam RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2022 telah menargetkan dalam *Key Performance Indicator* (KPI) PT ASABRI Tahun 2022, salah satunya yaitu sinergi kluster Asuransi dan Dana Pensiun antara PT ASABRI dan PT Taspen. Adapun pencapaian sinergi kluster asuransi dan dana pensiun antara PT ASABRI dan PT Taspen tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan program *housing benefit* bersama *cluster* melalui sinergi TASPEN Group dan PT ASABRI. Adapun sampai dengan Desember 2022, telah ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama antara PT ASABRI dan PT Taspen Properti nomor SPKS/HK.02/236-AS/XII/2022 dan nomor 80/HK.810/TP-000/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang *Housing Benefit* untuk Peserta PT ASABRI (Pesero);
- b. Telah dilaksanakan sosialisasi dan penyusunan laporan penggunaan *knowledge management platform* melalui Liber-T, Yammer, dan Simple Taspen yang diakses oleh Taspen dan ASABRI. Kegiatan dimaksud telah diselesaikan pada bulan Juli 2022;
- c. Implementasi pembelajaran modul *training* oleh 800 karyawan PT Taspen dan 250 karyawan PT ASABRI;
- d. Terlaksananya *cross assignment* bersama antara PT Taspen dan PT ASABRI dengan modul-modul yang telah disepakati, adapun perwakilan dari PT ASABRI 3 orang dan PT Taspen 2 orang. Kegiatan tersebut telah diselesaikan pada tanggal 31 Oktober 2022;
- e. Penyusunan *Investment Charter*, telah dilakukan proses reviu dan penandatanganan *investment charter* yang dirumuskan pada tahun 2021, selanjutnya menyusun dan menuangkan hasil monitoring implementasi yang telah disetujui kedua belah pihak pada tanggal 8 Desember 2022;
- f. Layanan bersama melalui Mall Pelayanan Publik (MPP) Telah dilakukan pembahasan *project charter* dan *timeline project* pada tanggal 4 Februari 2022. Implementasi layanan informasi PT Taspen dan PT ASABRI tersebut sampai dengan Tahun 2022 telah terlaksana di 11 titik layanan MPP yaitu

Tasikmalaya, Badung, Pati, Purworejo, Epicentrum, Tuban, Banjarbaru, Tebing Tinggi, Maros, Banyuwangi, dan Bogor;

- g. Telah dilaksanakan sosialisasi *merchant* BULOG sebanyak 32 kali dari target 10 kali sosialisasi yang dilaksanakan di Kantor Cabang;
- h. PKS dengan PT Taspen Life untuk pengembangan produk Taspen Dwiguna Sejahtera (TDS). Pada tanggal 15 Desember 2022 telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara PT ASABRI dengan PT Taspen Life Nomor PERJ-056/TL/122022 dan Nomor SPKS/HK.02/229-AS/XII/2022 tentang Pemasaran Produk Asuransi Taspen Life Taspen Dwiguna Sejahtera (TDS);
- i. Adanya menu antrian digital pada aplikasi layanan digital (TOOS Taspen dan ASABRI Mobile Apps), adapun saat ini telah ditandatangani Berita Acara *User Acceptance Testing* (UAT) menu sistem antrian online MPP ASABRI dan Taspen pada TOOS dan ASABRI *Mobile Apps* pada tanggal 28 September 2022;
- j. Penyusunan dan penandatanganan *Business Continuity Management* (BCM) *charter* antara Taspen dan ASABRI pada tanggal 31 Oktober 2022.

3. Pemulihan Aset (*Asset Recovery*)

Perusahaan terus mengupayakan putusan pengadilan agar dapat mengoptimalkan pemulihan atas aset sita pengadilan, terjalannya kerja sama restrukturisasi aset non-produktif dan terealisasinya transaksi penjualan aset non-produktif PT ASABRI. Sampai saat ini proses hukum terhadap beberapa terdakwa tindak pidana korupsi masih berjalan di pengadilan dan kemungkinan *inkracht* pada akhir tahun 2022 sampai dengan 2023.

Adapun dukungan terkait pemulihan aset telah disampaikan oleh Menteri BUMN kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui Surat Nomor S-701/MBU/11/2022 tanggal 1 November 2022 perihal Permohonan Dukungan dalam rangka Pemulihan Aset PT ASABRI (Persero) dan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia Surat Nomor S-702/MBU/11/2022 tanggal 1 November 2022 perihal Permohonan Dukungan dalam rangka Pemulihan Aset PT ASABRI (Persero), yang keduanya mengenai permohonan dukungan terkait proses pemulihan aset PT ASABRI yang memiliki tanah dan/atau bangunan yang merupakan *underlying* Reksa Dana Penyertaan Terbatas EMCO *Property Fund* (RDPT EMCO) yang seluruhnya berstatus disita dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan terdakwa Benny Tjokrosaputro dalam perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

4. Penetapan dan Pembayaran *Unfunded Past Service Liability* (UPSL)

Sehubungan dengan Surat dari PT ASABRI kepada Menteri Keuangan dengan Nomor Surat R/AP.01/59-AS/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 perihal Permohonan Kontribusi Pemerintah atas *Unfunded Past Service Liability* (UPSL) Program Tabungan Hari Tua (THT) PT ASABRI (Persero) dan juga Surat Menteri BUMN kepada Menteri Keuangan Nomor S-745/MBU/09/2021 perihal Dukungan atas Strategi Penyehatan Keuangan PT ASABRI (Persero), Menteri Keuangan memberikan persetujuan atas Penetapan UPSL Program THT pada PT ASABRI melalui Surat Menteri Keuangan kepada PT ASABRI (Persero) Nomor S-56/MK.02/2022 perihal Penetapan *Unfunded Past Service Liability* Program Tabungan Hari Tua pada PT ASABRI (Persero).

Menteri Keuangan menyatakan bahwa berdasarkan hasil penghitungan dengan menggunakan metode, asumsi, dan data peserta yang disetujui oleh Menteri Keuangan, besaran UPSL Program THT pada PT ASABRI (Persero) per 1 Januari 2013 sebagai akibat dari perubahan formula sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Besar Manfaat Asuransi Asabri, ditetapkan sebesar Rp4.550.263.772.727,00. Selain itu, penetapan/pengakuan atas UPSL program THT tersebut menjadi dasar pengungkapan dan pencantuman dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, dan Laporan Keuangan PT ASABRI (Persero). Adapun pengalokasian dan pembayaran UPSL program THT ini akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi keuangan negara.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-914/MK.02/2022 tanggal 4 November 2022 perihal Rencana Pembayaran *Unfunded Past Service Liability* Program Tabungan Hari Tua PT Asabri (Persero), terdapat pembayaran atas UPSL dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bulan November 2022 dibayarkan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
- b. Bulan Desember 2022 dibayarkan sebesar Rp1.280.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh miliar rupiah).

5. Penyesuaian Bunga Aktuaria

Menteri Keuangan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana dengan mulai berlakunya PMK tersebut, penetapan metode dan asumsi dalam penghitungan Kewajiban Manfaat Pasti

Polis Masa Depan (KMPMD), termasuk penetapan bunga aktuarial Program THT dilakukan oleh Menteri Keuangan. Pada pasal 22, ditetapkan bahwa perhitungan kewajiban manfaat polis masa depan program Tabungan Hari Tua (THT) menggunakan metode dan asumsi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Menindaklanjuti hal tersebut, PT ASABRI telah melakukan kajian internal dan telah mengajukan permohonan persetujuan metode dan asumsi dalam perhitungan kewajiban manfaat polis masa depan program THT kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Direksi Utama ASABRI Nomor B/AP.01/1404/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021. Berdasarkan Surat Direksi PT ASABRI tersebut, Menteri BUMN memberikan dukungan penyehatan keuangan PT ASABRI kepada Menteri Keuangan melalui Surat Nomor S-745/MBU/09/2021 tanggal 28 September 2021 perihal Dukungan atas Strategi Penyehatan Keuangan PT ASABRI (Persero), dimana salah satunya permintaan persetujuan Menteri Keuangan untuk memberikan penetapan bunga aktuarial PT ASABRI sebesar 9,7%.

Menteri Keuangan melalui surat nomor S-8/MK.02/2022 tanggal 3 Januari 2022 perihal Persetujuan Metode dan Asumsi dalam Perhitungan Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan Program THT Prajurit TNI, Anggota POLRI dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI, telah menyetujui penggunaan bunga aktuarial sebesar 9,7% sehingga dapat meningkatkan solvabilitas PT ASABRI secara signifikan.

EE.Dukungan Perbaikan Program Tabungan Hari Tua (THT) yang diselenggarakan PT ASABRI (Persero) dan PT Taspen (Persero)

Sehubungan dengan surat Direktur Utama PT ASABRI (Persero) Nomor B/PR.03.01/1909-AS/IX/2021 tanggal 17 September 2021 perihal Penyampaian Analisa Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua (THT) PT ASABRI (Persero) dan surat Direktur Utama PT Taspen (Persero) Nomor SRT-266/DIR.1/09/2021 tanggal 21 September 2021 perihal Analisis Kinerja Program Tabungan Hari Tua (THT) PT Taspen (Persero), disampaikan bahwa terdapat permasalahan yang muncul dalam Program Tabungan Hari Tua (THT) yang diselenggarakan PT ASABRI (Persero) dan PT Taspen (Persero) yaitu tingkat *claim ratio* Program THT yang cukup tinggi dan diproyeksikan akan mengalami tren peningkatan kedepannya. Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya/peningkatan *claim ratio* tersebut antara lain:

1. Penetapan besaran iuran premi program THT sebesar 3,25% belum pernah mengalami perubahan sejak tahun 1974 pada PT ASABRI dan sejak tahun 1981 pada PT Taspen.
2. Adanya perubahan formulasi atau skema manfaat asuransi yang terjadi pada PT ASABRI mulai tahun 2013 dan PT Taspen mulai tahun 2016 yang menambah manfaat bagi Peserta dan berdampak pada peningkatan kewajiban pembayaran manfaat oleh penyelenggara program.
3. Jumlah peserta yang akan mencapai Batas Usia Pensiun dalam beberapa tahun ke depan masih cukup tinggi.

Menindaklanjuti hal tersebut, PT ASABRI (Persero) dan PT Taspen (Persero) telah melakukan kajian atas kinerja Program THT dengan tujuan untuk perbaikan Program THT melalui penyesuaian iuran premi guna menjaga keberlangsungan penyelenggaraan Program THT dan menjaga tingkat solvabilitas dan liabilitas dapat lebih proporsional dan terukur.

Sehubungan dengan usulan dari PT ASABRI (Persero) dan PT Taspen (Persero) tersebut, Menteri BUMN menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan melalui Surat Nomor S-927/MBU/12/2021 tanggal 6 Desember 2021 perihal Perbaikan Program Tabungan Hari Tua PT ASABRI (Persero) dan PT Taspen (Persero) yang menjelaskan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan perlunya perbaikan Program THT antara lain besaran iuran program THT yang belum pernah mengalami perubahan sebesar 3,25%, perubahan formulasi atau skema manfaat asuransi yang menambah manfaat bagi Peserta yang berdampak pada peningkatan kewajiban pembayaran manfaat, *claim ratio* PT ASABRI (Persero) dan PT Taspen (Persero) yang mencapai lebih dari 100%, proyeksi *claim ratio* yang akan terus meningkat hingga 10 tahun mendatang, penurunan saldo aset Program THT dikarenakan sebagian aset Program THT digunakan untuk pembayaran klaim yang nilainya relatif melebihi nilai iuran dan hasil investasi yang diterima, serta adanya risiko tindakan investasi apabila portofolio investasi ditempatkan pada portofolio yang memiliki *return* yang tinggi namun juga memiliki profil risiko yang tinggi dalam rangka memenuhi selisih antara iuran dan pembayaran manfaat. Surat tersebut juga memuat usulan perbaikan Program THT yang diselenggarakan oleh PT ASABRI (Persero) dan PT Taspen (Persero) terutama pada penyesuaian iuran yang dilakukan untuk menjaga keberlangsungan penyelenggaraan program THT.

Selanjutnya, pada tahun 2022 Menteri BUMN kembali menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan melalui Surat Menteri BUMN Nomor S-763/MBU/11/2022 tanggal 23 November 2022 perihal Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKm) pada PT ASABRI

(Persero) dan PT Taspen (Persero) untuk dapat mengakomodir rekomendasi hasil kajian dalam rangka upaya perbaikan terhadap Program THT PT ASABRI (Persero) dan PT Taspen (Persero) khususnya melalui penyesuaian besaran iuran serta evaluasi terhadap Program JKK dan JKm yang diselenggarakan PT ASABRI (Persero) dan PT Taspen (Persero). Selain itu, Kementerian BUMN senantiasa mendorong pelaksanaan penyelenggaraan program THT, JKK, dan JKm pada PT ASABRI (Persero) dan PT Taspen (Persero) untuk selalu dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

FF. Dukungan Penyehatan Keuangan PT Jasindo

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/“POJK” Nomor 71/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 27/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, mengatur mengenai Tingkat Kesehatan (solvabilitas) perusahaan asuransi umum yang semestinya, dimana pada Pasal 3 ayat 3 tentang Tingkat Solvabilitas (*Risk Based Capital*/"RBC") menyatakan bahwa "Target Tingkat Solvabilitas internal ditetapkan paling rendah 120% (seratus dua puluh persen) dari MMBR dengan memperhitungkan profil risiko setiap Perusahaan serta mempertimbangkan hasil simulasi skenario perubahan (*stress test*)."

Posisi RBC PT Asuransi Jasa Indonesia/"PT Jasindo" per 30 November 2021 mengalami tingkat solvabilitas di bawah ketentuan OJK, yaitu sebesar minus 94,74%. Oleh karena itu, PT Jasindo diwajibkan membuat Rencana Penyehatan Keuangan/"RPK" berdasarkan Pasal 50 ayat 1 POJK Nomor 71/POJK.05/2016, dimana didalamnya telah memuat inisiatif strategis untuk perbaikan tingkat solvabilitas perusahaan yang disertai dengan periode waktunya.

Berikut adalah langkah penyehatan keuangan Jasindo berdasarkan dokumen RPK:

1. Restrukturisasi Portofolio Lini Bisnis Asuransi Kredit
2. Keberlangsungan bisnis PT Jasindo serta pengelolaan program Pemerintah
3. Pengajuan Izin Produk Asuransi yang Dipasarkan
4. Optimalisasi Penagihan Hak Subrogasi Klaim
5. Penjualan dan Optimalisasi Aset Tetap

Adapun berikut ini merupakan *output* dari dukungan Kementerian BUMN dalam proses penyehatan keuangan PT Jasindo:

1. Dukungan Strategi Bisnis

Output dukungan Kementerian BUMN terkait dukungan strategis bisnis adalah sebagai berikut:

- a. Surat Nomor S-318/MBU/05/2022 tanggal 17 Mei 2022 kepada: (1) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.; (2) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.; (3) PT Bank Negara Indonesia Tbk.; dan (4) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. menyampaikan permohonan dukungan untuk membantu program penyehatan dan perbaikan kinerja PT Jasindo dengan tetap dapat mempertimbangkan pemberian fasilitas *commercial line* yang sebagian besar akan digunakan untuk mendukung pendanaan proyek/program kegiatan yang diperoleh maupun program dan kegiatan lainnya yang pelaksanaannya didukung oleh PT Jasindo.
- b. Surat Nomor S-319/MBU/05/2022 tanggal 17 Mei 2022 kepada Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi/"SKK Migas", menyampaikan permohonan dukungan untuk dapat membantu program penyehatan dan perbaikan kinerja PT Jasindo dengan menjaga terjalinnya kerja sama antara SKK Migas dengan PT Jasindo yang selama ini telah berjalan dengan baik serta tetap mempercayakan program penutupan asuransinya kepada PT Jasindo.
- c. Surat Nomor S-320/MBU/05/2022 tanggal 17 Mei 2022 kepada Direksi Pemegang Polis PT Jasindo, menyampaikan permohonan dukungan atas program penyehatan dan perbaikan kinerja PT Jasindo dengan menjaga terjalinnya kerja sama dengan PT Jasindo yang selama ini telah berjalan dengan baik serta tetap mempercayakan program penutupan asuransinya kepada PT Jasindo, termasuk mendorong perusahaan terkonsolidasi dan afiliasi untuk mendukung program tersebut.

2. Dukungan Persetujuan Aksi Korporasi

Persetujuan aksi korporasi sesuai dengan langkah penyehatan keuangan Jasindo yang tertuang pada RPK. Persetujuan Kementerian BUMN adalah sebagai berikut:

- a. Pelepasan kepemilikan saham PT Jasindo di PT Asuransi Jiwa In Health sebesar 10% senilai ±Rp200 miliar. Inisiatif ini telah mendapatkan persetujuan dari Bapak Menteri BUMN melalui Surat Nomor S-211/MBU/04/2022 tanggal 4 April 2022 perihal Persetujuan Pelepasan Penyertaan Modal Saham PT Asuransi Jiwa Indonesia pada PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia dan Nomor S-346/MBU/06/2022 tanggal 2 Juni 2022 perihal

- b. Pelepasan kepemilikan saham PT Jasindo di PT Asuransi Tokio Marine Indonesia sebesar 20% senilai ±Rp509 miliar. Inisiatif ini telah mendapatkan persetujuan dari Bapak Menteri BUMN melalui surat nomor S-711/MBU/11/2022 tanggal 2 November 2022 perihal Persetujuan Pelepasan 20% saham pada PT Asuransi Tokio Marine Indonesia oleh PT Asuransi Jasa Indonesia;
- c. Pemberian pinjaman Subordinasi dari PT BPUI kepada PT Jasindo melalui surat nomor S-871/MBU/12/2022 tanggal 23 Desember 2022 hal Persetujuan Tindakan Direksi PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) di luar Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2022 dalam rangka Pemberian Pinjaman Subordinasi kepada PT Asuransi Jasa Indonesia dan KPPS nomor SK-294/MBU/12/2022 tanggal 23 Desember 2022 perihal Persetujuan Tindakan di Luar Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dalam Menerima Pinjaman Subordinasi
- d. Pembelian Aset Tetap PT Jasindo oleh PT Jamkrindo melalui surat nomor SK-1/Wk2.MBU/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 Persetujuan Pembelian Aset Tetap Jasindo oleh Jamkrindo dan SK-2/Wk2.MBU/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 Persetujuan Penghapusbukuan dan Penjualan Aset Tetap Jasindo.

Berdasarkan inisiatif-inisiatif tersebut, posisi RBC PT Jasindo per *unaudited* 31 Desember 2022 mengalami peningkatan tingkat solvabilitas, yaitu sebesar 137,21% sehingga telah memenuhi batas minimal RBC yang dipersyaratkan oleh OJK.

BAB V

PENUTUP

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Wakil Menteri BUMN II Tahun 2022 merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Wakil Menteri BUMN II yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan memperhatikan Peraturan Menteri BUMN nomor PER-04/MBU/03/2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
2. Hasil pengukuran terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Wakil Menteri BUMN II tahun 2022 menunjukkan bahwa capaian kinerja secara umum dapat dikategorikan Sangat Memuaskan dengan skor NKO sebesar 103,60 yang tercermin dalam tingkat capaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran program. Dari 13 IKU, tercapai 10 IKU, dengan IKU yang tidak tercapai adalah Penyelesaian Program Restrukturisasi (Pembentukan *Holding*) Klaster BUMN, Penyelesaian Target IPO/Tambahan Nilai Penawaran, serta Implementasi Model Bisnis yang terintegrasi oleh BUMN. Pada tahun 2022, proses pelaksanaan program tersebut sudah berjalan, namun diperlukan penelaahan dan tindak lanjut penyelesaian. Beberapa program telah masuk ke dalam prioritas untuk dapat segera diselesaikan pada tahun 2023.
3. Tantangan yang dihadapi di tahun 2022, yaitu adanya kenaikan harga BBM, kenaikan suku bunga, serta konflik Rusia-Ukraina yang secara tidak langsung menimbulkan efek domino bagi perekonomian dan berdampak pada terjadinya inflasi, sehingga memengaruhi biaya produksi dan operasional perusahaan. Namun, dengan kondisi perekonomian yang kian pulih paska pandemi Covid-19 serta dengan berbagai strategi yang dilakukan perusahaan membuat kinerja perusahaan kian cemerlang yang tercermin pada peningkatan capaian *Net Profit*, *Return on Equity* (ROE), dan *EBITDA Margin* pada BUMN di bawah binaan Wakil Menteri II dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
4. LKIP ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban Wakil Menteri BUMN II untuk menyajikan akuntabilitas kinerja sebagai bagian dari lembaga negara maupun lembaga publik. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bahan perbaikan dan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan perubahan berkesinambungan yang lebih baik di masa mendatang.

5. Disusunnya LKIP ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan transparan baik kepada Pimpinan maupun seluruh pihak terkait mengenai tugas dan fungsi Wakil Menteri BUMN II, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat maupun kepada berbagai pihak yang berkepentingan.

LAMPIRAN
LAPORAN KINERJA AKUNTABILITAS
WAKIL MENTERI BUMN II

1. Lampiran Perjanjian Kinerja Wamen II



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA WAKIL MENTERI BUMN II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kartika Wirjoatmodjo

Jabatan : Wakil Menteri BUMN II

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Erick Thohir

Jabatan : Menteri BUMN

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Desember 2021

Pihak Kedua,
Menteri BUMN

Pihak Pertama,
Wakil Menteri BUMN II

Erick Thohir

Kartika Wirjoatmodjo
NIP. Wamen-02

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Wakil Menteri BUMN II
Tahun Anggaran : 2022

No	Prioritas Kementerian BUMN	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022
1	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia	SS9	Net Profit	Rp Triliun	115
			EBITDA Margin	%	32,52
			Return on Equity	%	9,13%
		SS8	Jumlah Nasabah Aktif Mekaar	Jumlah Nasabah	12.014.328
2	Inovasi Model Bisnis	SS6	Jumlah Negara Tujuan Ekspor	Jumlah Negara	11
		SS4	Penyelesaian Program Restrukturisasi (Pembentukan Holding) Klaster BUMN	Jumlah Program	3
			Penyelesaian Target IPO/Tambahan Nilai Penawaran BUMN/Anak Usaha BUMN di Pasar Modal	Jumlah Perusahaan	6
3	Kepemimpinan Teknologi	SS5	Implementasi Program Digitalisasi oleh BUMN	Jumlah BUMN	4
			Implementasi Model Bisnis yang terintegrasi oleh BUMN	Jumlah BUMN	6
4	Peningkatan Investasi	SS8	% Total Realisasi Capex	%	76
			Pencapaian Target Proyek dan Program Strategis Nasional	%	61
5	Pengembangan Talenta	SS1	% Milenial (<42 tahun) dalam Nominated Talent	%	11
			% Perempuan dalam Nominated Talent	%	12

Program

Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan BUMN

Anggaran

Rp5.700.000.000,-

Pihak Kedua,
Menteri BUMN

Erick Thohir

Jakarta, 17 Desember 2021
Pihak Pertama,
Wakil Menteri BUMN II

Kartika Wirjoatmodjo
NIP. Wamen-02

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

2. Lampiran Renaksi & trajectory target Wamen II



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

RENCANA AKSI DAN TRAJECTORY TARGET
PERJANJIAN KINERJA
WAKIL MENTERI BUMN II

No	Prioritas Kementerian BUMN	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Trajectory Target				Rencana Aksi
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia	SS9	Net Profit	Rp. Triliun	115	58	53	83	115	Mendorong pencapaian <i>net profit</i> , EBITDA margin, ROE, dan kontribusi pajak dan PNB lainnya dengan mengoptimalkan <i>revenue stream</i> , meningkatkan efisiensi biaya serta melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Perusahaan secara periodik.
			EBITDA Margin	%	32,52	54,93	32,89	32,81	32,52	
			Return on Equity	%	9,13	5,61	4,92	7,14	9,13	
2	Inovasi Model Bisnis	SS8	Jumlah Nasabah Aktif Mekaar	Jumlah Nasabah	12.014.328	10.942.943	11.329.321	11.643.718	12.014.328	Mendorong penyaluran kredit kepada nasabah PAM Mekaar dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta didukung dengan implementasi manajemen risiko yang matang.
			Jumlah Negara Tujuan Ekspor	Jumlah Negara	11	9	11	11	11	Mendorong pengembangan usaha BUMN di pasar internasional melalui ekspor hasil produksinya.
			Penyelesaian Program Restrukturisasi (Pembentukan Holding) Klaster BUMN	Jumlah Program	3	0	1	1	3	Mendorong penyelesaian program restrukturisasi BUMN, salah satunya melalui pembentukan holding Klaster BUMN.
2	Inovasi Model Bisnis	SS4	Penyelesaian Target IPO/Tambahan Nilai Penawaran	Jumlah Perusahaan	6	0	2	3	6	Melaksanakan <i>project unlock value</i> sesuai target <i>indicative timeline</i> yang ditentukan melalui IPO/ Tambahan Nilai

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

No	Prioritas Kementerian BUMN	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Trajectory Target				Rencana Aksi
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
3	Kepemimpinan Teknologi	SS5	BUMN/Anak Usaha BUMN di Pasar Modal							Penawaran BUMN/Anak Usaha BUMN di Pasar Modal.
			Implementasi Program Digitalisasi oleh BUMN	Jumlah BUMN	4	0	0	1	4	Mendorong percepatan serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program digitalisasi BUMN.
			Implementasi Model Bisnis yang terintegrasi oleh BUMN	Jumlah BUMN	6	0	1	1	6	Mendorong penerapan model bisnis terintegrasi dan meningkatkan sinergi BUMN.
4	Peningkatan Investasi	SS8	% Total Realisasi Capex	%	76	17	32	51	76	Mendorong percepatan realisasi belanja modal melalui: • Monitoring program belanja modal perusahaan secara berkala. • Memberikan dukungan koordinasi kebijakan dengan stakeholders terkait.
			Pencapaian Target Proyek dan Program Strategis Nasional	%	61	36	44	53	61	Mendorong pencapaian target proyek dan program strategis nasional, melalui: • Monitoring proyek dan program strategis nasional secara berkala. • Memberikan dukungan koordinasi kebijakan dengan stakeholders terkait.
5	Pengembangan Talenta	SS1	% Milenial (≤ 42 tahun) dalam Nominated Talent	%	11	-	-	-	11	Meningkatkan persentase pekerja milenial dalam populasi Nominated Talent.

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

No	Prioritas Kementerian BUMN	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Trajectory Target				Rencana Aksi
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
			% Perempuan dalam Nominated Talent	%	12	-	-	-	12	Meningkatkan persentase pekerja perempuan dalam populasi Nominated Talent

Jakarta, 17 Desember 2021

Wakil Menteri BUMN II,

Kartika Wirjoatmodjo

Keterangan
SS1: Menciptakan SDM yang unggul dan profesional
SS2: Menciptakan organisasi yang kuat, sehat, dan akuntabel
SS3: Meningkatkan tata kelola BUMN sebagai korporasi
SS4: Penguatan kapasitas BUMN
SS5: Meningkatkan daya saing BUMN
SS6: BUMN unggul di kancah global
SS7: Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara (APBN)
SS8: Kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan nasional
SS9: Kontribusi BUMN dalam peningkatan value BUMN untuk pemegang saham (Aset Negara)

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

3. Lampiran Capaian Kinerja Tahun 2022 Wamen II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Bobot	Trajectory Target	Realisasi	Capaian TW IV 2022	Indeks Capaian IKU	Nilai Kinerja Organisasi
				Tahunan	Tahunan			
1	Kontribusi BUMN dalam peningkatan value BUMN untuk pemegang saham (Aset Negara)	Net Profit	8	115	209,07	120,0%	10	103,60
		EBITDA Margin	7	32,52%	41,15%	120,0%	8	
		Return on Equity	8	9,13%	16,93%	120,0%	10	
2	Kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan nasional	Jumlah Nasabah Aktif Mekaar	7	12.014.328	13.921.722	115,9%	8	
		% Total Realisasi Capex	7	76%	76%	100%	7	
		Pencapaian Target Proyek dan Program Strategis Nasional	8	61%	61%	100%	8	
3	BUMN unggul di kancah global	Jumlah Negara Tujuan Ekspor	7	11	20	120,0%	8	
4	Penguatan kapasitas BUMN	Penyelesaian Program Restrukturisasi (Pembentukan Holding) Klaster BUMN	8	3	2	66,7%	5	
		Penyelesaian Target IPO/Tambahan Nilai Penawaran	8	6	4	66,7%	5	
5	Meningkatnya daya saing BUMN	Implementasi Program Digitalisasi oleh BUMN	8	4	4	100,0%	8	
		Implementasi Model Bisnis yang terintegrasi oleh BUMN	8	6	5	83,3%	7	
6	Menciptakan SDM yang unggul dan profesional	% Mienial (≤ 42 tahun) dalam Nominated Talent	8	11%	19%	120,0%	10	
		% Perempuan dalam Nominated Talent	8	12%	18%	120,0%	10	
Total Nilai Akhir								103,60
Kriteria Pencapaian NKO								Sangat Memuaskan

4. Indikator Capaian Kinerja

a. Net Profit

Rp Miliar

No	BUMN	Realisasi Net Profit 2022 s.d TW IV
Asdep Bidang Logistik		
1	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	4.103,4
2	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	455,6
3	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	191,0
4	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	1.537,6
5	PT Pos Indonesia (Persero)	636,1
7	PT Industri Kereta Api (Persero)	- 451,1
8	Perum DAMRI	8,5
9	Perum PPD	1,2
TOTAL Asdep Bidang Logistik		6.482,3
Asdep Bidang Infrastruktur		
1	PT Brantas Abipraya (Persero)	132,00
2	PT Hutama Karya (Persero)	-1.521,00
3	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	110,00
4	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	366,00
5	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	-1.517,00
6	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	96,00
7	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	2.709,00
8	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	2.286,00
9	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	-
10	Perum Perumnas	-421,00
TOTAL Asdep Bidang Infrastruktur		2.240,00
Asdep Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung		
1	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	57.917,26
2	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	-148,13
3	PT Aviastri Pariwisata Indonesia (Persero)	-1.869,00
4	Perum LPPNPI	409,25
TOTAL Asdep Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung		56.309,38
Asdep Bidang Asuransi dan Dana Pensiun		
1	PT Taspen (Persero)	155,87
2	PT Asabri (Persero)	3.875,59
3	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	-553,08
4	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	-261,62
5	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	4.002,30
TOTAL Asdep Bidang Asuransi dan Dana Pensiun		7.219,06
Asdep Bidang Jasa Keuangan		
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	51.408
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	37.692
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	18.312
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	3.001
5	Perum Peruri	351
TOTAL Asdep Bidang Jasa Keuangan		110.765
Asdep Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media		
1	Perum Jasa Tirta I	78,29
2	Perum Jasa Tirta II	119,12
3	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	126,07
4	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	-39,69
5	Perum Produksi Film Negara	0,86
6	PT Danareksa (Persero)	808,87
7	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	24.965,00
TOTAL Asdep Bidang Telekomunikasi dan Media		26.058,52
Total		209.074,02

Keterangan: data realisasi berdasarkan prognosa dan/atau unaudited tahun 2022.

b. EBITDA Margin

No	BUMN	Realisasi Tahun 2022		EBITDA Margin
		EBITDA	Revenue	
Asdep Bidang Logistik				
1	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	10.072,00	29.756,40	34%
2	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	1.125,13	4.322,16	26%
3	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	664,08	5.390,88	12%
4	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	4.701,63	22.561,04	21%
5	PT Pos Indonesia (Persero)	896,63	4.590,15	20%
7	PT Industri Kereta Api (Persero)	-	1.155,83	-8%
8	Perum DAMRI	107,97	931,54	12%
9	Perum PPD	44,33	409,03	11%
TOTAL Asdep Bidang Logistik		17.524,14	69.117,03	25%
Asdep Bidang Infrastruktur				
1	PT Brantas Abipraya (Persero)	487,00	6.430,00	8%
2	PT Hutama Karya (Persero)	3.421,00	24.209,00	14%
3	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	1.532,00	13.280,00	12%
4	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	3.029,00	20.017,00	15%
5	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	4.201,00	14.525,00	29%
6	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	2.430,00	21.534,00	11%
7	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	8.468,00	13.652,00	62%
8	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	7.955,00	36.166,00	22%
9	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	-	-	0%
10	Perum Perumnas	39,00	1.047,00	4%
TOTAL Asdep Bidang Infrastruktur		31.562,00	150.860,00	21%
Asdep Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung				
1	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	877,08	18600,06	5%
2	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	85,2	668,4	13%
3	PT Aviata Pariwisata Indonesia (Persero)	4.902,00	16342,3	30%
4	Perum LPPNPI	773,96	2231,5	35%
TOTAL Asdep Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung		6.638,24	37.842,26	18%
Asdep Bidang Asuransi dan Dana Pensiun				
1	PT Taspen (Persero)	400,70	8.673,09	5%
2	PT Asabri (Persero)	3968,74	6.167,78	64%
3	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	-176,83	407,06	-43%
4	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	-186,51	6.535,95	-3%
5	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	4840,95	29.417,03	16%
TOTAL Asdep Bidang Asuransi dan Dana Pensiun		8.847,06	51.200,92	17%
Asdep Bidang Jasa Keuangan (bank = PPOP)				
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	91.285	171.900	53%
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	56.963	92.110	62%
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	34.413	56.141	61%
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	7.137	25.340	28%
7	Perum Peruri	945,05	3.884,46	24%
TOTAL Asdep Bidang Jasa Keuangan		190.742,93	349.375,55	55%
Asdep Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media				
1	Perum Jasa Tirta I	147,99	617,62	24%
2	Perum Jasa Tirta II	225,62	916,59	25%
3	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	184,36	397,65	46%
4	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	-33,79	167,37	-20%
5	Perum Produksi Film Negara	1,20	21,63	6%
6	PT Danareksa (Persero)	1311	8885,86	15%
7	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	79.254	148.189	53%
TOTAL Asdep Bidang Telekomunikasi dan Media		81.090,38	159.195,72	51%
Total		336.404,75	817.591,47	41%

Keterangan: data realisasi berdasarkan prognosa dan/atau unaudited tahun 2022.

c. Return on Equity

No	BUMN	Realisasi Tahun 2022		
		Net Profit	Equity	ROE
Asdep Bidang Logistik				
1	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	4 103,42	41.062,07	10%
2	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	455,56	7 267,05	6%
3	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	191,01	6 703,61	3%
4	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	1 537,63	29 492,74	5%
5	PT Pos Indonesia (Persero)	636,11	6 948,61	9%
7	PT Industri Kereta Api (Persero)	- 451,08	159,14	-283%
8	Perum DAMRI	8,48	411,36	2%
9	Perum PPD	1,18	300,18	0%
TOTAL Asdep Bidang Logistik		6.482,31	92.344,75	7,02%
Asdep Bidang Infrastruktur				
1	PT Brantas Abipraya (Persero)	132,00	1 854,00	7,12%
2	PT Utama Karya (Persero)	- 1 521,00	84 628,00	-1,80%
3	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	110,00	8 886,00	1,24%
4	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	366,00	14 952,00	2,45%
5	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	- 1 517,00	13 785,00	-11,00%
6	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	96,00	17 534,00	0,55%
7	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	2 709,00	27 773,00	9,75%
8	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	2 286,00	47 575,00	4,81%
9	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	-	-	0,00%
10	Perum Perumnas	- 421,00	1 468,00	-28,68%
TOTAL Asdep Bidang Infrastruktur		2.240,00	218.455,00	1,03%
Asdep Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung				
1	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	57 917,26	- 9 648,00	-600,30%
2	PT Pengembangan Panwisata Indonesia (Persero)	- 148,13	2 200,50	-6,73%
3	PT Aviast Panwisata Indonesia (Persero)	- 1 869,00	37 974,00	-4,92%
4	Perum LPPNPI	409,25	4 430,00	9,24%
TOTAL Asdep Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung		56.309,38	34.956,50	161,08%
Asdep Bidang Asuransi dan Dana Pensiun				
1	PT Taspen (Persero)	155,87	11 048,93	1,41%
2	PT Asabri (Persero)	3 875,59	- 1 559,20	-248,56%
3	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	- 553,08	3 227,30	17,14%
4	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	- 261,62	2 449,54	-10,68%
5	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	4 002,30	41 658,16	9,61%
TOTAL Asdep Bidang Asuransi dan Dana Pensiun		7.219,06	50.370,13	14,33%
Asdep Bidang Jasa Keuangan				
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	51 408,21	303 395,32	16,94%
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	37 692,43	211 242,59	17,84%
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	18 312,00	140 198,00	13,06%
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	3 001,00	26 456,00	11,34%
7	Perum Peruri	351,11	3 779,31	9,29%
TOTAL Asdep Bidang Jasa Keuangan		110.764,74	685.071,21	16,17%
Asdep Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media				
1	Perum Jasa Tirta I	78,29	929,52	8,42%
2	Perum Jasa Tirta II	119,12	1 356,88	8,78%
3	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	126,07	220,85	57,08%
4	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	- 39,69	117,85	-33,68%
5	Perum Produksi Film Negara	0,86	2,71	31,73%
6	PT Danareksa (Persero)	808,87	32 375,60	2,50%
7	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	24 965,00	153 972,00	16,21%
TOTAL Asdep Bidang Telekomunikasi dan Media		26.058,52	188.975,41	13,79%
Total		209.074,02	1.270.173,01	16,46%

Keterangan: data realisasi berdasarkan prognosa dan/atau unaudited tahun 2022.

d. Jumlah Negara Tujuan Ekspor

No	BUMN	Realisasi Tahun 2022	
		Jumlah Negara Tujuan Ekspor	Nama Negara
	Asdep Bidang Jasa Logistik		
1	-	-	
	TOTAL Asdep Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung		
	Asdep Bidang Infrastruktur		
1	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	8,00	Filipina, Nepal, Australia, Korsel, India, Oceania
2	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	10,00	Timor Leste, Sri Lanka, Bangladesh, China, Filipina, Fiji, Taiwan, Australia, Maldives, Singapore
	TOTAL Asdep Bidang Infrastruktur	18,00	
	Asdep Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung		
1	PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	1,00	Vietnam
	TOTAL Asdep Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung	1,00	
	Asdep Bidang Asuransi dan Dana Pensiun		
1	-	-	
	TOTAL Asdep Bidang Jasa Keuangan		
	Asdep Bidang Jasa Keuangan		
1	Perum Peruri	3,00	Peru, Sri lanka dan Nepal
	TOTAL Asdep Bidang Jasa Keuangan	3,00	
	Asdep Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media		
1	PT Barata Indonesia (Persero)	5,00	United States, Mexico, Canada, Germany, China
	TOTAL Asdep Bidang Telekomunikasi dan Media	5,00	
	Total	27,00	

a. Nasabah Aktif Mekaar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Trajectory Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	% Capaian Tahun 2022
Kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan nasional	Jumlah Nasabah Aktif Mekaar	12.014.328	13.921.722	115,9%

e. Penyelesaian Program Restrukturisasi (Pembentukan Holding) Klaster BUMN

No	Nama Program Restrukturisasi/Holding	Realisasi Tahun 2022
1	Penyelesaian inklusi ITDC dalam holding Pariwisata	1
2	Restrukturisasi Polis PT Jiwasraya	1
3	Holding Danareksa tahap II	0
		2

Keterangan:

- 1 adalah terealisasi dan 0 adalah belum terealisasi

f. Penyelesaian Target IPO/Tambahan Nilai Penawaran BUMN/Anak Usaha BUMN di Pasar Modal

No	Nama BUMN/ Anak BUMN	Realisasi Tahun 2022
1	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	0
2	Right Issue PT Waskita Karya (Persero) Tbk	0
3	Right Issue PT Adhi Karya (Persero) Tbk	1
4	Right Issue BTN	1
5	Right Issue BSI	1
6	Right Issue Garuda	1
		4

Keterangan:

- 1 adalah terealisasi dan 0 adalah belum terealisasi

g. Implementasi Program Digitalisasi oleh BUMN

No	BUMN	Realisasi Tahun 2022
1	Persentase Implementasi Program Percepatan Proyek Pembangunan LRT Jabodebek	1
2	Implementasi ERP (asdep jasa infrastruktur)	1
3	Otentikasi Digital (asdep asuransi dan dana pensiun)	1
4	Pengembangan Ekosistem Digital Mortgage BTN	1
		4

Keterangan:

- 1 adalah terealisasi dan 0 adalah belum terealisasi

h. Implementasi Model Bisnis yang Terintegrasi oleh BUMN

No	BUMN	Realisasi Tahun 2022
1	PT Pos Indonesia (Persero)	1
2	Perum DAMRI & PPD	0
3	Integrasi BUMN Semen	1
4	Integrasi infrastruktur IT pada BUMN Klaster Pariwisata	1
5	Reinsurance Program for Farming Sector	1
6	Sinkronisasi Infrastruktur dan Layanan Pendukung Jasa Perbankan	1
		5

Keterangan:

- 1 adalah terealisasi dan 0 adalah belum terealisasi

i. % Total Realisasi Capex

No	BUMN	Realisasi Tahun 2022
Asdep Bidang Logistik		
1	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	7.560
2	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	249
3	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	204
4	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	7.187
5	PT Pos Indonesia (Persero)	108
7	PT Industri Kereta Api (Persero)	23
8	Perum DAMRI	8
9	Perum PPD	3
TOTAL Asdep Bidang Logistik		15.341
Asdep Bidang Infrastruktur		
1	PT Brantas Abipraya (Persero)	589
2	PT Hutama Karya (Persero)	16.968
3	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	3.121
4	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	3.975
5	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	5.031
6	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	6.916
7	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	9.626
8	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	1.885
9	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	-
10	Perum Perumnas	19
TOTAL Asdep Bidang Infrastruktur		48.130
Asdep Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung		
1	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	604,88
2	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	1.510
3	PT Aviata Pariwisata Indonesia (Persero)	1.825
4	Perum LPPNPI	44
TOTAL Asdep Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung		3.984
Asdep Bidang Asuransi dan Dana Pensiun		
1	PT Taspen (Persero)	22,55
2	PT Asabri (Persero)	15,81
3	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	0,41
4	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	10,50
5	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	516,86
TOTAL Asdep Bidang Asuransi dan Dana Pensiun		566
Asdep Bidang Jasa Keuangan		
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.820
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.645
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.451
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	872
5	Perum Peruri	211
TOTAL Asdep Bidang Jasa Keuangan		9.999
Asdep Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media		
1	Perum Jasa Tirta I	34
2	Perum Jasa Tirta II	107
3	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	89
4	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	1
5	Perum Produksi Film Negara	0
6	PT Danareksa (Persero)	1.446
7	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	41.819
TOTAL Asdep Bidang Telekomunikasi dan Media		43.497
Total		121.518

j. Pencapaian Target Proyek dan Program Strategis Nasional

No	Nama PSN	Realisasi Tahun 2022
Asdep Bidang Logistik		
1	Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru / New Priok Eastern Access (NPEA)	0,00%
2	Makassar New Port	93,50%
3	Pengembangan Pelabuhan Terminal Kijing	100,00%
4	Pengembangan Pelabuhan Benoa (Bali Maritime Tourism Hub)	78,73%
5	High Speed Railway Jakarta-Bandung	83,18%
6	Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi	89,11%
7	Kawasan Industri Kuala Tanjung	2,00%
8	Kawasan Terintegrasi Bakauheni	6,57%
Asdep Bidang Infrastruktur		
1	High Speed Railway (Porsi WIIKA)	96%
2	Tol Serpong - Balaraja Seksi 1A	100%
3	Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan Seksi 4	96%
4	Tol Pekanbaru - Padang	68%
5	Bendungan Tiga Dihadji Paket 4	69%
6	Bendungan Amero	64%
7	LRT Jabodetabek	92%
8	Tol Serpong - Cinere	100%
9	Tol Probolinggo - Banyuwangi	2%
10	Tol Jakarta - Cikampek II Sisi Selatan	35%
11	Tol Yogyakarta - Bawen	9%
12	Penambahan Lingkup Jalan Tol Solo Yogyakarta - Kulon Progo	17%
13	TEMEF Paket 4	28%
14	Irigasi Telake	23%
15	Air Baku Banten	100%
16	Bendungan Bener Lanjutan	11%
17	Jalan Kawasan Industri Batang (Land Clearing)	100%
18	PEK - BOGIM I 2	17%
19	K - Cibitung Cilincing	12%
20	Tol Jogja - Bawen, Jateng	0%
21	Tol Japek Selatan II	0%
22	Tol Akses Patimban	0%
23	Tol Gedebage	0%
24	Bendungan Jantah (65%)	66%
25	Bendungan Bener Paket II (100%)	37%
26	Jalan Tol KLBM Seksi 2	84%
27	Bendungan Jragung Paket 1	17%
28	Reantang Irrigation Modernization Project	71%
29	DI Tapin	100%
30	Perkuatan Pantai Paket 2	100%
31	Bendungan Rukoh	52%
32	Jembatan Musi (PMN)	65%
33	Jembatan Kramasan (PMN)	96%
34	BENDUNGAN MBAY	11%
35	BANGUNAN PENGARAH BENDUNGAN RUKOH	9%
36	IRIGASI LEMATANG PAKET I	0%
37	Upgrading Inalum Smelter	73%
38	Tol Bocimi Seksi 3	0%
39	TOL JAKARTA - CIKAMPEK II SISI SELATAN-INDUK	83%
40	TOL JAKARTA - CIKAMPEK II SISI SELATAN-PERALATAN	98%
41	TOL CIMANGGIS - CIBITUNG SEKSI 2	75%
42	TOL CIAWI - SUKABUMI SEKSI 2	90%
43	TOL BECAKAYU SEKSI 2A UJUNG	100%
44	JALAN TOL PASURUAN PROBOLINGGO	83%
45	Tol KAPB (2) Paket IV Seksi 2A PMN	40%
46	Tol KAPB (2) Paket II Seksi 2 PMN	64%
47	Tol KAPB (2) Paket II Seksi 3 (PMN)	63%
48	Tol KAPB (2) Paket II Seksi 3 (Non PMN)	100%
49	Tol KAPB (2) Paket IV Seksi 3 (Non PMN)	0%
50	Tol KAPB (2) Paket IV Seksi 3B PMN	81%
51	JL & KAWASAN INFR. AVASTA CIBITUNG	25%
52	Addendum Japek Selatan	100%
53	TOL BECAKAYU KONEKSI WIYOTO WIYONO	100%
54	TOL CIBITUNG - CILINCING SEKSI 1	99%
55	TOL CIBITUNG - CILINCING SEKSI 2	91%
56	Jalan Tol Trans Sumatra	100%
57	Jalan Tol Manado-Bitung	100,00%
58	Jalan Tol Kisaran Tebing Tinggi	58,00%
59	Jalan Tol Semarang Demak	89,00%
60	Pekerjaan Fasilitas Sisi Udara Bandara Udara Siboru Fakfak	86,00%
61	Patimban Port Development Project (I) Package 3: Connecting Bridge	100,00%
62	Kereta Api Makassar-Pare-pare	100,00%
63	Bendungan Leuwikeris Paket I	88,00%
64	Bendungan Lau Simeme	97,00%
65	Bendungan Bener	24,00%
66	Bendungan Bagong	43,00%
67	Bendungan Way Apu	46,00%
68	Bendungan Tamblang	100,00%
69	Bendungan Manikin Paket II	57,00%
70	Bendungan Tiu Suntuk Paket II	47,00%
71	Program Pengembangan Kawasan Perbatasan - PLBN Long Nawang	63,00%
72	Program Pengembangan Kawasan Perbatasan - PLBN Sei Pancang	100,00%
73	Upgrading kilang-kilang Existing (RDM P)	61,00%
74	Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR)	34,00%
75	Penataan KSPN Pantai Marina - Bukit Pramuka (Zona 3 Dan 5)	100,00%
76	Penataan Kawasan Permukiman KSPN Borobudur	100,00%
77	Rusun Batang III	100,00%
78	Bendungan Bener Paket 1	44,39%
79	Bendungan Bener Paket 4	17,47%
80	Bendungan Sepaku Semoi	82,14%
81	Bendungan Bagong Paket 1	7,20%
82	Bendungan Jragung Paket III	27,47%
83	ICB Rentang LSS-05	76,91%
84	Bendungan Bulango Ulu Paket II	38,18%
85	Jaringan Irigasi D.I Balase Kanan 1	100,00%
86	Bendungan Mbay	9,12%
87	Bendungan Remping Sila paket 1	100,00%

k. % Milenial (<40 tahun) dalam Top Talent

No	%Milenial	
	Nama Keasdepan	Realisasi Tahun 2022
1	Asdep Bidang Logistik	16%
2	Asdep Bidang Infrastruktur	24%
3	Asdep Bidang Pariwisata	30%
4	Asdep Bidang Asuransi dan Dapen	15%
5	Asdep Bidang Jasa Keuangan	19%
6	Asdep Bidang JTM	11%
	Average	19%

Rata-rata capaian % milenial dalam Nominated Talent pada tahun 2022 adalah sebesar 19%.

l. % Perempuan dalam Nominated Talent

No	%Perempuan	
	Nama Keasdepan	Realisasi Tahun 2022
1	Asdep Bidang Logistik	15%
2	Asdep Bidang Infrastruktur	13%
3	Asdep Bidang Pariwisata	13%
4	Asdep Bidang Asuransi dan Dapen	22%
5	Asdep Bidang Jasa Keuangan	23%
6	Asdep Bidang JTM	20%
	Average	18%

Rata-rata capaian % perempuan dalam Nominated Talent pada tahun 2022 adalah sebesar 18%.

5. Lampiran Keasdepan di Bawah Wakil Menteri BUMN II

a. Asdep Deputi Bidang Jasa Keuangan

1) Perjanjian Kinerja Tahun 2022



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
ASISTEN DEPUTI BIDANG JASA KEUANGAN
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Khoerur Roziqin
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Jasa Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Kartika Wirjoatmodjo
Jabatan : Wakil Menteri BUMN II

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Desember 2021

Pihak Kedua,
Wakil Menteri BUMN II

Kartika Wirjoatmodjo
NIP. Wamen-02

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Jasa
Keuangan

M. Khoerur Roziqin
NIP 197503251996021001

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Asisten Deputi Bidang Jasa Keuangan
Tahun Anggaran : 2022

No	Prioritas Kementerian BUMN	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022
1	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia	SS9	Cost of Credit	%	2,25
			LaR Coverage	%	37,99
			Market Capitalization	Rp T	1.225,8
			Pre-Provision Operating Profit (PPOP)	Rp T	163
			Terselenggaranya RUPS Tahunan BUMN Sektor Jasa Keuangan	%	100
			Penyampaian tanggapan atau pembahasan kinerja secara berkala dengan Direksi dan/atau Dewan Komisaris	%	100
		SS8	Jumlah unit rumah yang didanai melalui KPR Program Rumah Milenial	Jumlah Unit	21.000
			Persentase total Penyaluran KUR	%	90
2	Inovasi Model Bisnis	SS8	Jumlah implementasi outlet co-location (Sentra Layanan Ultra Mikro) BRI	Jumlah Unit	1.000
		SS4	Implementasi Pelaksanaan Right Issue BTN	Waktu	Triwulan IV 2022
			Implementasi Pelaksanaan Right Issue BNI	Waktu	Triwulan IV 2022
			Implementasi Pelaksanaan Right Issue BSI	Waktu	Triwulan III 2022
3	Kepemimpinan Teknologi	SS5	Implementasi Program Sinkronisasi Infrastruktur dan Layanan Pendukung Jasa Perbankan (ATM, EDC, LinkAja)	Waktu	Triwulan IV 2022
			IT Maturity Level	Skor	Minimal 3
4	Peningkatan Investasi	SS6	% Investasi yang diselesaikan	%	70
		SS5	Risk Maturity Index	Skor	Minimal 3
5	Pengembangan Talenta	SS1	Implementasi Cluster Talent Committee BUMN Jasa Keuangan	%	100
			% Milenial (<42 tahun) dalam Nominated Talent	%	10
			% Perempuan dalam Nominated Talent	%	15

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

Program	Anggaran
Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan BUMN	Rp950.000.000,-

Pihak Kedua,
Wakil Menteri BUMN II

Kartika Wirjoatmodjo
NIP. Wamen-02

Jakarta, 17 Desember 2021
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Jasa
Keuangan

M. Khoerur Roziqin
NIP 197503251996021001

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

2) Rencana Aksi dan Trajectory Target



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

RENCANA AKSI DAN TRAJECTORY TARGET PERJANJIAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG JASA KEUANGAN

No	Prioritas Kementerian BUMN	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Trajectory Target				Rencana Aksi
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia	SS9	Cost of Credit	%	2,25	2,20	2,13	2,22	2,25	1. Monitoring pencapaian Cost of Credit secara berkala 2. Evaluasi pencapaian Cost of Credit setiap BUMN
			LaR Coverage	%	37,99	33,35	34,90	36,27	37,99	1. Monitoring pencapaian LaR Coverage secara berkala 2. Evaluasi pencapaian LaR Coverage setiap BUMN
			Market Capitalization	Rp T	1.228,8	-	-	-	1.226,8	1. Monitoring realisasi Market Cap. setiap BUMN 2. Monitoring stock performance BUMN Jasa Keuangan
			Pre-Provision Operating Profit (PPOP)	Rp T	163	38	77	119	163	1. Monitoring pencapaian PPOP secara berkala 2. Evaluasi pencapaian PPOP setiap BUMN
			Terselenggaranya RUPS Tahunan BUMN Sektor Jasa Keuangan	%	100	100	100	100	100	1. Monitoring penyelesaian Laporan Tahunan 2. Penyusunan Dokumen dalam rangka pelaksanaan RUPS Tahunan
			Penyampaian tanggapan atau pembahasan kinerja	%	100	0	33	67	100	1. Monitoring capaian kinerja BUMN secara berkala

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

No	Prioritas Kementerian BUMN	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Trajectory Target				Rencana Aksi
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
		SS8	secara berkala dengan Direksi dan/atau Dewan Komisaris							2. Evaluasi dan tanggapan atas kinerja BUMN secara berkala
			Jumlah unit rumah yang didanai melalui KPR Program Rumah Milenial	Jumlah Unit	21.000	3.869	8.695	14.796	21.000	1. Monitoring pelaksanaan program Rumah Milenial BTN secara berkala 2. Kunjungan lapangan pelaksanaan KPR program Rumah Milenial
			Persentase total Penyaluran KUR	%	90	23	45	68	90	1. Monitoring pelaksanaan program KUR secara berkala 2. Evaluasi penyaluran KUR oleh setiap BUMN perbankan
			Jumlah implementasi outlet co-location (Sentra Layanan Ultra Mikro) BR	Jumlah Unit	1.000	300	500	650	1.000	1. Monitoring implementasi outlet co-location secara berkala 2. Kunjungan lapangan outlet co-location
2	Inovasi Model Bisnis	SS4	Implementasi Pelaksanaan Right Issue BTN	Waktu	Triwulan IV 2022	-	-	-	Pelaksanaan Right Issue BTN	1. Koordinasi dengan stakeholders dalam rangka pelaksanaan right issue 2. Penyusunan dokumen pelaksanaan right issue 3. Monitoring pelaksanaan right issue sesuai timeline

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

No	Prioritas Kementerian BUMN	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Trajectory Target				Rencana Aksi
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
			Implementasi Pelaksanaan Right Issue BNI	Waktu	Triwulan IV 2022	-	-	-	Pelaksanaan Right Issue BNI	1. Koordinasi dengan stakeholders dalam rangka pelaksanaan right issue 2. Penyusunan dokumen pelaksanaan right issue 3. Monitoring pelaksanaan right issue sesuai timeline
			Implementasi Pelaksanaan Right Issue BSI	Waktu	Triwulan III 2022	-	-	Pelaksanaan Right Issue BSI	Pelaksanaan Right Issue BSI	1. Koordinasi dengan stakeholders dalam rangka pelaksanaan right issue 2. Penyusunan dokumen pelaksanaan right issue 3. Monitoring pelaksanaan right issue sesuai timeline
3	Kepemimpinan Teknologi	SS5	Implementasi Program Sinkronisasi Infrastruktur dan Layanan Pendukung Jasa Perbankan	Waktu	Triwulan IV 2022	-	-	-	100% dari Roadmap	1. Koordinasi dan Pembahasan Program Sinkronisasi melalui PMO 2. Monitoring pelaksanaan program sinkronisasi sesuai timeline/ roadmap
			IT Maturity Level	Skor	Minimal 3	-	-	-	Minimal 3	1. Monitoring IT Maturity Level di BUMN Perbankan 2. Evaluasi IT Maturity Level secara tahunan
4	Peningkatan Investasi	SS8	% Investasi yang di realisasikan	%	70	15	35	55	70	Mendorong percepatan realisasi belanja modal melalui monitoring dan evaluasi program belanja modal perusahaan secara berkala
		SS5	Risk Maturity Index	Skor	Minimal 3	-	-	-	Minimal 3	Monitoring Risk Maturity Index (RMI)

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

No	Prioritas Kementerian BUMN	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Trajectory Target				Rencana Aksi
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
5	Pengembangan Talenta	SS1	Implementasi Cluster Talent Committee BUMN Jasa Keuangan	%	100	-	-	-	100	Monitoring pelaksanaan implementasi Cluster Talent Committee BUMN Jasa Keuangan
			% Mienal (< 42 tahun) dalam Nominated Talent	%	10	-	-	-	10	Monitoring persentase pekerja mienal dalam populasi Nominated Talent
			% Perempuan dalam Nominated Talent	%	15	-	-	-	15	Monitoring persentase nominated talent perempuan dalam populasi Nominated Talent

Jakarta, 17 Desember 2021

Asisten Deputi Bidang Jasa Keuangan,


M. Khoerur Roziqin

Keterangan:

- SS1: Menciptakan SDM yang unggul dan profesional
- SS2: Menciptakan organisasi yang kuat, sehat, dan akuntabel
- SS3: Meningkatkan tata kelola BUMN sebagai korporasi
- SS4: Penguatan kapasitas BUMN
- SS5: Meningkatkan daya saing BUMN
- SS6: BUMN unggul di kancah global
- SS7: Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara (APBN)
- SS8: Kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan nasional
- SS9: Kontribusi BUMN dalam peningkatan value BUMN untuk pemegang saham (Aset Negara)

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

3) Kertas Kerja Capaian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Bobot	Trajectory Target				Realisasi				Capaian TW IV 2022*	Inisiatif Capaian IKU	Nilai Kinerja Organisasi
			Tw I	Tw II	Tw III	Tahunan	Tw I	Tw II	Tw III	Tahunan			
Kontribusi BUMN dalam peningkatan nilai BUMN untuk pemegang saham (Aset Negara)	Cost of Credit	5	2.20%	2.12%	2.22%	2.25%	2.23%	2.25%	1.99%	1.93%	114%	6	109.55
	LCR Coverage	6	33.35%	34.90%	36.27%	37.99%	37.62%	39.66%	41.56%	44.27%	117%	7	
	Market Capitalization	6	-	-	-	1.226.8	-	-	-	1.421.1	116%	7	
	Pre-Provision Operating Profit (PPOP)	6	38	77	119	163	44	94	140	182	111%	7	
	Terselenggaranya RUPS Tahunan BUMN sektor Jasa Keuangan	6	100%	100%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100%	100%	6	
Kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan nasional	Penyempitan tanggapan atau pembatasan kinerja secara berkala dengan Direksi dan/atau Dewan Komisaris	6	-	33%	67%	100%	-	33%	67%	100%	100%	6	
	Jumlah unit rumah yang didanai melalui KPR Program Rumah Mewah	5	3.869	8.895	14.785	21.000	5.541	12.115	14.956	28.579	120%	6	
	Persentase total penyusutan KUR	5	23%	45%	68%	90%	25%	48%	70%	97%	108%	5	
	Jumlah implementasi outlet co-location (Sentra Layanan Ultra Maret BSI)	5	300	500	650	1.000	404	1.002	1.012	1.013	101%	5	
	% Investasi yang diselesaikan	5	15%	35%	55%	70%	10%	26%	44%	83%	118%	6	
Penguatan kapasitas BUMN	Implementasi Pelaksanaan Right Issue BTN	5	-	-	-	V	-	-	-	V	100%	5	
	Implementasi Pelaksanaan Right Issue BSI	5	-	-	-	V	-	-	-	V	100%	5	
	Penyelesaian Due Diligence Unit (Satwa Syarah BTN oleh BSI)	5	-	-	-	V	-	-	-	V	100%	5	
Meningkatnya daya saing BUMN	Implementasi Program Sinkronisasi Infrastruktur dan Layanan Pendukung Jasa Perbankan (ATM, EDC, LinkAja)	5	-	-	-	V	-	-	-	V	100%	5	
	IT Maturity Level	5	-	-	-	3	-	-	-	3.94	120%	6	
	Risk Maturity Index	5	-	-	-	3	-	-	-	3.57	119%	6	
Menciptakan SDM yang unggul dan profesional	Implementasi Cluste Talent Committee BUMN Jasa Keuangan	5	-	-	-	100%	-	-	-	100%	100%	5	
	% Mienal (< 42 tahun) dalam Nominated Talent	5	-	-	-	10%	-	-	-	19%	120%	6	
	% Perampunan dalam Nominated Talent	5	-	-	-	15%	-	-	-	23%	120%	6	
Total Nilai Akhir												109.55	
Kriteria Pencapaian NKO												Sangat Memuaskan	

b. Asdep Deputi Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun

1) Perjanjian Kinerja Tahun 2022



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
ASISTEN DEPUTI BIDANG JASA ASURANSI DAN DANA PENSIUN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anindita Eka Wibisono
Jabatan : Plt. Asisten Deputi Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Kartika Wirjoatmodjo
Jabatan : Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara II

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Desember 2021

Pihak Kedua
Wakil Menteri BUMN II



Kartika Wirjoatmodjo
NIP. Wamen-02

Pihak Pertama
Plt. Asisten Deputi Bidang
Jasa Asuransi dan Dana Pensiun



Anindita Eka Wibisono
NIP. 198501042006021002

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

2) Rencana Aksi dan Trajectory Target



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

RENCANA AKSI DAN TRAJECTORY TARGET
PERJANJIAN KINERJA
ASISTEN DEPUTI BIDANG JASA ASURANSI DAN DANA PENSIUN

No	Prioritas Kementerian BUMN	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	I	Target Trajectory II	III	IV	Rencana Aksi
1	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia	SS8	Persentase Penjaminan KUR UMKM	100%	25%	50%	75%	100%	1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penjaminan KUR UMKM; 2. Memberikan masukan terhadap pelaksanaan penjaminan KUR UMKM; 3. Memproses Surat Menteri atau Wamen yang diperlukan terkait pelaksanaan penjaminan KUR UMKM.
		SS5	a. Terselenggaranya RUPS RKAP dan RUPS Audit BUMN ADP	100%	25%	50%	75%	100%	1. Mengahalisis dan evaluasi usulan RKAP 2021 BUMN dan Laporan Audited BUMN; 2. Melakukan pembahasan teknis dengan BUMN; 3. Memproses SKU Menteri BUMN kepada Wamen II dan Asdep; 4. Pelaksanaan RUPS.
			b. Penyampaian Tanggapan Kinerja BUMN kepada Direksi dan Komisaris	100%	25%	50%	75%	100%	1. Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja BUMN di Keasdepan Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun termasuk aspek manajemen risiko; 2. Memberikan tanggapan, saran dan masukan terhadap pencapaian target kinerja BUMN.
		SS9	c. Hasil underwriting bersih	Rp7.246 M	Rp1.811 M	Rp3.623 M	Rp5.434 M	Rp7.246 M	1. Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja BUMN di Keasdepan Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun; 2. Memberikan tanggapan, saran dan masukan terhadap pencapaian target kinerja BUMN.
			d. Return on equity	2,27%	0,56%	1,13%	1,70%	2,27%	1. Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja BUMN di Keasdepan Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun.

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

2	Inovasi Model Bisnis	SS5	a. Persentase efektivitas implementasi pedoman strategis Holding Asuransi dan Penjaminan	50%	12,5%	25%	37,5%	50%	2. Memberikan tanggapan, saran dan masukan terhadap pencapaian target kinerja BUMN. 1. Monitoring dan evaluasi efektivitas implementasi pedoman strategis Holding Asuransi dan Penjaminan; 2. Memberikan masukan terhadap efektivitas implementasi pedoman strategis Holding Asuransi dan Penjaminan; 3. Memproses Surat Menteri atau Wamen yang diperlukan terkait efektivitas implementasi pedoman strategis Holding Asuransi dan Penjaminan.
		SS5	b. Persentase penyelesaian perbaikan kinerja PT Asabri (Persero)	50%	12,5%	25%	37,5%	50%	1. Monitoring dan evaluasi penyelesaian perbaikan kinerja PT Asabri (Persero); 2. Memberikan masukan terhadap penyelesaian perbaikan kinerja PT Asabri (Persero); 3. Memproses Surat Menteri atau Wamen yang diperlukan terkait penyelesaian perbaikan kinerja PT Asabri (Persero).
		SS5	c. Persentase inisiasi perbaikan program THT PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero)	50%	12,5%	25%	37,5%	50%	1. Monitoring dan evaluasi inisiasi perbaikan program THT PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero); 2. Memberikan masukan terhadap inisiasi perbaikan program THT PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero); 3. Memproses Surat Menteri atau Wamen yang diperlukan terkait inisiasi perbaikan program THT PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).
		SS5	d. Persentase pelaksanaan rencana penyehatan keuangan PT Asuransi Jiwasraya	75%	15%	25%	50%	75%	1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana penyehatan keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tahap II; 2. Memberikan masukan terhadap pelaksanaan rencana penyehatan keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tahap II.

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

		(Persero) Tahap II						3. Memproses Surat Menteri atau Wamen yang diperlukan terkait pelaksanaan rencana penyesuaian keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tahap II
		SS9 e. Risk Based Capital	>120%	>120%	>120%	>120%	>120%	
		SS9 f. Expense Ratio	31,00%	35,00%	33,00%	32,50%	31,00%	1. Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja BUMN di Keasdesan Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun. 2. Memberikan tanggapan, saran dan masukan terhadap pencapaian target kinerja BUMN.
3. Kepemimpinan Teknologi	SS5	Integrasi MIS di Holding Asuransi dan Penjaminan	50%	12,5%	25%	37,5%	50%	1. Monitoring dan evaluasi atas integrasi MIS di Holding Asuransi dan Dana Pensiun. 2. Memberikan tanggapan, saran dan masukan terhadap integrasi MIS di Holding Asuransi dan Dana Pensiun.
4. Peningkatan Investasi	SS9	Ratio Kekucupan Investasi	112,02%	112,02%	112,02%	112,02%	112,02%	1. Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja BUMN di Keasdesan Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun. 2. Memberikan tanggapan, saran dan masukan terhadap pencapaian target kinerja BUMN.
5. Pengembangan Talenta	SS1	a. % Mienial (<42 tahun) dalam Nominated Talent Klaster Jasa Asuransi dan Dana Pensiun	12,5%	3%	6,5%	9%	12,5%	Melakukan monitoring dan evaluasi atas % Mienial (<42 tahun) dalam Nominated Talent Klaster Jasa Asuransi dan Dana Pensiun

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

	b. % Perempuan dalam Nominated Talent Klaster Jasa Asuransi dan Dana Pensiun	20%	5%	10%	15%	20%	Melakukan monitoring dan evaluasi atas % Perempuan dalam Nominated Talent Klaster Jasa Asuransi dan Dana Pensiun
	c. Implementasi Cluster Talent Committee BUMN Jasa Asuransi dan Dana Pensiun	100%	n.a	n.a	n.a	100%	Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi Cluster Talent Committee BUMN Jasa Asuransi dan Dana Pensiun

Jakarta, 20 Desember 2021
Pdt. Asisten Deputi Bidang
Jasa Asuransi dan Dana Pensiun

Anindita Eka Wibisono
NIP. 198501042006021002

Keterangan:
SS1: Menciptakan SDM yang unggul dan profesional
SS2: Menciptakan organisasi yang kuat, sehat dan akuntabel
SS3: Meningkatkan tata kelola BUMN sebagai korporasi
SS4: Penguatan Kapasitas BUMN
SS5: Meningkatkan daya saing BUMN
SS6: BUMN Unggul di Kancah Global
SS7: Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara (APBN)
SS8: Kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan nasional
SS9: Kontribusi BUMN dalam peningkatan value BUMN untuk pemegang saham (Aset Negara)

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

3) Kertas Kerja Capaian Kinerja Tahun 2022

PENILAIAN CAPAIAN KINERJA TAHUNAN 2022
ASISTEN DEPUTI BIDANG JASA ASURANSI DAN DANA PENSIUN - KEMENTERIAN BUMN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Bobot	Trajectory Target				Realisasi				Capaian Tahunan 2022**	Indeks Capaian IKU***	Nilai Kinerja Organisasi ****
			Tw I	Tw II	Tw III	Tahunan	Tw I	Tw II	Tw III	Tahunan			
Meningkatkan daya saing BUMN Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun	Persentase efektivitas implementasi pedoman strategis Holding Asuransi dan Pengamanan	7	12.50%	25.00%	37.50%	50.00%	25.00%	25.00%	37.50%	50.00%	100.00%	7	108.14
	Persentase pelaksanaan rencana penyehatan keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tahap II	7	15.00%	25.00%	50.00%	75.00%	15.00%	50.00%	100.00%	100.00%	120.00%	8.4	
	Persentase inisiasi perbaikan program THT PT Taspen (Persero) dan PT Asabi (Persero)	6	12.50%	25.00%	37.50%	50.00%	12.50%	25.00%	37.50%	100.00%	120.00%	7.2	
	Persentase penyelesaian perbaikan kinerja PT ASABRI (Persero)	7	12.50%	25.00%	37.50%	50.00%	12.50%	25.00%	100.00%	100.00%	120.00%	8.4	
	Terselenggaranya RUPS RKAP dan RUPS Audit BUMN ADP	6	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	50.00%	80.00%	90.00%	95.00%	95.00%	5.7	
	Penyampaian Tanggapan Kinerja BUMN kepada Direksi dan Komisaris	7	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	100.00%	7	
	Integrasi MGS di Holding Asuransi dan Pengamanan	6	12.50%	25.00%	37.50%	50.00%	13.44%	25.00%	37.50%	50.00%	100.00%	6	
Kontribusi BUMN Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun sebagai agen pembangunan nasional	Persentase Penjaminan KUR UMKM	6	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	36.40%	70.51%	106.99%	145.54%	120.00%	7.2	
Kontribusi BUMN Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun dalam meningkatkan value BUMN untuk pemegang saham (Aset Negara)	Hasil Underwriting Bersih	6	1.811	3.623	5.434	7.246	1.443	2.131	3.911	5.820	80.33%	4.81955	
	Return on Equity	6	0.56%	1.13%	1.70%	2.72%	0.04%	-0.11%	0.73%	2.57%	94.49%	5.66912	
	Risk Based Capital	6	>120%	>120%	>120%	>120%	122.41%	130.36%	129.24%	129.09%	120.00%	7.2	
	Expense Ratio	6	35.00%	33.00%	32.50%	31.00%	28.50%	21.27%	21.77%	14.10%	120.00%	7.2	
	Rasio Kekucupan Investasi	6	112.02%	112.02%	112.02%	112.02%	153.73%	109.03%	110.31%	111.11%	99.19%	5.95126	
Menciptakan SDM yang unggul dan profesional Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun	% Milenial (<42 tahun) dalam Nominated Talent Klaster Jasa Asuransi dan Dana Pensiun	6	3.00%	6.50%	9.00%	12.50%	16.59%	18.14%	19.66%	18.82%	120.00%	7.2	
	% Perempuan dalam Nominated Talent Klaster Jasa Asuransi dan Dana Pensiun	6	5.00%	10.00%	15.00%	20.00%	25.53%	28.38%	28.04%	27.63%	120.00%	7.2	
	Implementasi Cluster Talent Committee BUMN Jasa Asuransi dan Dana Pensiun	6	n.a	n.a	n.a	100.00%	n.a	n.a	n.a	100.00%	100.00%	6	
Total Nilai Akhir													108
Kriteria Pencapaian NKO													Sangat Memuaskan

c. Asdep Deputi Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media

1) Perjanjian Kinerja Tahun 2022



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
ASISTEN DEPUTI BIDANG JASA TELEKOMUNIKASI DAN MEDIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yohanes Babbista Priyatmo Hadi
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Kartika Wirjoatmodjo
Jabatan : Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara II

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Desember 2021

Pihak Kedua
Wakil Menteri BUMN II

Kartika Wirjoatmodjo
NIP. Wamen-02

Pihak Pertama
Asisten Deputi Bidang
Jasa Telekomunikasi dan Media

YB Priyatmo Hadi
NIP. 197201161998031001

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Keasdepan Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media
Tahun Anggaran : 2022

No	Prioritas Kementerian BUMN	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia	SS9	Terselenggaranya RUPS RKAP dan Audit BUMN Lingkup Keasdepan Jasa Telekomunikasi dan Media secara Tepat Waktu	Persentase	100
			Penyampaian Tanggapan Kinerja BUMN Lingkup Keasdepan Jasa Telekomunikasi dan Media secara Berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	Persentase	100
			Net Profit BUMN Lingkup Keasdepan Jasa Telekomunikasi dan Media	Rp Triliun	20,73
			Dividen BUMN Lingkup Keasdepan Jasa Telekomunikasi dan Media	Rp Triliun	8,40
		SS4	Penyampaian Kebijakan/Pedoman Manajemen Resiko Kluster Telekomunikasi, Media dan Teknologi dan Kluster Danareksa	Persentase	100
2.	Inovasi Model Bisnis	SS4	Terbentuknya Holding Danareksa Tahap II	Persentase	100
			Monitoring Pelaksanaan dan Optimalisasi Sinergi dalam Holding Danareksa	Persentase	100
			Pembubaran BUMN	Persentase	100
		SS5	Transformasi PFN	Persentase	100
			Implementasi Kerjasama Telkom dan PFN	Program	3
			Monitoring Penggunaan Proceed IPO	Persentase	100
3.	Kepemimpinan Teknologi	SS4	Implementasi Management Information System Holding Danareksa	Persentase	100
		SS5	Implementasi 5G	Kota	11

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

4.	Peningkatan Investasi	SS8	Belanja Modal (Capex) BUMN Lingkup Keasdepan Jasa Telekomunikasi dan Media	Rp Triliun	32,71
			Fundraising BUMN Lingkup Keasdepan Jasa Telekomunikasi dan Media	Rp Triliun	1,00
5.	Pengembangan Talenta	SS1	Implementasi Cluster Talent Committee (CTC) BUMN Klaster Telekomunikasi, Media dan Teknologi dan Klaster Danareksa	Persentase	100
			Milenial (<42 tahun) dalam Nominated Talent BUMN Lingkup Keasdepan Jasa Telekomunikasi dan Media	Persentase	6
			Perempuan dalam Nominated Talent BUMN Lingkup Keasdepan Jasa Telekomunikasi dan Media	Persentase	12

Program

Pengembangan BUMN Sektor Jasa Telekomunikasi dan Media

Anggaran

Rp. 950.000.000

Jakarta, 17 Desember 2021

Pihak Kedua
Wakil Menteri BUMN II

Kartika Wirjoatmodjo
NIP. Wamen-02

Pihak Pertama
Asisten Deputi Bidang
Jasa Telekomunikasi dan Media

YB Priyatmo Hadi
NIP. 197201161998031001

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

2) Rencana Aksi dan Trajectory Target



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

RENCANA AKSI DAN TRAJECTORY TARGET
PERJANJIAN KINERJA
ASISTEN DEPUTI BIDANG JASA TELEKOMUNIKASI DAN MEDIA

No.	Prioritas Kementerian BUMN	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Target Trajectory (s.d Triwulan Ke)				Rencana Aksi
					I	II	III	IV	
1.	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia	SS9	Terselenggaranya RUPS RKAP dan Audit BUMN Lingkup Keadehan Jasa Telekomunikasi dan Media secara Tepat Waktu	100%	50	100	100	100	1. Menganalisis dan evaluasi usulan RKAP 2022 BUMN dan Laporan Audited BUMN Tahun Buku 2021. 2. Melakukan pembahasan teknis dengan BUMN. 3. Memproses SKU Menteri - BUMN kepada Wamen II dan Asdep. 4. Pelaksanaan RUPS.
			Penyampaian Tanggapan Kinerja BUMN Lingkup Keadehan Jasa Telekomunikasi dan Media secara Berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	100%	n.a	33	66	100	1. Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja BUMN Binaan dalam laporan berkala termasuk aspek manajemen risiko. 2. Memberikan arahan atau alternatif solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh BUMN dalam mencapai kinerja
			Net Profit BUMN Lingkup Keadehan Jasa Telekomunikasi dan Media	20,73 Triliun	n.a	n.a	n.a	20,73	1. Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja keuangan BUMN dalam laporan berkala. 2. Memberikan arahan atau alternatif solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh BUMN dalam mencapai kinerja

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

No.	Prioritas Kementerian BUMN	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Target Trajectory (s.d Triwulan Ke)				Rencana Aksi
					I	II	III	IV	
		SS4	Dividen BUMN Lingkup Keadehan Jasa Telekomunikasi dan Media	8,40 Triliun	n.a	8,40	8,40	8,40	1. Menganalisis dan Evaluasi Laporan Audited BUMN Tahun Buku 2021. 2. Mengesahkan Laporan Audited BUMN Tahun Buku 2021
			Penyampaian Kebijakan/Pedoman Manajemen Risiko Klasik Telekomunikasi, Media dan Teknologi dan Klasik Danareksa	100%	n.a	n.a	n.a	100	1. Memastikan tersedianya usulan kebijakan/pedoman Manajemen Risiko. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan/pedoman manajemen risiko.
2	Inovasi Model Bisnis	SS4	Terbentuknya Holding Danareksa Tahap II	100%	n.a	n.a	n.a	100	1. Melakukan penyusunan kajian dan RPP Pemerseran PJT I dan PJT II. 2. Pengajuan RPP dan penyampaian kajian Pemerseran. 3. Melakukan penyusunan kajian dan RPP Holding Danareksa Tahap II. 4. Pengajuan RPP dan penyampaian kajian Holding Danareksa Tahap II. 5. Pembahasan Kajian Pembentukan Holding Danareksa Tahap II. 6. Penyerahan Izin Prakarsa. 7. Pembahasan Antar Kementerian (PAK). 8. Harmonisasi RPP. 9. Penyampaian RPP kepada Presiden (melalui SetNeg).

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

No.	Prioritas Kementerian BUMN	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Target Trajectory (s.d Triwulan Ke)				Rencana Aksi
					I	II	III	IV	
									10. Penetapan RPP menjadi PP oleh Presiden RI.
			Monitoring Pelaksanaan dan Optimalisasi Sinergi dalam Holding Danareksa	100%	na	na	na	100	1. Monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan sinergi dalam Holding Danareksa; 2. Memberikan arahan atau solusi alternatif terhadap kendala yang dihadapi BUMN.
			Pembubaran BUMN	100%	na	na	na	100	1. Menyusun kajian atas rencana pembubaran BUMN; 2. Memproses Keputusan RUPS atas rencana pembubaran BUMN.
			Transformasi PFN	100%	na	na	na	100	1. Monitoring berkala proses penyusunan dokumen RPP PFN; 2. Memberikan arahan atau alternatif solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh BUMN.
		SS5	Implementasi Kerjasama Telkom dan PFN	3 Program	na	na	na	3	1. Monitoring dan evaluasi program kerjasama dalam laporan berkala; 2. Memberikan arahan atau alternatif solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh BUMN.
			Monitoring Penggunaan Proceed IPO	100%	na	na	na	100	Monitoring dan evaluasi progress penggunaan proceed IPO

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

No.	Prioritas Kementerian BUMN	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Target Trajectory (s.d Triwulan Ke)				Rencana Aksi
					I	II	III	IV	
3.	Kepemimpinan Teknologi	SS4	Implementasi Management Information System Holding Danareksa	100%	na	na	na	100	1. melakukan monitoring secara berkala atas pembangunan sistem pencatatan keuangan dan tata kelola yang terintegrasi di holding danareksa; 2. Memberikan arahan atau alternatif solusi terhadap kendala yang dihadapi BUMN.
		SS5	Implementasi 5G	11 Kota	na	na	na	11	1. Monitoring dan evaluasi perkembangan implementasi 5G secara berkala; 2. Memberikan arahan atau alternatif solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh BUMN.
4.	Peningkatan Investasi	SS8	Belanja Modal (Capex) BUMN Lingkup Keasdepan Jasa Telekomunikasi dan Media	32,71 Triliun	na	na	na	32,71	1. Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja BUMN dalam laporan berkala; 2. Memberikan arahan atau alternatif solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh BUMN dalam mencapai kinerja.
			Fundraising BUMN Lingkup Keasdepan Jasa Telekomunikasi dan Media	1,00 Triliun	na	na	na	1,00	1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan fundraising BUMN; 2. Memberikan arahan atau alternatif solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh BUMN.

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

No.	Prioritas Kementerian BUMN	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Target Trajectory (s.d. Triwulan Ke)				Rencana Aksi
					I	II	III	IV	
5.	Pengembangan Talenta	SS1	Implementasi Cluster Talent Committee (CTC) BUMN Klaster Telekomunikasi, Media dan Teknologi dan Klaster Danareksa	100%	n.a	n.a	n.a	100	1. Memastikan terdapatnya usulan list nominated talent Klaster; 2. Membuat laporan review nominated talent Klaster.
			Milenial (+42 tahun) dalam Nominated Talent BUMN Lingkup Keasdepan Jasa Telekomunikasi dan Media	6%	n.a	n.a	n.a	6	Monitoring dan evaluasi capaian %Milenial dalam Nominated Talent
			Perempuan dalam Nominated Talent BUMN Lingkup Keasdepan Jasa Telekomunikasi dan Media	12%	n.a	n.a	n.a	12	Monitoring dan evaluasi capaian %Perempuan dalam Nominated Talenta

Jakarta, 17 Desember 2021

Asisten Deputi Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media

YB Priyatno Hadi
NIP. 197201161998031001

Keterangan:
SS1: Menciptakan SDM yang unggul dan profesional
SS2: Menciptakan organisasi yang kuat, sehat dan akuntabel
SS3: Meningkatkan tata keola BUMN sebagai korporasi
SS4: Penguatan Kapasitas BUMN

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

3) Kertas Kerja Capaian Kinerja Tahun 2022

PENILAIAN CAPAIAN KINERJA S D TRIWULAN IV 2022
ASISTEN DEPUTI BIDANG JASA TELEKOMUNIKASI DAN MEDIA

No	Prioritas Kementerian BUMN	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Bobot	Target Trajectory				Realisasi s.d				Capaian s.d Triwulan IV 2022	Indeks Capaian IKU	Nilai Kinerja Organisasi
					Ta I	Ta II	Ta III	IV	Ta I	Ta II	Ta III	Tahunan			
1	Nilai Persepsi dan Sosial & R&D Inovasi	SS2	Terwujudnya RUPP R&D dan J&D BUMN Lingkup Keasdepan Jasa Telekomunikasi dan Media sebagai Tatalaksana	6	50	100	100	100	100%	48	91.84	94.82	56	99%	5.66
			Pemaksimalan Tempelan Inovasi BUMN Lingkup Keasdepan Jasa Telekomunikasi dan Media untuk Berkontribusi dalam Dampak Keasdepan Inovasi	6	n.a	35	46	100	100%	n.a	33.33	66.67	100	100%	6.00
			Nilai Profit BUMN Lingkup Keasdepan Jasa Telekomunikasi dan Media	6	n.a	n.a	n.a	28.73	25.71%	6.5	13.96	17.32	18.08	100%	7.26
			Gender BUMN Lingkup Keasdepan Jasa Telekomunikasi dan Media	6	n.a	6.4	6.4	8.4	8.4%	11.64	7.74	7.74	7.74	92%	5.13
			Perolehan Kuantitatif/Qualitatif Manajemen Risiko/Profil Telekomunikasi, Media, dan Teknologi dari Klaster Danareksa	5	n.a	n.a	n.a	100	100%	n.a	n.a	n.a	100	100%	5.00
2	Inovasi Model Bisnis	SS4	Berkembangnya Holding Danareksa Tahap II	6	n.a	n.a	n.a	100	100%	n.a	n.a	n.a	30	30%	1.00
			Monitoring Pelaksanaan dan Optimalisasi Strong Digital Holding Danareksa	6	n.a	n.a	n.a	100	100%	n.a	n.a	n.a	100	100%	6.00
			Perolehan BUMN	6	n.a	n.a	n.a	100	100%	n.a	n.a	n.a	100	100%	6.00
			Transformasi PPA	5	n.a	n.a	n.a	100	100%	n.a	n.a	n.a	100	100%	5.00
			Implementasi Ketersediaan Telekomunikasi (PMA)	6	n.a	n.a	n.a	100	100%	n.a	n.a	n.a	100	100%	5.00
3	Ketersediaan dan Kualitas Layanan	SS3	Monitoring Pengawasan Proses PPD	6	n.a	n.a	n.a	100	100%	n.a	n.a	n.a	100	100%	6.00
			Implementasi Manajemen Informasi Sistem Holding Danareksa	5	n.a	n.a	n.a	100	100%	n.a	n.a	n.a	100	100%	5.00
			Implementasi SCS	6	n.a	n.a	n.a	11	11.00%	n.a	n.a	n.a	47	120%	7.20
			Berbagai Model (Capex) R&D dan J&D BUMN Lingkup Keasdepan Jasa Telekomunikasi dan Media	5	n.a	n.a	n.a	32.31	32.31%	n.a	n.a	n.a	40.51	120%	6.00
			Perolehan BUMN Lingkup Keasdepan Jasa Telekomunikasi dan Media	5	n.a	n.a	n.a	1.00	1.00%	n.a	n.a	n.a	1.0	120%	6.00
4	Peningkatan Inovasi	SS2	Implementasi Cluster Talent Committee (CTC) BUMN Klaster Telekomunikasi, Media dan Teknologi dan Klaster Danareksa	6	n.a	n.a	n.a	100	100%	n.a	n.a	n.a	100	100%	6.00
			Milenial (+42 tahun) dalam Nominated Talent BUMN Lingkup Keasdepan Jasa Telekomunikasi dan Media	5	n.a	n.a	n.a	85	85%	n.a	n.a	n.a	100	120%	6.00
			Perempuan dalam Nominated Talent BUMN Lingkup Keasdepan Jasa Telekomunikasi dan Media	5	n.a	n.a	n.a	12%	12%	n.a	n.a	n.a	100	120%	6.00
			Total Nilai Akhir												101.58
			Kriteria Penetapan IKU												Sangat Baik

d. Asdep Deputi Bidang Jasa Infrastruktur

1) Perjanjian Kinerja Tahun 2022



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
ASISTEN DEPUTI BIDANG JASA INFRASTRUKTUR
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendrika Nora Oslo Sinaga

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Kartika Wirjoatmodjo

Jabatan : Wakil Menteri BUMN II

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Wakil Menteri BUMN II

Kartika Wirjoatmodjo
NIP. Wamen-02

Jakarta, 17 Desember 2021

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur

Hendrika Nora Oslo Sinaga
NIP. 197006071996032001

2) Rencana Aksi dan Trajectory Target



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

RENCANA AKSI DAN TARGET TRAJECTORY
PERJANJIAN KINERJA
ASISTEN DEPUTI BIDANG JASA INFRASTRUKTUR

No	Prioritas Kementerian BUMN	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Target Trajectory				Rencana Aksi
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia	SS2	Nilai Ekspor BUMN	Rp 1.991 Miliar	497	995	1.493	1.991	Melakukan evaluasi atas pencapaian produksi BUMN Jasa Infrastruktur di luar negeri
			Earning per Share (BUMN Tbk.)	105 Rp/Lembar	26	52	78	105	1. Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja BUMN dalam laporan berkala 2. Memberikan arahan atas solusi alternatif yang disampaikan BUMN dalam menghadapi berbagai kendala yang dihadapi BUMN dalam mencapai kinerja
			Return on Equity	0.58 %	0.15	-0.46	-0.39	0.58	1. Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja BUMN dalam laporan berkala 2. Memberikan arahan atas solusi alternatif yang disampaikan BUMN dalam menghadapi berbagai kendala yang dihadapi BUMN dalam mencapai kinerja
			EBITDA Margin	17.57 %	23.48	19.13	18.62	17.57	1. Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja BUMN dalam laporan berkala 2. Memberikan arahan atas solusi alternatif yang disampaikan BUMN dalam menghadapi berbagai kendala yang dihadapi BUMN dalam mencapai kinerja
		SS3	Ketersediaan Saldo Kas yang Cukup Untuk Membiayai Operasional BUMN Jasa Infrastruktur	100 %	-	-	-	100	Monitoring kecukupan Cash untuk dapat membayar kewajiban keuangan finansial



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

			Terselenggaranya RUPS RKAP dan RUPS Audit BUMN Jasa Infrastruktur Tepat Waktu	100 %	-	-	-	100	1. Menganalisis dan evaluasi usulan RKAP BUMN dan Laporan Audit BUMN 2. Memeriksa SKU Menteri BUMN kepada Menteri II dan Asdep
			Penyampaian Tanggapan Kinerja BUMN secara Berkala kepada Direksi dan Komisaris	100 %	-	-	-	100	1. Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja BUMN dalam laporan berkala 2. Memberikan arahan atas solusi alternatif yang dihadapi oleh BUMN dalam mencapai kinerja
		SS4	Capaian Implementasi Program Percepatan Proyek Pembangunan LRT Jabodetabek	100 %	-	-	-	100	Melakukan evaluasi atas implementasi Program Percepatan Proyek Pembangunan LRT Jabodetabek secara triwulanan
			Capaian Implementasi Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung	90 %	-	-	-	90	Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung secara triwulanan
			Konsep Pemenuhan Cost Overrun Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang menjadi porsi Pemegang Saham Indonesia	100 %	-	-	-	100	Melakukan monitoring dan evaluasi atas Pemenuhan Cost Overrun Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang menjadi porsi Pemegang Saham Indonesia
		SS5	Program Penyehatan Waskita (Realisasi Komitmen Kinerja Berkelanjutan)	75 %	-	-	-	75	Melakukan monitoring dan evaluasi atas Program Penyehatan Waskita (Realisasi Komitmen Kinerja Berkelanjutan)
			Program Penyehatan Perumnas (Realisasi Komitmen Kinerja Berkelanjutan)	75 %	-	-	-	75	Melakukan monitoring dan evaluasi atas Program Penyehatan Perumnas (Realisasi Komitmen Kinerja Berkelanjutan)
			Terbitnya Perpres Pengawasan Pembangunan dan Pengoperasian Proyek JTTS PT Hutama Karya	100 %	-	-	-	100	Melakukan monitoring atas proses penyusunan Perpres Pengawasan Pembangunan dan Pengoperasian Proyek JTTS PT Hutama Karya
		SS6	Progress of Capability Development for Specialization	75 %	-	-	-	75	Melakukan monitoring dan evaluasi atas Progress of Capability Development for Specialization



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

		SS4	Integrasi BUMN Semen	100 %	-	-	-	100	Melakukan monitoring dan evaluasi atas integrasi BUMN Semen.
3	Kepemimpinan Teknologi	SS5	Implementasi ERP	100 %	-	-	-	100	Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi ERP.
4	Peningkatan Investasi	SS5	Implementasi Program Asset Recycling BUMN Klaster Infrastruktur	70 %	-	-	-	70	Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi Program Asset Recycling BUMN Klaster Infrastruktur.
			Risk Maturity Level	3.5	-	-	-	3.5	Monitoring pelaksanaan risk maturity level BUMN Jasa Infrastruktur.
		SS8	Persentase investasi yang berhasil diselesaikan	80 %	-	-	-	80	Melakukan evaluasi perencanaan investasi yang akan dilakukan oleh BUMN Bidang Jasa Infrastruktur.
5	Pengembangan Talenta	SS1	% Mianal (<40%) dalam Top Talent Klaster Jasa Infrastruktur	10 %	-	-	-	10	Melakukan monitoring dan evaluasi atas % Mianal (<40%) dalam Top Talent Klaster Jasa Infrastruktur.
			% Perempuan dalam Nominated Talent Klaster Jasa Infrastruktur	8 %	-	-	-	8	Melakukan monitoring dan evaluasi atas % Perempuan dalam Nominated Talent Klaster Jasa Infrastruktur.
			Implementasi Cluster Talent Committee BUMN Jasa Infrastruktur	100 %	-	-	-	100	Monitoring pelaporan implementasi Cluster Talent Committee BUMN Jasa Infrastruktur.

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur

Hendrika Nora Osloi Sinaga
NIP. 197006071996032001

3) Kertas Kerja Capaian Kinerja Tahun 2022

PENILAIAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 ASISTEN DEPUTI BIDANG JASA INFRASTRUKTUR

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Bobot	Trajectory Target				Realisasi				Capaian 2022	Indeks Capaian IKU	Nilai Kinerja Organisasi
			Tw I	Tw II	Tw III	Tahun	Tw I	Tw II	Tw III	Tahun			
BUMN Unggul di Kancah Global	Nilai Ekspor BUMN (M)	6	497	995	1.493	1.991	688	1.365	1.986	2.536	120%	7	
Kontribusi BUMN dalam Peningkatan Value BUMN untuk Pemegang Saham (Aset Negara)	Earning per Share (BUMN Tbk.)	4	26	52	78	105	12	36	64	106	101%	4	
	Return on Equity	4	0.15	-0.46	-0.39	0.56	-0.42	0.58	1.33	1.02	120%	5	
	EBITDA Margin	4	23.48	19.13	18.62	17.57	22.34	24.60	23	20.92	119%	5	
	Ketersediaan Saldo Kas yang Cukup untuk Membiayai Operasional BUMN Jasa Infrastruktur	5	n.a.	n.a.	n.a.	100	n.a.	n.a.	n.a.	60	60%	3	
	Terselenggaranya RUPS RKAP dan RUPS Audit BUMN Infrastruktur Tepat Waktu	5	n.a.	n.a.	n.a.	100	n.a.	n.a.	n.a.	100	100%	5	
	Penyampaian Tanggapan Kinerja BUMN secara Berkala kepada Direksi dan Komisaris	5	n.a.	n.a.	n.a.	100	n.a.	n.a.	n.a.	100	100%	5	
Kontribusi BUMN	Capaian Implementasi Program Percepatan Proyek Pembangunan LRT Jabodebek	5	n.a.	n.a.	n.a.	100	n.a.	n.a.	n.a.	89	89%	4	
	Capaian Implementasi Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung	5	n.a.	n.a.	n.a.	100	n.a.	n.a.	n.a.	83	83%	4	

sebagai Agen Pembangunan Nasional	Konsep Pemenuhan Cost Overrun Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang menjadi porsi Pemegang Saham Indonesia	4	n.a.	n.a.	n.a.	100	n.a.	n.a.	n.a.	100	100%	4	102,30
	Persentase investasi yang berhasil diselesaikan	4	n.a.	n.a.	n.a.	80	n.a.	n.a.	n.a.	80	100%	4	
Meningkatkan Daya Saing BUMN	Program Penyehatan Waskita (Realisasi Komitmen Kinerja Berkelanjutan)	4	n.a.	n.a.	n.a.	75	n.a.	n.a.	n.a.	75	100%	4	
	Program Penyehatan Perumnas (Realisasi Komitmen Kinerja Berkelanjutan)	4	n.a.	n.a.	n.a.	75	n.a.	n.a.	n.a.	75	100%	4	
	Terbitnya Perpres Pengawasan Pembangunan dan Pengoperasian Proyek JTTS PT Hutama Karya	5	n.a.	n.a.	n.a.	100	n.a.	n.a.	n.a.	100	100%	5	
	Progress of Capability Development for Specialization	4	n.a.	n.a.	n.a.	75	n.a.	n.a.	n.a.	87	116%	5	
	Implementasi ERP	5	n.a.	n.a.	n.a.	100	n.a.	n.a.	n.a.	98	98%	5	
	Implementasi Program Asset Recycling BUMN Klaster Infrastruktur	4	n.a.	n.a.	n.a.	70	n.a.	n.a.	n.a.	70	100%	4	

	Risk Maturity Level	4	n.a.	n.a.	n.a.	3.5	n.a.	n.a.	n.a.	3.8	109%	4	
Penguatan Kapasitas BUMN	Integrasi BUMN Semen	5	n.a.	n.a.	n.a.	100	n.a.	n.a.	n.a.	100	100%	5	
Menciptakan SDM yang Unggul dan Profesional	% Milenial (<40) dalam Top Talent Klaster Jasa Infrastruktur	5	n.a.	n.a.	n.a.	10	n.a.	n.a.	n.a.	26	120%	6	
	% Perempuan dalam <i>Nominated Talent</i> Klaster Jasa Infrastruktur	5	n.a.	n.a.	n.a.	8	n.a.	n.a.	n.a.	15	120%	6	
	Implementasi <i>Cluster Talent Committee</i> BUMN Jasa Infrastruktur	5	n.a.	n.a.	n.a.	100	n.a.	n.a.	n.a.	100	100%	5	
													102.30
													Sangat Memuaskan

e. Asdep Deputi Bidang Jasa Logistik

2) Perjanjian Kinerja Tahun 2022



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
ASISTEN DEPUTI BIDANG JASA LOGISTIK
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Desty Arlaini

Jabatan : Plt. Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Kartika Wirjoatmodjo

Jabatan : Wakil Menteri BUMN II

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2021

Pihak Kedua
Wakil Menteri BUMN II

Kartika Wirjoatmodjo
NIP. Wamen-02

Pihak Pertama
Plt. Asisten Deputi Bidang
Jasa Logistik

Desty Arlaini
NIP. 19761204 199602 2 001



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

PERJANJIAN KINERJA

Unit Kerja : Asdep Bidang Jasa Logistik
Tahun Anggaran : 2022

No	Prioritas Kementerian BUMN	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
1	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia	SS9	Pengesahan RKAP 2022 dan Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 BUMN Klaster Jasa Logistik Tepat Waktu	Persentase	100
			Penyampaian Tanggapan Kinerja BUMN secara Berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris	Persentase	100
			Return on Equity	Persentase	4.0
			EBITDA Margin	Persentase	17.6
			Net Operating Cash Flow	Rp Miliar	10.946
		SS5	Penguatan Tata Kelola dan Fungsi Manajemen Risiko	Persentase	100
2	Inovasi Model Bisnis	SS4	Jumlah BUMN Klaster Jasa Logistik yang melaksanakan IPO (Initial Public Offering)	BUMN	1
		SS5	Persentase Implementasi Peningkatan Sinergi dan Integrasi PT Pelindo (Persero)	Persentase	100
			Persentase Pelaksanaan Peningkatan Sinergi dan Integrasi BUMN dalam Layanan Transportasi Jalan	Persentase	100
			Persentase Implementasi Peningkatan Sinergi dan Integrasi BUMN dalam Layanan Logistik	Persentase	100
			Persentase Pencapaian Konsep Sinergi Moda Transportasi DKI Jakarta	Persentase	100
3	Kepemimpinan Teknologi	SS8	Persentase Implementasi Sarana Transportasi berbasis Teknologi Tinggi (LRT)	Persentase	100
4	Peningkatan Investasi	SS8	Persentase Implementasi Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung	Persentase	90
			% Investasi yang berhasil diselesaikan	Persentase	80
5	Pengembangan Talenta	SS1	% Milenial (<42 tahun) dalam Nominated Talent	Persentase	14
			% Perempuan dalam Nominated Talent	Persentase	10
			Implementasi Talent Pool System	Persentase	100

Anggaran:
6602 Pengembangan BUMN Klaster Jasa Logistik (sebesar Rp950.000.000,-)



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

Jakarta, Desember 2021

Pihak Kedua
Wakil Menteri BUMN II

Kartika Wirjoatmodjo
NIP. Wamen-02

Pihak Pertama
Plt. Asisten Deputi Bidang
Jasa Logistik

Desty Arlaini
NIP. 19761204 199602 2 001

3) Rencana Aksi dan Trajectory Target



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

RENCANA AKSI DAN TARGET TRAJECTORY PERJANJIAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG JASA LOGISTIK

No	Prioritas Kementerian BUMN	Kode SS	Indikator Kinerja	Target 2022	Target Trajectory				Rencana Aksi
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia	SS9	Pengesahan RKAP 2022 dan Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 BUMN Klaster Jasa Logistik Tepat Waktu	100%	n.a	n.a	50%	100%	1. Menganalisis dan evaluasi usulan RKAP BUMN dan Laporan Audited BUMN. 2. Menyusun draft arahan dan kebijakan atas usulan RKAP dan Laporan Audited BUMN. 3. Mengusulkan arahan dan kebijakan kepada Wakil Menteri BUMN II dan Menteri BUMN. 4. Pelaksanaan RUPS.
		SS9	Penyampaian Tanggapan Kinerja BUMN secara Berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris	100%	n.a	100%	100%	100%	1. Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja BUMN Klaster Jasa Logistik dalam laporan berkala termasuk aspek manajemen risiko. 2. Memberikan arahan atau alternatif solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh BUMN dalam mencapai kinerja.
		SS9	Return on Equity	4.0%	n.a	n.a	n.a	4.0%	1. Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja BUMN Klaster Jasa Logistik dalam laporan berkala (triwulanan dan tahunan). 2. Memberikan arahan atas solusi alternatif yang disampaikan BUMN dalam menghadapi berbagai kendala yang dihadapi BUMN dalam mencapai kinerja.



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

No	Prioritas Kementerian BUMN	Kode SS	Indikator Kinerja	Target 2022	TW I	TW II	TW III	TW IV	Rencana Aksi
		SS9	EBITDA Margin	17,6%	n.a	n.a	n.a	17,6%	1. Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja BUMN, Klaster Jasa Logistik dalam laporan berkala (triwulanan dan tahunan). 2. Memberikan arahan atas solusi alternatif yang disampaikan BUMN dalam menghadapi berbagai kendala yang dihadapi BUMN dalam mencapai kinerja.
		SS9	Net Operating Cash Flow	Rp10.946 Miliar	Rp2.736 Miliar	Rp5.473 Miliar	Rp8.209 Miliar	Rp10.946 Miliar	1. Monitoring dan evaluasi pencapaian Net Operating Cash Flow BUMN Klaster Jasa Logistik dalam laporan berkala (triwulanan dan tahunan). 2. Memberikan arahan atas solusi alternatif yang disampaikan BUMN dalam menghadapi berbagai kendala yang dihadapi BUMN dalam mencapai target Net Operating Cash Flow.
		SS5	Penguatan Tata Kelola dan Fungsi Manajemen Risiko	100%	n.a	n.a	n.a	100%	1. Memastikan tersedianya usulan kebijakan/pedoman Manajemen Risiko. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian penguatan tata kelola dan fungsi Manajemen Risiko. 3. Membuat laporan pencapaian tata kelola dan manajemen risiko.



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

No	Prioritas Kementerian BUMN	Kode SS	Indikator Kinerja	Target 2022	TW I	TW II	TW III	TW IV	Rencana Aksi
		SS4	Jumlah BUMN Klaster Jasa Logistik yang melaksanakan IPO (Initial Public Offering)	1 BUMN	n.a	n.a	n.a	1 BUMN	1. Menganalisis dan mengevaluasi rencana IPO. 2. Menyusun draft kebijakan atas rencana IPO (persetujuan RUPS). 3. Membuat laporan atas pelaksanaan IPO.
2	Inovasi Model Bisnis	SS5	Persentase Implementasi Peningkatan Sinergi dan Integrasi PT Pelindo (Persero)	100%	n.a	n.a	n.a	100%	1. Melakukan evaluasi atas implementasi Peningkatan Sinergi dan Integrasi PT Pelindo (Persero) secara triwulanan. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi action plan Peningkatan Sinergi dan Integrasi PT Pelindo (Persero) secara triwulanan. 3. Membuat laporan tertulis atas pencapaian implementasi Peningkatan Sinergi dan Integrasi PT Pelindo (Persero) terhadap timeline yang sudah ditetapkan secara triwulanan.



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

No	Prioritas Kementerian BUMN	Kode SS	Indikator Kinerja	Target 2022	TW I	TW II	TW III	TW IV	Rencana Aksi
		SS5	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Sinergi dan Integrasi BUMN dalam Layanan Transportasi Darat secara triwulanan	100%	n.a	n.a	n.a	100%	1. Melakukan evaluasi atas pencapaian Peningkatan Sinergi dan Integrasi BUMN dalam Layanan Transportasi Darat secara triwulanan. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi action plan pembentukan merger berdasarkan aspek hukum, aspek bisnis, aspek SDM, dan aspek keuangan (aspek pajak dan akuntansi) secara triwulanan. 3. Membuat laporan tertulis atas pencapaian Peningkatan Sinergi dan Integrasi BUMN dalam Layanan Transportasi Darat secara triwulanan
		SS5	Persentase Implementasi Peningkatan Sinergi dan Integrasi BUMN dalam Layanan Logistik	100%	n.a	n.a	n.a	100%	1. Melakukan evaluasi atas pencapaian Peningkatan Sinergi dan Integrasi BUMN dalam Layanan Logistik secara triwulanan. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi action plan integrasi PT UTP ke PT Pos Indonesia secara triwulanan. 3. Membuat laporan tertulis atas pencapaian Peningkatan Sinergi dan Integrasi BUMN dalam Layanan Logistik secara triwulanan



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

No	Prioritas Kementerian BUMN	Kode SS	Indikator Kinerja	Target 2022	TW I	TW II	TW III	TW IV	Rencana Aksi
		SS5	Persentase Pencapaian Konsep Sinergi Moda Transportasi DKI Jakarta	100%	n.a	n.a	n.a	100%	1. Melakukan evaluasi atas pencapaian Konsep Sinergi Moda Transportasi DKI Jakarta secara triwulanan. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi action plan Konsep Sinergi Moda Transportasi DKI Jakarta secara triwulanan. 3. Membuat laporan tertulis atas pencapaian Konsep Sinergi Moda Transportasi DKI Jakarta secara triwulanan
3	Kepemimpinan Teknologi	SS5	Persentase Implementasi Sarana Transportasi berbasis Teknologi Tinggi (LRT)	100%	n.a	n.a	50%	100%	1. Melakukan evaluasi atas pencapaian Sarana Transportasi berbasis Teknologi Tinggi (LRT) secara triwulanan. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi action plan Sarana Transportasi berbasis Teknologi Tinggi (LRT) secara triwulanan. 3. Membuat laporan tertulis atas pencapaian Sarana Transportasi berbasis Teknologi Tinggi (LRT) secara triwulanan
4	Peningkatan Investasi	SS8	Persentase Implementasi Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung	90%	n.a	n.a	n.a	90%	1. Melakukan evaluasi atas implementasi Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung secara triwulanan. 2. Membuat laporan tertulis atas pencapaian proses implementasi Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung secara triwulanan



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

No	Prioritas Kementerian BUMN	Kode SS	Indikator Kinerja	Target 2022	TW I	TW II	TW III	TW IV	Rencana Aksi
		SS8	% investasi yang berhasil diselesaikan	80%	n.a	n.a	n.a	80%	1. Melakukan evaluasi perencanaan investasi yang akan dijalankan oleh BUMN Klaster Jasa Logistik. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi progress realisasi fisik dan keuangan investasi yang dilakukan. 3. Memberikan usulan kebijakan atas capaian investasi yang dilakukan BUMN Klaster Jasa Logistik.
5	Pengembangan Talenta	SS1	% Mienal (<42 tahun) dalam Nominated Talent	14%	n.a	n.a	n.a	14%	Melakukan monitoring dan evaluasi atas % Mienal (<42 tahun) dalam Alumni Nominated Talent BUMN Klaster Jasa Logistik.
		SS1	% Perempuan dalam Nominated Talent	10%	n.a	n.a	n.a	10%	Melakukan monitoring dan evaluasi atas % Perempuan dalam Nominated Talent BUMN Klaster Jasa Logistik.
		SS1	Implementasi Talent Pool System	100%	n.a	n.a	n.a	100%	1. Inventarisasi usulan talent dan cluster talent committee. 2. Melakukan mapping talent

Keterangan:

- SS1: Menciptakan SDM yang unggul dan profesional
- SS2: Menciptakan organisasi yang kuat, sehat dan akuntabel
- SS3: Meningkatkan tata kelola BUMN sebagai korporasi
- SS4: Penguatan Kapasitas BUMN
- SS5: Meningkatkan daya saing BUMN
- SS6: BUMN Unggul di Kancah Global
- SS7: Kontribusi BUMN terhadap pemerataan negara (APBN)
- SS8: Kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan nasional
- SS9: Kontribusi BUMN dalam peningkatan value BUMN untuk pemegang saham (Aset Negara)

Pihak Pertama
Pit Asisten Deputi Bidang
Jasa Logistik

Desty Ariani
NIP. 19761204 199602 2 001

4) Kertas Kerja Capaian Kinerja Tahun 2022

PENILAIAN CAPAIAN KINERJATRIWULAN IV 2022 ASDEP BIDANG JASA LOGISTIK - KEMENTERIAN BUMN															
Sasaran Strategis	IKU	Keterangan	Bobot	Trajectory Target				Realisasi				Capaian TW IV 2022	Indeks Capaian IKU	Nilai Kinerja Organisasi	
				Tw I	Tw II	Tw III	Tahunan	Tw I	Tw II	Tw III	Tahunan				
Menciptakan SDM yang unggul dan profesional (SS1)	% Mienal (<42 tahun) dalam Nominated Talent	Capaian atas % Mienal (<42 tahun) dalam Nominated Talent	5,88	n.a	n.a	n.a	14%	n.a	n.a	n.a	16%	114%	120,00		
	% Perempuan dalam Nominated Talent	Capaian atas % Perempuan dalam Nominated Talent	5,88	n.a	n.a	n.a	10%	n.a	n.a	n.a	15%	150%	120,00		
	Implementasi Talent Pool System	Pemetaan Terhadap BOD-1 Dan Sesi Performance dan Integrity	5,88	n.a	n.a	n.a	100%	n.a	n.a	n.a	100%	100%	120,00		
Penguatan Kapasitas BUMN (SS4)	Jumlah BUMN Klaster Jasa Logistik yang melaksanakan IPO (Initial Public Offering)	Analisa dan evaluasi rencana IPO	5,88	n.a	n.a	n.a	1 BUMN	n.a	n.a	n.a	0	100%	120,00		
	Penguatan Tata Kelola dan Fungsi Manajemen Risiko	Evaluasi dan monitoring penguatan tata kelola dan manajemen risiko	5,88	n.a	n.a	n.a	100%	n.a	n.a	n.a	100%	100%	120,00		
	Perencanaan Implementasi Peningkatan Sinergi dan Integrasi PT Pelindo (Persero)	Capaian implementasi peningkatan sinergi dan integrasi PT Pelindo	5,88	n.a	n.a	n.a	100%	n.a	n.a	n.a	99,32%	99%	99,32		
Meningkatkan Daya Saing BUMN (SS5)	Perencanaan Pelaksanaan Peningkatan Sinergi dan Integrasi BUMN Dalam Layanan Transportasi Jalan	Capaian Peningkatan Sinergi dan Integrasi BUMN Dalam Layanan Transportasi Jalan	5,88	n.a	n.a	n.a	100%	n.a	n.a	n.a	100%	100%	120,00		
	Perencanaan Implementasi Peningkatan Sinergi dan Integrasi BUMN Layanan Logistik	Capaian Implementasi Peningkatan Sinergi dan Integrasi BUMN Layanan Logistik	5,88	n.a	n.a	n.a	100%	n.a	n.a	n.a	100%	100%	120,00		
	Perencanaan Pencapaian Konsep Sinergi Moda Transportasi DKI Jakarta	Capaian Konsep Sinergi Moda Transportasi DKI Jakarta	5,88	n.a	n.a	n.a	100%	n.a	n.a	n.a	100%	100%	120,00	111,97	
	Perencanaan Implementasi Sarana Transportasi Berbasis Teknologi (Transit LRT)	Evaluasi dan monitoring pencapaian sarana transportasi LRT secara terintegrasi	5,88	n.a	n.a	50%	100%	n.a	n.a	87,53%	88,61%	88%	88,61		
	Perencanaan Implementasi Proyek Pembangunan Kerta Capat Jakarta Berduplek	Evaluasi dan monitoring implementasi Proyek Pembangunan Kerta Capat Jakarta Berduplek	5,88	n.a	n.a	n.a	90%	n.a	n.a	n.a	83,16%	92%	92,42		
Kontribusi BUMN sebagai Agen Pembangunan Nasional (SS9)	% Investasi Yang Berhasil Disalurkan	Melakukan atas capaian investasi yang disalurkan BUMN Klaster Jasa Logistik	5,88	n.a	n.a	n.a	80%	n.a	n.a	n.a	51%	64%	63,75		
	Penghasilan RUPAP 2022 dan Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 BUMN Klaster Jasa Logistik	Pelaksanaan RUPAP & Audit 112 BUMN, Yaitu KAL, RKA, PPD, DAMRI, Pelindo I-IV, Pelnas, ASDP, Pos, dan VTP	5,88	n.a	n.a	n.a	50%	100%	n.a	n.a	50%	100%	100%	120,00	
	Penyampaian Tanggapan Kinerja BUMN Secara Berkala Kepada Direksi Dan Dewan Komisaris	Penyampaian Tanggapan Kinerja Secara Berkala Kepada BUMN Klaster Jasa Logistik (B BUMN), Yaitu: KAL, RKA, PPD, DAMRI, Pelindo, Pelnas, ASDP, dan Pos	5,88	n.a	100%	100%	100%	n.a	100%	100%	100%	100%	100%	120,00	
Kontribusi BUMN dalam peningkatan daya BUMN untuk pemanggang saham (Kot Negras) (SS3)	Return On Equity	Capaian Return On Equity BUMN Pelabuan Dan Pelayaran	5,88	n.a	n.a	n.a	4%	n.a	n.a	n.a	7%	175%	120,00		
	EBITDA Margin	Capaian EBITDA Margin BUMN Pelabuan Dan Pelayaran	5,88	n.a	n.a	n.a	17,60%	n.a	n.a	n.a	25,35%	144%	120,00		
	Net Operating Cash Flow	Capaian Net Operating Cash Flow BUMN Pelabuan Dan Pelayaran	5,88	Rp2.736	Rp5.473	Rp8.299	Rp10.944	729.99	3738.79	8048.19	17.537.26	160%	120,00	111,97	
													Terpuji		

f. Asdep Deputi Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung

1) Perjanjian Kinerja Tahun 2022



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
ASISTEN DEPUTI BIDANG JASA PARIWISATA DAN PENDUKUNG
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Endra Gunawan
Jabatan : Plt. Asisten Deputi Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Kartika Wirjoatmodjo
Jabatan : Wakil Menteri BUMN II
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Desember 2021

Pihak Kedua,
Wakil Menteri BUMN II

Kartika Wirjoatmodjo
NIP. Wamen-02

Pihak pertama,
Plt. Asisten Deputi Bidang Jasa Pariwisata
dan Pendukung

Endra Gunawan
NIP. 198201112003121001

2) Rencana Aksi dan Trajectory Target



RENCANA AKSI DAN TRAJECTORY TARGET
PERJANJIAN KINERJA
ASISTEN DEPUTI BIDANG JASA PARIWISATA DAN PENDUKUNG

No.	Divisi	Kementerian/BUMN	Arahkan Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Trajectory Target				Rencana Aksi
							TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Nakl Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia			Laba bersih	Rp. M	-4.656	-1.145	-2.254	-3.517	-4.656	Melakukan evaluasi berkala atas program revenue enhancement & cost leadership
				Dividend	Rp. M	0	0	0	0	0	Melakukan evaluasi berkala atas program revenue enhancement & cost leadership
				RoE	%	-11,5%	-	-	-	-11,5%	Melakukan evaluasi berkala atas program revenue enhancement & cost leadership
				EBITDA	Rp. M	4.947				4.947	Melakukan evaluasi berkala atas program revenue enhancement & cost leadership
				Positive Operating Cashflow	Waktu	Smt. lt	Aman	Aman & Awata	Aman, Awata & GA	Aman & GA	Melakukan evaluasi berkala untuk melihat progress program perbaikan pengelolaan cashflow terutama dan kegiatan operasi
				Terselenggaranya RUPS RKAP dan RUPS Audi BUMN Klaster Pariwisata dan Pendukung Tepat Waktu	%	100%	50%	50%	-	-	Mendorong penyelenggaraan RUPS diaman tepat waktu
				Penyampaian Tanggapan Kinerja BUMN secara Berkala kepada Direksi dan Komisaris	%	100%		33,33%	33,33%	33,33%	Melakukan evaluasi berkala untuk mendorong kinerja BUMN mencapai target RKAP
				Pertumbuhan pengguna jasa/ ekspansi/ utilisasi alat produksi/ Holding Pemerintah							
				a. Bandara	8.000	57	11,4	22,8	39,9	57	Melakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui progress dan langkah yang akan diambil
				b. Airline	8.000	5,75	1,15	2,30	3,45	5,75	
				c. C Borobudur, C Prambanan, C Ratu Boko, TMI	8.000	4,27	0,85	1,71	2,56	4,27	

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

		Realisasi Program kemitraan strategis (asset recycling)	Jumlah Program	3			1	2	Pembentukan PMO: Monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui progress
		Penyelesaian restrukturisasi revolving utang grup Holding Pariwisata	%	100%	10%	35%	60%	100%	Pembentukan PMO: Melakukan kegiatan evaluasi berkala untuk mengetahui progress restrukturisasi
		Implementasi cluster talent committee BUMN Jasa Pariwisata dan Pendukung	%	100	25%	30%	75%	100%	Monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui progress
		% Mienial (<40 tahun) dalam Top Talent Klaster Pariwisata	%	10%	-	-	-	10%	Monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui progress
		% Perempuan dalam Nominated Talent Klaster Pariwisata	%	8%	-	-	-	8%	Monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui progress

Jakarta, 17 Desember 2021

Pt. Asisten Deputi Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung,


Endra Gunawan

Keterangan:

- SS-1 Menciptakan SDM yang Unggul dan Profesional
- SS-2 Menciptakan organisasi yang kuat, sehat dan akuntabel
- SS-3 Meningkatkan tata kelola BUMN sebagai korporasi
- SS-4 Penguatan kapasitas BUMN
- SS-5 Meningkatkan Daya Saing
- SS-6 BUMN Unggul di Kancah Global
- SS-7 Kontribusi BUMN terhadap Penerimaan Negara
- SS-8 Kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan nasional
- SS-9 Kontribusi BUMN dalam peningkatan nilai BUMN untuk Pemegang Saham (Aset Negara)

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

3) Kertas Kerja Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Trajectory Target				Realisasi				% Capaian 2022	Total Capaian PK (Indeksasi)	Nilai Kinerja Organisasi
			TW I	TW II	TW III	Tahunan	Tw I	Tw II	Tw III	Tahunan			
1	Kontribusi BUMN dalam peningkatan nilai BUMN untuk Pemegang Saham (Aset Negara)	Laba bersih	-1145	-2254	-3517	-4.656	-1337.06	-2059	-2023	-1459.75	131.35%	120	115.15
		Dividen		0	-	0	0	0	-	0	100.0%	120	
		RoE	-	-	-	-11.5%	-3.82%	-5.99%	-5.88%	-3.44%	170.1%	120	
		EBITDA		-	-	4.947	367.9	1360	3070.3	5.675.96	114.7%	120	
		Positive Operating Cashflow	Airnav	Airnav & Aviata	Airnav, Aviata, Garuda	Airnav, Aviata & GA	Airnav	Airnav	Airnav, Aviata, Garuda	Smit II	100.0%	120	
	Meningkatkan Daya Saing	Terselenggaranya RUPS RKAP dan RUPS Audit BUMN Klaster Pariwisata dan Pendukung Tepat Waktu	50%	50%	-	-	50%	50%	-	100%	100.0%	120	
		Penyampaian Tanggapan Kinerja BUMN secara Berkala kepada Direksi dan Komisaris		33,33%	33,33%	33,33%	n.a	33,33%	33,33%	100%	100.0%	120	
		Pertumbuhan pengguna jasa/okupansi/ utilitas alat produksi Holding Pariwisata:											
		a. Bandara	11.4	22.8	39.9	57	21.6	48.8	80.9	114	200.0%	120	
		b. Airline	1.15	2.3	3.45	5.75	0.915	6.52	10.50	14.86	258.4%	120	
		c. C Borobudur, C Prambanan, C Ratu Boko, TMII	0.85	1.71	2.56	4.27	0.93	1.74	2.41	4.35	101.87%	120.00	
		d. Okupansi HIG	23.80%	24.30%	57.90%	63.8%	31.0%	11.28%	53.51%	53.71%	84.2%	84.18	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Trajectory Target				Realisasi				% Capaian 2022	Total Capaian PK (Indeksasi)	Nilai Kinerja Organisasi
			TW I	TW II	TW III	Tahunan	Tw I	Tw II	Tw III	Tahunan			
		Penyelenggaraan event internasional untuk percepatan pemulihan ekonomi pariwisata	1 event	-	1 event	2 event	1 event	2 event	3 event	4	100.0%	120	
2	Meningkatkan Daya Saing	Penyelesaian restrukturisasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	-	-	-	100%	n.a.	33%	-	100%	100.0%	120	
		Penyelesaian inklusi ITDG dalam holding Pariwisata	-	100%	-		n.a.	75%	80%	95%	95.0%	95	
		Penguatan tata kelola dan fungsi Manajemen Risiko	25%	50%	75%	100%	25%	50%	100%	100%	100.0%	120	
		Penyusunan pengembangan KEK Kesehatan Sanur	15%	25%	35%	40%	6%	10%	24.5%	40%	100.0%	120	
	Penguatan Kapasitas BUMN	Perluasan kerjasama operatorship hotel BUMN oleh HIG	4	18	24	24	4	25	25	25	104.2%	120	
		Implementasi pengembangan duty free oleh PT Sarinah	-	-	-	100%	n.a.	75%	-	100%	100.0%	120	
		Implementasi pengembangan Taman Mini oleh PT TWG BPRB	-	-	1	1	n.a.	70%	2	2	100.0%	120	
		Implementasi penerbangan berjadwal Pelita Air Service	-	Implemented	-		-	Implemented	-	Tw II	100.0%	120	
3	Meningkatkan Daya Saing	Integrasi infrastruktur IT pada BUMN Klaster Pariwisata	10%	35%	70%	100%	5%	18%	20%	50%	50.0%	50	
4	Kontribusi BUMN sebagai Agen Pembangunan Nasional	Realisasi capex (mandatory capex)	10%	30%	50%	75%	14.4%	39.9%	51.1%	79.3%	105.7%	120	
		Realisasi Program kemitraan strategis (asset recycling)	n.a.	-	1	2	n.a.	n.a.	0.25	3	100.0%	120	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Trajectory Target				Realisasi				% Capaian 2022	Total Capaian PK (Indeksasi)	Nilai Kinerja Organisasi
			TW I	TW II	TW III	Tahunan	Tw I	Tw II	Tw III	Tahunan			
		Penyelesaian restrukturisasi/ reprofiling utang grup Holding Pariwisata	10%	35%	60%	100%	10%	40%	100%	100%	100.0%	120	
5	Menciptakan SDM yang Unggul dan Profesional	Implementasi cluster talent committee BUMN Jasa Pariwisata dan Pendukung	25%	50%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	120	
		% Milenial (<40 tahun) dalam Top Talent Klaster Pariwisata	-	-	-	10%	30%	30%	30%	30%	300.0%	120	
		% Perempuan dalam Nominated Talent Klaster Pariwisata	-	-	-	8%	13%	13%	13%	13%	166.3%	120	